

P-ISSN: 2623-0216  
E-ISSN: 2623-0224

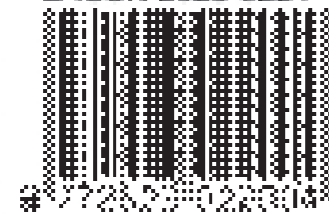
# Jurnal Civic Hukum

Volume 3, Nomor 2, November 2018



Jurnal Civic Hukum Volume 3 Nomor 1 Hal. 119-225 Mei 2018

E-ISSN 2623-0224



9 772623 022304

P-ISSN 2623-0216



9 772623 021607

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Malang

Jurnal Civic Hukum  
Volume 3, No. 2 November 2018

---

Diterbitkan dua kali dalam setahun, pada bulan Mei dan November oleh Universitas Muhammadiyah Malang dalam satu volume ada dua nomor. Berisi tulisan ilmiah hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk Jurnal Online bisa diakses dilaman : <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jch/index>

---

**Ketua Penyunting**

Dr. Nurul Zuriyah, M.Si.

**Wakil Ketua Penyunting**

Dr. Budiono, M.Si.

**Penyunting Pelaksana**

Drs. M. Mansur Ibrahim, M.H.

Dr. Agus Tinus, M.Pd.

Dr. M. Syahri, M.Si.

Drs. Nurbani Yusuf, M.Si.

Moh. Wahyu Kurniawan, M.Pd.

**Mitra Bestari**

Syaifulloh, S.Pd., M.Si. (UPI)

Dr. Triyanto, S.H., M.Hum. (UNS)

Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. (UNS)

Dikdik Baehaqi Arif, S.Pd., M.Pd. (UAD)

Dr. Nurwahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si. (UM)

Drs. Margono, M.Pd., M.Si. (UM)

Dr. Mukhmad Mardiono, S.Pd., M.Pd. (UNY)

Susan Fitriyanti, M.Pd. (UPI)

Dr. Trisakti Handayani, M.M. (UMM)

**Pelaksana Administrasi**

Rose Fitria Lutfiana, M.Pd.

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha**

Kantor Jurnal Civic Hukum Ruang Program Studi PPKn

Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144, Telp. (0341) 464318; Faksimile (0341) 460782

Pos-el : [civich@umm.ac.id](mailto:civich@umm.ac.id) dan [jurnalcivichukum@gmail.com](mailto:jurnalcivichukum@gmail.com)

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan dari guru dan dosen yang belum pernah dimuat dalam media lain. Naskah ditulis dalam kertas A4 spasi satu antara 10-15 halaman, sesuai dengan format yang tercantum pada halaman belakang ("Petunjuk Penulisan artikel Jurnal Civic Hukum"). Penulis akan mendapatkan nomor bukti penerbitan sebanyak 2 eksemplar. Dicitak di Percetakan UMM Press. Isi di luar tanggungjawab Percetakan

---

P-ISSN : 2623-0216

E-ISSN : 2623-0224

# JURNAL CIVIC HUKUM

Volume 3, No 2 Mei 2018

- Implementasi Konsep *Good Governance* dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang  
**Adam Surya Pramudya, Nurul Zuriah, Rohmad Widodo** 119-127
- Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di SMAN 1 Balauring Lembata NTT  
**Adnan Pattipeilohy, Nurbani Yusuf, Trisakti Handayani** 128-137
- Implementasi Kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan Pada Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif Mtsn Ponorogo  
**Ardian Fahmi Rosydi Karim, M. Mansur Ibrahim, Nurbani Yusuf** 138-148
- Penerapan Model Pendidikan Karakter Berbasis “5 Karakter Wajib Taruna” SMK Negeri 13 Malang  
**Heka Fitria Fujiyama, Rohmad Widodo, Trisakti Handayani** 149-162
- Peranan Guru PKn Dalam Pembentukan Kedisiplinan Siswa Di MAN Malang 1  
**Kurniati, Rohmad Widodo, Budiono** 163-173
- Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja Bima Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kota Bima NTB  
**Marniyanti, Agus Tinus, M. Syahri** 174-183
- Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Malang  
**Muhammad Hidayansyah, Trisakti Handayani, M. Syahri** 184-194

- Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Man Langke Rembong Ruteng Nusa Tenggara Timur  
**Muhammad Nasrullah, Budiono, Agus Tinus** 195-207
- Model Pengembangan Media Pembelajaran PPKn Berbasis Android Di SMPN 25 Malang  
**Naufal Muhammad Kautsar, Nurul Zuriah, Rohmad Widodo** 208-215
- Peran Kegiatan Pramuka Dalam Pengembangan Sikap Nasionalisme Siswa MAN 1 Banyuwangi  
**Nopalta Bagus Samudra, M. Mansur Ibrahim, M. Syahri** 216-225

## **IMPLEMENTASI KONSEP *GOOD GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

**Adam Surya Pramudya, Nurul Zuriyah, Rohmad Widodo**  
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia  
Email: Pramudyaadam@gmail.com

### **ABSTRAK**

Fenomena KKN timbul dan merabab disegala bidang karena sistem pemerintahannya yang tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik maka harus ada pengimplementasian konsep *good governance* dari suatu lembaga pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan bagaimana implementasi konsep *good governance* di desa Landungsari, (2) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat, (3) menjelaskan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu. Bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual dan mengumpulkan data. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Adapun informan yang digali informasinya yakni kepala desa, sekretaris desa, tokoh desa, dan warga desa Landungsari kabupaten Malang. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: (1) konsep *good governance* telah diimplementasikan oleh pemerintah desa Landungsari (2) Faktor pendukung yaitu kemampuan dan kompetensi pegawai, sedangkan faktor penghambatnya adalah kedisiplinan dari pegawai desa tersebut. (3) solusi dengan membina pegawai dengan baik dan disiplin dan konsistensi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi konsep *good governance* telah diimplementasikan di desa Landungsari kabupaten Malang, (2) Faktor pendukung yaitu kemampuan dan kompetensi pegawai desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah indiscipliner dari pegawai desa tersebut, (3) solusi melalui pembinaan pegawai dengan baik dan disiplin dan konsistensi.

**Kata Kunci : Implementasi, *Good Governance*, Kesejahteraan Sosial.**

### **ABSTRACT**

The phenomenon of corruption arise and spread in all fields because of the system of government that is not managed properly. One way that the governance system goes well then there should be the implementation of the concept of good governance of a government agency. This research aims to : (1) Describe how the implementation of the concept of good governance in the village Landungsari, (2) Analyzing the supporting factors and obstacles, (3) explain the solution in addressing the problems faced. This research uses descriptive qualitative research techniques. Where researchers tried to give an idea systematically and meticulously actual facts and the properties of certain populations. Aiming to solve the actual problems and collect data. The data collection was obtained by interview observation and documentation. The information unearthed information that the village head, village secretary, village leaders and villagers Landungsari Malang regency. Based on the research results as follows: (1) the concept of good governance has been implemented by the village government Landungsari, (2) Factors supporting the ability and competence of the employees, while inhibiting factor is the discipline of the employees of the village. (3) solutions to foster employee well and discipline and consistency. Based on the research results obtained the following

conclusions: (1) Implementation of the concept of good governance has been implemented in the village of Malang regency Landungsari, (2) Factors supporting the ability and competence of the employees of the village, While inhibiting factor is the indiscipline of the village employees, (3) solutions through employee coaching well and discipline and consistency.

**Keywords :** *Good Governance, social welfare*

## PENDAHULUAN

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacarapenyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

Bahkan kondisi saat ini pun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis).

Kedua perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (beneficiaries), harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku.

Menurut Mardoto (2009:18) untuk mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.

Prinsip-prinsip *good governance* menurut LAN (2000) terdiri dari prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip kesetaraan, prinsip supremasi hukum, prinsip keadilan, prinsip partisipasi, prinsip desentralisasi, prinsip kebersamaan, prinsip profesionalisme, prinsip cepat tanggap, prinsip efektif dan efisien, prinsip berdaya saing (Ningsih, Indah, Razak, 2013: 2).

Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.

Menurut Prasitejo (2009:6) bahwa *good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar *good governance* yang penting, yaitu, Kesejahteraan rakyat (*economic governance*), Proses pengambilan keputusan (*political governance*), Tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*).

Menurut Effendi (2010:15) *good governance* menyentuh 3 pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil

(menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Menurut (Sumarto dalam Tampubolon, 2009:1-2) *Governance*, diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* dan sektor swasta. Lebih lanjut dikatakan Sumarto (2009:17) *Istilah good governance* saat ini menjadi sangat “trendi”. Ada yang menterjemahkan *good governance* sebagai pemerintahan yang prima atau tata pemerintahan yang baik.

Sebagai cara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, konsep *good governance* adalah salah satu cara yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut. Sebagai contoh kecilnya pemerintah desa landungsari kecamatan Dau Kabupaten Malang, dalam pengimplementasiannya mencoba mengimplementasikan konsep *good governance* tersebut.

## METODE

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul implementasi konsep *good governance* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di desa Landungsari kecamatan Dau kabupaten Malang ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Zuriah, 2009:92).

Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis,

dan sistematis sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi, sebab hakikat dari suatu fenomena atau gejala penganut penelitian kualitatif adalah totalitas atau gestalt (Zuriah, 2009:92).

Adapun jenis pendekatan penelitian adalah deskriptif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi konsep *good governance* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Selain itu dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang benar-benar terjadi dan dihadapi dalam pengimplementasiannya.

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dalam penelitian. Imran dalam (Sugiyono, 2016:336), analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman pada bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan pada saat wawancara, mengumpulkan data-data dari dokumen yang relevan dengan penelitian berupa foto-foto wawancara dengan Kepala desa beserta staf desa yang bersangkutan, hingga kegiatan selanjutnya yaitu menyusun hasil-hasil wawancara kemudian diketik dan dikembangkan untuk dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Sedangkan observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan

wawancara, peneliti terlibat langsung dilokasi kemudian mengamati kejadian-kejadian di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi konsep *good governance* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di desa Landungsari**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, bahwa implementasi konsep *good governance* telah diimplementasikan oleh pemerintah desa Landungsari khususnya dalam transparansi atau keterbukaan didalam anggaran desa kepada masyarakat desa Landungsari agar masyarakat mengerti prosesnya. Serta tanggap atau responsif terhadap kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar masyarakat desa seperti HAM dan persamaan hak tanpa terkecuali tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.

Bersamaan dengan itu, selaku sekretaris desa Landungsari juga memperkuat dan memiliki pendapat yang sama dengan SI yang mengatakan sangat penting untuk menerapkan sistem *good governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari penyelewengan dan selalu melibatkan masyarakat melalui wakil-wakilnya dalam membuat peraturan atau kebijakan.

Konsep *good governance* sangat penting untuk di implementasikan karena berdampak bagus kepada masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri. Melalui prinsip dasar *good governance* yang meliputi transparansi atau keterbukaan dalam anggaran dana desa yang melibatkan wakil-wakil desa, lalu ada partisipasi dari masyarakat desa terhadap peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa Landungsari dan responsif terhadap keluhan masyarakat desa didalam



persamaan hak untuk menjamin masyarakat desa didalam ekonomi dan politik agar terciptanya masyarakat desa yang sejahtera.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan di atas didapati kondisi pemerintahan desa Landungsari telah menerapkan konsep *good governance* hal ini diindikasikan dari kesesuaian antara hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan bahwa konsep *good governance* ini benar-benar dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa Landungsari. Kondisi ini dilandasi atas apa yang disebut oleh *Institute on Governance* sebagai *konsep good governance* yang memenuhi beberapa hal sebagai berikut: a) Kerangka kerja tim (team work) antarorganisasi, departemen, dan wilayah; b) Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan; c) Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dari pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan; d) Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung risiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistis dapat dikembangkan; e) Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak (non partisan).

### **Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi konsep *good governance* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di desa Landungsari**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang telah dilakukan pada kepala desa Landungsari kecamatan DAU kabupaten Malang, yang menjadi faktor pendukung dan penghambat konsep *good governance*. Faktor pendukung dari konsep *good governance* adalah kemampuan atau kompetensi pegawai. Kemampuan atau kompetensi yang dimiliki pegawai mengacu kepada dimensi perilaku dari sebuah perilaku organisasi yang diperlukan seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Semakin baik kemampuan atau kompetensi pegawai dalam bekerja maka semakin baik kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan.

Sedangkan faktor penghambat dari konsep *good governance* itu sendiri adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya dalam melayani masyarakat. Kedisiplinan merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya dalam melayani masyarakat. Kedisiplinan memegang peranan yang amat penting dalam konsep *good governance*. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Namun berdasarkan observasi dan wawancara,

ditemukan kondisi yang menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan aparatur desa Landungsari yang masih rendah. Umumnya ketrelambatan hadir berkisar 30 menit sampai dengan 1 jam, dan pulang 20 sampai 30 menit lebih awal dibanding dengan jam yang seharusnya. Dan tak jarang juga pegawai desa landungsari tidak hadir di kantor secara periodik.

**Solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi konsep *good governance* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di desa Landungsari**

Setiap masalah yang dihadapi pasti dapat diatasi dengan berbagai macam solusi. Begitu pula dengan kendala yang dihadapi oleh hambatan implementasi konsep *good governance* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di desa Landungsari. Salah satu solusi untuk menghadapi hambatan dalam implementasi *good governance* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di desa Landungsari adalah dengan jalan memberikan pembinaan pegawai dengan baik adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan memberikan sanksi apabila terjadi perilaku indisipliner. Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan masyarakat desa yang sejahtera, diperlukan adanya pegawai desa sebagai unsur aparatur desa, abdi desa, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, dan menjauhi sifat sifat korupsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan yang baik didalam pembangunan desa Landungsari. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan waktu yang seefektif mungkin demi terciptanya pelayanan kerja yang maksimal.

Kondisi pemerintahan desa Landungsari telah menerapkan konsep *good governance* hal ini diindikasikan dari kesesuaian antara hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan bahwa konsep *good governance* ini benar-benar dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa Landungsari namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang tentunya diperlukan penyelesaian terhadap permasalahan yang sedang terjadi tersebut. Solusi yang dapat dilakukan dalam pencapaian konsep *good governance* adalah dengan jalan memberikan pembinaan pegawai dengan baik adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan memberikan sanksi apabila terjadi perilaku indisipliner. Pendisiplinan terhadap kondisi yang tidak disiplin merupakan hal yang sulit dan perlu dilakukan secara konsisten dan tegas terhadap apa yang sudah dicita-citakan. Dalam rangka usaha untuk mencapai *good governance* dan masyarakat desa yang sejahtera, diperlukan adanya pegawai desa sebagai unsur aparatur desa, abdi desa, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, dan menjauhi sifat sifat korupsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan yang baik didalam pembangunan desa Landungsari serta menggunakan waktu secara efektif dan efisien.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang implementasi konsep *good governance* di desa Landungsari kecamatan Dau kabupaten Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep *good governance* sangat penting untuk di implementasikan karena berdampak bagus kepada masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri. Melalui prinsip dasar *good governance* yang meliputi transparansi atau keterbukaan dalam anggaran dana desa yang melibatkan wakil-wakil desa, lalu ada partisipasi dari masyarakat desa terhadap peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa Landungsari dan responsif terhadap keluhan masyarakat desa didalam persamaan hak untuk menjamin masyarakat desa didalam ekonomi dan politik agar terciptanya masyarakat desa yang sejahtera. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan di atas didapati kondisi pemerintahan desa Landungsari telah menerapkan konsep *good governance* hal ini diindikasikan dari kesesuaian antara hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan bahwa konsep *good governance* ini benar-benar dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa Landungsari. Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah bahwa faktor pendukung dari konsep *good governance* adalah kemampuan atau kompetensi pegawai. Kemampuan atau kompetensi yang dimiliki pegawai mengacu kepada dimensi perilaku dari sebuah perilaku organisasi yang diperlukan seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Semakin baik kemampuan atau kompetensi pegawai dalam bekerja maka semakin baik kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan. Sedangkan faktor penghambat dari konsep *good governance* itu sendiri adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas didapati kondisi pemerintahan desa Landungsari telah menerapkan konsep *good governance* hal ini diindikasikan dari kesesuaian antara hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan bahwa konsep *good governance* ini benar-benar dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa Landungsari namun masih terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung baik yang teramatai melalui observasi maupun wawancara didapati bahwa pemerintah desa Landungsari sudah memiliki kemampuan atau kompetensi yang seharusnya dimiliki pegawai (*good governance*) mengacu kepada dimensi perilaku dari sebuah perilaku organisasi yang diperlukan seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Pemerintah desa Landungsari pula memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja, mengutamakan kualitas dan keteraturan, kesadaran organisasional, mendapatkan pengarahan, mencari informasi, berpikir secara konseptual dan percaya diri dalam bekerja.

Sedangkan faktor penghambat dari konsep *good governance* itu sendiri adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya dalam melayani masyarakat. Kedisiplinan memegang peranan yang amat penting dalam konsep *good governance*. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diatasi oleh atasan. Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Namun berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan kondisi yang menunjukkan

bahwa tingkat kedisiplinan aparatur desa Landungsari yang masih rendah. Umumnya ketrelambatan hadir berkisar 30 menit sampai dengan 1 jam, dan pulang 20 sampai 30 menit lebih awal dibanding dengan jam yang seharusnya. Dan tak jarang juga pegawai desa landungsari tidak hadir di kantor secara periodik.

Kesimpulan hasil penelitian di atas didapati bahwa salah satu solusi untuk menghadapi hambatan dalam implementasi *good governance* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di desa Landungsari adalah dengan jalan memberikan pembinaan pegawai dengan baik adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan memberikan sanksi apabila terjadi perilaku indisipliner. Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan masyarakat desa yang sejahtera, diperlukan adanya pegawai desa sebagai unsur aparatur desa, abdi desa, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, dan menjauhi sifat sifat korupsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan yang baik didalam pembangunan desa Landungsari. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan waktu yang seefektif mungkin demi terciptanya pelayanan kerja yang maksimal.

Solusi lain yang dapat dilakukan dalam pencapaian konsep *good governance* adalah dengan jalan memberikan pembinaan pegawai dengan baik adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan memberikan sanksi apabila terjadi perilaku indisipliner. Pendisiplinan terhadap kondisi yang tidak disiplin merupakan hal yang sulit dan perlu dilakukan secara konsisten dan tegas terhadap apa yang sudah dicita-

itakan. Dalam rangka usaha untuk mencapai *good governance* dan masyarakat desa yang sejahtera, diperlukan adanya pegawai desa sebagai unsur aparatur desa, abdi desa, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, dan menjauhi sifat sifat korupsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan yang baik didalam pembangunan desa Landungsari serta menggunakan waktu secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran berikut :

#### **Bagi Desa Landungsari**

Mewujudkan terciptanya kondisi pemerintahan yang baik dalam melakukan pelayanan terhadap publik merupakan wujud penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat dari elemen keluarga hingga nasional Indonesia secara menyeluruh. Disini peran desa sangat diharapkan hadir di dalamnya sehingga publik dapat menjalankan proses kegiatan baik itu administrasi maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat pada elemen desa. Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam upaya peningkatan kondisi sosial ekonomi hingga budaya masyarakat sehingga diperlukan pemerintahan desa yang memebuhi unsur-unsur *good governance*.

#### **Bagi masyarakat**

*Good governance* merupakan kondisi yang baik dalam proses pensejahteraan masyarakat. *Good governance* menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat desa, sehingga masyarakat desa perlu dan wajib melakukan pengawalan terhadap perilaku dan proses pemerintahan yang dijalankan oleh

pemerintah desa, begitu pula di desa Landungsari. Sehingga disarankan masyarakat desa Landungsari untuk peduli dan ikut mengawasi pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah desa Landungsari agar pemerintahan yang benar-benar memenuhi konsep *good governance* dapat terwujud.

#### **Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah sarana penambahan khasanah kajian mengenai *good governance* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial serta menambah wawasan politik. Dan pula dapat berguna untuk penelitian yang selanjutnya sebagai sumber referensi dalam penerapan konsep *good governance* dipemerintah daerah baik pada lingkungan desa atau pada lingkungan pemerintahan yang lebih tinggi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Effendi. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Kantor Menteri Negara PAN.*
- Mardoto. 2009. *Mengkritisi Clean And Good Governance Di Indonesia*
- Ningsih, dkk. 2013. *Jurnal ilmiah Analisis Hubungan Prinsip-prinsip Good Governance dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.*
- Prasetijo. 2009. *Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan*
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Tampubolon, 2013. *Jurnal ilmiah pelaksanaan prinsip good governance dalam alokasi dana desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan*

Zuriah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

## IMPLEMENTASI KURIKULUM DIFERENSIASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA KELAS AKSELERASI PESERTA DIDIK CERDAS INKLUSIF MTsN PONOROGO

**Ardian Fahmi Rosydi Karim, M. Mansur Ibrahim, Nurbani Yusuf**  
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia  
Email: [ardianfahmi20@gmail.com](mailto:ardianfahmi20@gmail.com)

### ABSTRAK

Langkah pertama dalam implementasi kurikulum yang penting ditempuh sekolah adalah penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta didik cerdas istimewa serta karakternya, di mana perlakuan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan karakter peserta didik cerdas istimewa disebabkan terjadinya *miss konsepsi* serta *ketidak sesuaian (lack of it)* antara tuntutan yang seharusnya dengan kenyataan pelaksanaan pada saat di kelas. Hal ini yang kemudian menyebabkan perlakuan dan pelayanan pembelajaran pada kelas akselerasi di sekolah menjadi kurang maksimal bahkan kurang berguna untuk mengembangkan potensi peserta didik cerdas istimewa. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimanakah langkah – langkah dalam mengimplementasikan Kurikulum Diferensiasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif Yang Dilaksanakan Di MTsN Ponorogo, Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Diferensiasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif MTsN Ponorogo, Bagaimana Solusi terhadap Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum diferensiasi pada mata pelajaran. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memiliki beberapa pertimbangan, yaitu: (1) pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, (2) pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, (3) metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sumber data primer diperoleh hasil wawancara yakni wawancara dengan kepala sekolah, Ketua Program PDCI, Guru PKn, serta siswa kelas VII PDCI. Kemudian data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kesesuaian dengan komponen kurikulum seperti: (1) Tujuan, (2) Isi atau materi (Bahan Ajar), (3) Proses (Strategi Mengajar) atau sistem penyampaian dari media, (4) Evaluasi, tetapi Proses Implementasi kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas Akselerasi PDCI MTsN Ponorogo mendapatkan beberapa kendala di dalamnya yaitu disebabkan oleh keadaan siswa yang cenderung berfikir cepat tetapi gampang bosan kalau materi yang disampaikan tidak membuat siswa berfikir lebih jauh.

**Kata kunci:** *Implementasi Kurikulum Diferensiasi, peserta didik cerdas inklusif*

### ABSTRACT

The first step in the implementation of the curriculum of the school is important are adjustments to the provisions that apply to students are intelligent as well as special characters, where treatment insufficient and not in accordance with special smarter learners character due to the occurrence of miss conception as well as the rendering (lack of it) between the demands that should be with the reality of implementation at the time in class. This then lead to the treatment and service learning on grade acceleration in school becomes insufficient even less useful to develop potential learners are special, intelligent Research takes the outline of the problem How steps-the steps in implementing the Curriculum Differentiation on the subjects of Civics Class Accelerated Learners In an inclusive Smart MTsN Ponorogo, what are the obstacles faced in implementing the

Curriculum Differentiation on the subjects of Civics Class Accelerated Learners Intelligent Inclusive MTsN Ponorogo, How solutions to obstacles faced in implementing the curriculum differentiation on subjects. The method used in this research approaches Qualitative because it has several considerations, namely: (1) the qualitative approach more easily when faced with the reality plural, (2) it serves directly the nature of the relationship between researchers and informants, (3) the method is more sensitive and can adjust to a lot of sharpening influences together to patterns of values encountered. Sources of primary data obtained by interviews the interviews with principals, Chairman of the PDCI, Citizenship teachers, and students of class VII PDCI. then the data were analyzed descriptively qualitative. Based on the results of the research are conformity with curriculum components such as: (1) Objectives, (2) Content or materials (Subjects), (3) Process (Strategies) or the delivery systems of the media, (4) evaluation, but the process of implementation of the curriculum Differentiation Citizenship Education at PDCI Acceleration class MTsN Ponorogo get some constraints therein is caused by circumstances cenderung students who think fast but easily bored if the material presented does not make students to think further

**Keywords:** *Implementation of curriculum differentiation, inclusive smart learners*

## PENDAHULUAN

Kurikulum telah menjadi bagian terpenting dalam dunia pendidikan. kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah No. 19. Tentang Standart Nasional Pendidikan. 2005 : 4). Semua aktivitas yang diperentukkan bagi kegiatan pembelajaran untuk siswa di sekolah merupakan suatu *grand concept* dari sebuah kurikulum.

Kurikulum menjadi kunci utama terlaksananya pembelajaran yang terarah dan efisien. Hal ini dikarenakan kurikulum dijadikan pedoman bagi seorang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sehingga tidak mengherankan apabila kurikulum selalu dirombak dan ditinjau kembali untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22, Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2006 : 6).

Desain kurikulum peserta didik berbakat dan berkecerdasan istimewa sangat diperlukan karena kurikulum reguler tidak mencukupi dan tidak cocok untuk peserta didik berbakat dan berkecerdasan istimewa. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik berbakat dan berkecerdasan istimewa mampu bertindak cepat, berkemampuan belajar mendalam, berkemampuan memanipulasi konsep, berkebutuhan khusus dan memerlukan pembelajaran yang menantang. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah harus mendesain dan memodifikasi kurikulum khusus yang berbeda dengan kurikulum reguler bagi mereka. Berdasarkan pada

realita tersebut kurikulum reguler harus dimodifikasi dengan menyusunnya bukan mengurangi atau menambahnya, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat intelektualnya.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (2003:10-13) menjelaskan bahwa :

Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mendapat layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan dan keunggulannya, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya serta menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.

Pelaksanaan pendidikan khusus pada peserta didik berbakat dan berkecerdasan istimewa dilakukan dengan bermacam-macam tipe, yaitu *acceleration* (percepatan), *segregation* (pengelompokan) dan *enrichment* (pengayaan) (Tirtonegoro. 2006 : 108). Berdasarkan Pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik cerdas istimewa selama ini telah dilakukan dengan bentuk program percepatan belajar (akselerasi). Akselerasi dapat diselenggarakan dalam 4 (empat) bentuk pilihan, yaitu kelas biasa, kelas khusus, sekolah khusus, dan Penerapan Sistem Kredit Semester (Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 1976 Tahun 2014:7-8)

Berdasarkan ketentuan tersebut, MTsN Ponorogo melaksanakan program akselerasi dengan diselenggarakan dalam bentuk kelas khusus, yaitu kelas di mana siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar dalam kelas khusus. Sedangkan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program belajar bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa lebih cepat

dibandingkan dengan siswa reguler. Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP / MTs) yang tadinya ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat dipercepat menjadi 2 (dua) tahun, yaitu pada awal masuk kelas VII (Tujuh) dan tahun berikutnya langsung kelas IX (Sepuluh).

Kurikulum yang diterapkan di Indonesia dan berlaku sampai saat ini sudah ditentukan bahwa isi kurikulum yang diberlakukan di sekolah harus dikembangkan dari standar nasional pendidikan yang telah ditentukan pemerintah, sehingga perbedaan kurikulum antar sekolah hanya dibedakan oleh indikator yang dikembangkan masing-masing sekolah, sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik sekolah yang bersangkutan, dan keunggulan yang ingin dicapai.

Langkah pertama yang penting ditempuh sekolah adalah penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta didik cerdas istimewa serta karakternya, di mana perlakuan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan karakter peserta didik cerdas istimewa disebabkan terjadinya *miss konsepsi* serta ketidaksesuaian (*lack of it*) antara tuntutan yang seharusnya dengan kenyataan pelaksanaan pada saat di kelas. Hal ini yang kemudian menyebabkan perlakuan dan pelayanan pembelajaran pada kelas akselerasi di sekolah menjadi kurang maksimal bahkan kurang berguna untuk mengembangkan potensi peserta didik cerdas istimewa.

Kurikulum berdiferensiasi untuk program percepatan belajar dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi kurikulum nasional dan muatan lokal dengan cara memodifikasi alokasi waktu, memodifikasi isi/materi, memodifikasi sarana-prasarana, memodifikasi lingkungan



belajar, dan memodifikasi pengelolaan kelas, Kurikulum program akselerasi di MTsN Ponorogo juga mengikuti pola pengembangan kurikulum diferensiasi tersebut.

Pola diferensiasi kurikulum program akselerasi di MTsN Ponorogo sudah diterapkan sejak awal pembukaan program akselerasi tahun 2009, pola tersebut menjadi embrio yang terus berkembang mengikuti perubahan kurikulum di Indonesia. Pada awal pembukaan program akselerasi sampai sekarang di MTsN Ponorogo masih menggunakan acuan kurikulum KTSP dan mulai mencanangkan kurikulum diferensiasi 2013 pada Pembelajaran akademik ditahun depan yaitu pada tahun demik 2016/2017.

Pengembangan pola kurikulum diferensiasi tersebut terus berjalan dengan berbagai modifikasi. Sehingga kemampuan pendidik serta tenaga kependidikan MTsN Ponorogo akan sangat menentukan hasil yang dicapai dalam kurikulum diferensiasi. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai pola diferensiasi kurikulum tersebut, yang dispesifikasi lagi dalam implementasinya ketika di sekolah. Melalui penelitian skripsi ini, peneliti mengambil judul implementasi kurikulum diferensiasi pendidikan kewarganegaraan pada kelas akselerasi peserta didik cerdas inklusif MTsN Ponorogo.

## **METODE**

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif tidak

boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Moleong, 2004:4).

Syaodih (2009 : 60) menjelaskan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sugiyono (2010:15) mengemukakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena memiliki beberapa pertimbangan, yaitu: (1) pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, (2) pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, (3) metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2004:9-10).

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian yang berjudul Implementasi Kurikulum diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan Pada Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusi MTsN Ponorogo ialah menggunakan pendekatan studi kasus. Salim (2006:116) menyejelaskan pendekatan studi kasus dipahami sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginginkan konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi pihak luar. Dengan

menggunakan desain penelitian studi kasus peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan di MTsN Ponorogo.

#### a. Tujuan

Pendidikan Kewarganegaraan di MTsN Ponorogo merupakan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat MTs bertujuan untuk:

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya

- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

#### b. Materi

Materi pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan haruslah menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan, potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan Alokasi waktu.

Adapun materi yang di berikan pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas Akselerasi PDCI MTsN Ponorogo adalah mencangkup sebagai berikut ;

- 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan
- 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
- 3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional

- HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
- 4) Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara
  - 5) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
  - 6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
  - 7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
  - 8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.
- c. Proses Pembelajaran
- Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.
- 1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
  - 2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
  - 3) Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
  - 4) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur ciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.
- d. Evaluasi
- Evaluasi atau yang lebih dikenal dengan istilah penilaian ialah suatu proses penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.
- Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

- 1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- 2) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- 3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
- 4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria

ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.

- 5) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

Penilaian dilakukan secara berkelanjutan guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik, baik sebagai efek langsung (*main effect*) maupun efek pengiring (*nurturant effect*) dari proses pembelajaran. Adapun instrumen yang digunakan dalam teknik penilaian pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas akselerasi MTsN Ponorogo ialah ;

Teknik	Bentuk Instrumen
Tes tertulis	Tes pilihan :Pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dll. Tesaisian : isian singkat dan uraian
Observasi (pengamatan)	Lembar observasi ( lembar pengamatan )
Penugasan Individu atau kelompok	Pekerjaan rumah Proyek
Tes Lisan	Daftar pertanyaan

#### **Kendala Implementasi Kurikulum Diferensiasi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan MTsN Ponorogo.**

Sebagaimana penjelasan dan pemahaman mengenai kurikulum Diferensiasi yang dijelaskan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1976 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Akselerasi Belajar

Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa Pada Madrasah yang menyebutkan bahwa Kurikulum Program Akselerasi adalah kurikulum nasional dan muatan lokal yang dimodifikasi dengan penekanan materi esensial dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan mewartakan integritas antara pengembangan

spiritual, logika, etika, dan estetika, serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir logistik, kreatif, sistematis, linier, dan konvergen, untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa mendatang.

Pendapat beberapa pakar kurikulum diferensiasi yang menjelaskan bahwa kurikulum diferensiasi adalah kurikulum nasional dan muatan lokal yang telah dimodifikasi dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : (1) modifikasi alokasi waktu, yang disesuaikan dengan kecepatan belajar bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; (2) modifikasi isi/materi, dipilih yang esensial; (3) modifikasi sarana-prasarana, yang disesuaikan dengan karakteristik siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yakni senang menemukan sendiri pengetahuan baru; (4) modifikasi lingkungan belajar yang memungkinkan siswa memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat memenuhi kehausan akan pengetahuan; (5) modifikasi pengelolaan kelas, yang memungkinkan siswa dapat bekerja di kelas, baik secara mandiri, berpasangan, maupun berkelompok.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum diferensiasi adalah kurikulum yang memodifikasi semua aspek kurikulum untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik dengan kecerdasan istimewa, oleh sebab itu apabila tidak diperhatikan dengan seksama maka akan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kendala dalam hasil belajar yang maksimal oleh peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa tersebut.

Hasil pengamatan yang diperkuat dari wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan kendala yang dihadapi peserta didik dan guru mata pelajaran pendidikan

kewarganegaraan MTsN Ponorogo. ada pada materi yang disampaikan oleh guru terlalu banyak, ini dikarenakan materi yang disampaikan oleh guru tidak terdapat modifikasi untuk memilih materi esensial. Sebagaimana dapat kita ketahui dari materi yang disajikan yang dirancang Guru Pendidikan Kewarganegaraan MTsN Ponorogo memang tidak terdapat modifikasi pada materi yang seharusnya dipilih atau dimodifikasi.

Kendala ini memang diakui oleh guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan MTsN Ponorogo yang menyatakan bahwa ada beberapa hal alasan untuk tidak melakukan modifikasi materi secara esensial sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Sulistyarningsih S.Pd ada beberapa pertimbangan untuk tidak melakukan modifikasi materi secara esensial dikarenakan ada kekhawatiran apabila dilakukan modifikasi maka yang terjadi kita hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, sedangkan PKn itu kan juga mengajar pendidikan karakter.

Beberapa data dan informasi yang peneliti dapatkan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam mengimplementasikan kurikulum diferensiasi tersebut terdapat pada tidak adanya modifikasi pemadatan materi yang esensial dan apabila dilakukan modifikasi pemadatan materi yang esensial maka risikonya adalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya ada *Transfer Of Knowledge* sekedar memberikan pengetahuan saja, sedangkan untuk menanamkan nilai – nilai dan norma – norma yang istilahnya dikenal dengan sebutan *Transfer of Value* dalam membentuk karakter sulit untuk dicapai oleh peserta didik.

### **Upaya Dalam mengatasi kendala Kurikulum Diferensiasi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Berangkat dari penjelasan di atas mengenai kendala implementasi kurikulum diferensiasi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kelas akselrasi peserta didik cerdas inklusif MTsN Ponorogo yaitu mengenai tidak adanya modifikasi pemadatan materi yang esensial dan apabila dilakukan modifikasi pemadatan materi yang esensial maka risikonya adalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya ada *Transfer Of Knowledge* atau hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, sedangkan untuk menanamkan nilai – nilai dan norma – norma yang terdapat pada materi pendidikan kewarganegaraan atau istilahnya *Transfer of Value* sulit untuk dicapai oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan untuk mencapai sebuah pembelajaran yang mengajarkan nilai – nilai norma yang seharusnya dimiliki peserta didik membutuhkan pengalaman belajar yang cukup panjang waktunya untuk memberikan pemaknaan dalam proses pembelajaran tersebut.

Maka untuk mengatasi kendala tersebut sebagai peneliti ingin memberikan sumbangsih pemikiran yaitu dalam mengimplentasikan kurikulum diferensiasi sejatinya harus terdapat pemadatan materi dikarenakan kebutuhan peserta didik yang mempunyai kecerdasan istimewa sangatlah berbeda dengan siswa regular, sebab ciri khas peserta didik yang mempunyai kecerdasan istimewa tersebut selalu ingin mengetahui hal – hal baru yang menantang pengetahuannya, sebagaimana pendapat beberapa pakar mengenai peserta didik tersebut.

Peneliti menawarkan solusi pemadatan materi dengan cara menentukan materi

esensial yang tidak membuang materi yang dianggap tidak perlu, tetapi menggabungkan materi yang dianggap mempunyai kesamaan dan cara berfikir yang urut – urut logis.

Adapun mengenai permasalahan yang timbul akibat adanya modifikasi pemadatan materi yang esensial yaitu mengenai hanya terdapat adanya *Transfer Of Knowledge* atau hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, sedangkan untuk menanamkan nilai – nilai dan norma – norma yang berlaku di Indonesia atau istilahnya *Transfer of Value* sulit untuk dicapai oleh peserta didik. Maka solusi untuk kendala yang timbul ini tidak bisa hanya diwajibkan pada mata pelajarannya Pendidikan Kewarganegaraan saja, sebab kurikulum sekolah yang memaksa adanya pemadatan alokasi waktu pelajaran ini yang sebenarnya menjadi berat untuk dibebankan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh sebab itu, sekolah yang mempunyai andil besar untuk mengatasi kendala ini, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan – kegiatan sekolah yang bersifat pendidikan karakter semisal, outbond, Pramuka, pondok romadhon, dan kegiatan – kegiatan extra yang lain.

Suatu keuntungan besar dimiliki MTsN Ponorogo karena untuk mengatasi kendala ini seharusnya tidak sulit, sebab ciri khas sekolah ini adalah sekolah agama sehingga pendidikan karakter bercirikan islam nasionalis sudah sangat cukup membekali siswa dalam menanamkan nilai nilai kearah karakter yang diharapkan sebagaimana tugas yang seharusnya ditbebaskan pada pembelajaran di Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa mengenai Implementasi Kurikulum Diferensiasi Pendidikan

Kewarganegaraan pada kelas akselerasi peserta didik cerdas inklusif MTsN Ponorogo maka dapat diambil simpulan bahwa. Proses Implementasi kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas Akselerasi PDCI MTsN Ponorogo Belum Terdapat Kesesuaian dengan maksud dari pada Kurikulum Diferensiasi sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1976 Tahun 2014.

Proses Implementasi kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas Akselerasi PDCI MTsN Ponorogo mendapatkan beberapa kendala didalamnya yaitu disebabkan oleh tidak adanya pemadatan materi yang esensial sehingga membuat proses pembelajaran menjadi tidak menantang dan apabila terdapat pemadatan materi maka risikonya adalah hanya terdapat *transfer of knowledge* sehingga tidak ada *transfer of value* dalam pembelajaran tersebut, Hal ini dipicu karena keadaan siswa yang cenderung berfikir cepat tetapi gampang bosan kalau materi yang disampaikan tidak membuat siswa berfikir lebih jauh.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka seharusnya didalam membuat kurikulum diferensiasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut harus ada terdapat pemadatan materi yang esensial dan efektif sehingga materi yang akan disampaikan memicu siswa untuk tertantang mempelajari sebuah materi yang diajarkan, sedangkan resiko terhadap adanya pemadatan materi tersebut sekolah seharusnya bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan yang timbul karena kebijakannya tersebut. Oleh sebab itu maka sekolah harus membuat beberapa kegiatan yang terencana dengan baik untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, semisal dengan

mengadakan kegiatan outbond, pramuka, dan kegiatan yang mempunyai karakter lainya.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Madrasah dalam proses pengembangan kurikulum sebaiknya sering mengadakan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan untuk guru-guru PKn sebagai pribadi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kemajuan siswanya agar mampu mengembangkan silabus dan RPP secara mandiri yang sesuai dengan kompetensi mengajarnya.

Madrasah harus lebih memperhatikan proses kegiatan pembelajaran yang terorganisir dan saling berkesinambungan dengan semua mata pelajaran agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar yang maksimal. Madrasah harus membuat beberapa kegiatan yang terancang dengan baik untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, semisal dengan mengadakan kegiatan outbond, pramuka, dan kegiatan yang mempunyai karakter lainya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomer 1976 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Akselerasi Belajar Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasasn Dan/Atau Bakat Istimewa Bagi Madrasah
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 *Tentang Standart Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- Salim, Agus. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Bandung: Alfabeta
- Syaodih, Sukmadinata. 2009. *Metode penelitian pendidikan.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.



## IMPLEMENTASI KURIKULUM DIFERENSIASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA KELAS AKSELERASI PESERTA DIDIK CERDAS INKLUSIF MTsN PONOROGO

**Ardian Fahmi Rosydi Karim, M. Mansur Ibrahim, Nurbani Yusuf**  
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia  
Email: [ardianfahmi20@gmail.com](mailto:ardianfahmi20@gmail.com)

### ABSTRAK

Langkah pertama dalam implementasi kurikulum yang penting ditempuh sekolah adalah penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta didik cerdas istimewa serta karakternya, di mana perlakuan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan karakter peserta didik cerdas istimewa disebabkan terjadinya *miss konsepsi* serta *ketidak sesuaian (lack of it)* antara tuntutan yang seharusnya dengan kenyataan pelaksanaan pada saat di kelas. Hal ini yang kemudian menyebabkan perlakuan dan pelayanan pembelajaran pada kelas akselerasi di sekolah menjadi kurang maksimal bahkan kurang berguna untuk mengembangkan potensi peserta didik cerdas istimewa. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimanakah langkah – langkah dalam mengimplementasikan Kurikulum Diferensiasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif Yang Dilaksanakan Di MTsN Ponorogo, Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Diferensiasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif MTsN Ponorogo, Bagaimana Solusi terhadap Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum diferensiasi pada mata pelajaran. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memiliki beberapa pertimbangan, yaitu: (1) pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, (2) pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, (3) metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sumber data primer diperoleh hasil wawancara yakni wawancara dengan kepala sekolah, Ketua Program PDCI, Guru PKn, serta siswa kelas VII PDCI. Kemudian data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kesesuaian dengan komponen kurikulum seperti: (1) Tujuan, (2) Isi atau materi (Bahan Ajar), (3) Proses (Strategi Mengajar) atau sistem penyampaian dari media, (4) Evaluasi, tetapi Proses Implementasi kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas Akselerasi PDCI MTsN Ponorogo mendapatkan beberapa kendala di dalamnya yaitu disebabkan oleh keadaan siswa yang cenderung berfikir cepat tetapi gampang bosan kalau materi yang disampaikan tidak membuat siswa berfikir lebih jauh.

**Kata kunci:** *Implementasi Kurikulum Diferensiasi, peserta didik cerdas inklusif*

### ABSTRACT

The first step in the implementation of the curriculum of the school is important are adjustments to the provisions that apply to students are intelligent as well as special characters, where treatment insufficient and not in accordance with special smarter learners character due to the occurrence of miss conception as well as the rendering (lack of it) between the demands that should be with the reality of implementation at the time in class. This then lead to the treatment and service learning on grade acceleration in school becomes insufficient even less useful to develop potential learners are special, intelligent Research takes the outline of the problem How steps-the steps in implementing the Curriculum Differentiation on the subjects of Civics Class Accelerated Learners In an inclusive Smart MTsN Ponorogo, what are the obstacles faced in implementing the

Curriculum Differentiation on the subjects of Civics Class Accelerated Learners Intelligent Inclusive MTsN Ponorogo, How solutions to obstacles faced in implementing the curriculum differentiation on subjects. The method used in this research approaches Qualitative because it has several considerations, namely: (1) the qualitative approach more easily when faced with the reality plural, (2) it serves directly the nature of the relationship between researchers and informants, (3) the method is more sensitive and can adjust to a lot of sharpening influences together to patterns of values encountered. Sources of primary data obtained by interviews the interviews with principals, Chairman of the PDCI, Citizenship teachers, and students of class VII PDCI. then the data were analyzed descriptively qualitative. Based on the results of the research are conformity with curriculum components such as: (1) Objectives, (2) Content or materials (Subjects), (3) Process (Strategies) or the delivery systems of the media, (4) evaluation, but the process of implementation of the curriculum Differentiation Citizenship Education at PDCI Acceleration class MTsN Ponorogo get some constraints therein is caused by circumstances cenderung students who think fast but easily bored if the material presented does not make students to think further

**Keywords:** *Implementation of curriculum differentiation, inclusive smart learners*

## PENDAHULUAN

Kurikulum telah menjadi bagian terpenting dalam dunia pendidikan. kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah No. 19. Tentang Standart Nasional Pendidikan. 2005 : 4). Semua aktivitas yang diperentukkan bagi kegiatan pembelajaran untuk siswa di sekolah merupakan suatu *grand concept* dari sebuah kurikulum.

Kurikulum menjadi kunci utama terlaksananya pembelajaran yang terarah dan efisien. Hal ini dikarenakan kurikulum dijadikan pedoman bagi seorang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sehingga tidak mengherankan apabila kurikulum selalu dirombak dan ditinjau kembali untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22, Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2006 : 6).

Desain kurikulum peserta didik berbakat dan berkecerdasan istimewa sangat diperlukan karena kurikulum reguler tidak mencukupi dan tidak cocok untuk peserta didik berbakat dan berkecerdasan istimewa. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik berbakat dan berkecerdasan istimewa mampu bertindak cepat, berkemampuan belajar mendalam, berkemampuan memanipulasi konsep, berkebutuhan khusus dan memerlukan pembelajaran yang menantang. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah harus mendesain dan memodifikasi kurikulum khusus yang berbeda dengan kurikulum reguler bagi mereka. Berdasarkan pada

realita tersebut kurikulum reguler harus dimodifikasi dengan menyusunnya bukan mengurangi atau menambahnya, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat intelektualnya.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (2003:10-13) menjelaskan bahwa :

Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mendapat layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan dan keunggulannya, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya serta menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.

Pelaksanaan pendidikan khusus pada peserta didik berbakat dan berkecerdasan istimewa dilakukan dengan bermacam-macam tipe, yaitu *acceleration* (percepatan), *segregation* (pengelompokan) dan *enrichment* (pengayaan) (Tirtonegoro. 2006 : 108). Berdasarkan Pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik cerdas istimewa selama ini telah dilakukan dengan bentuk program percepatan belajar (akselerasi). Akselerasi dapat diselenggarakan dalam 4 (empat) bentuk pilihan, yaitu kelas biasa, kelas khusus, sekolah khusus, dan Penerapan Sistem Kredit Semester (Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 1976 Tahun 2014:7-8)

Berdasarkan ketentuan tersebut, MTsN Ponorogo melaksanakan program akselerasi dengan diselenggarakan dalam bentuk kelas khusus, yaitu kelas di mana siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar dalam kelas khusus. Sedangkan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program belajar bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa lebih cepat

dibandingkan dengan siswa reguler. Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP / MTs) yang tadinya ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat dipercepat menjadi 2 (dua) tahun, yaitu pada awal masuk kelas VII (Tujuh) dan tahun berikutnya langsung kelas IX (Sepuluh).

Kurikulum yang diterapkan di Indonesia dan berlaku sampai saat ini sudah ditentukan bahwa isi kurikulum yang diberlakukan di sekolah harus dikembangkan dari standar nasional pendidikan yang telah ditentukan pemerintah, sehingga perbedaan kurikulum antar sekolah hanya dibedakan oleh indikator yang dikembangkan masing-masing sekolah, sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik sekolah yang bersangkutan, dan keunggulan yang ingin dicapai.

Langkah pertama yang penting ditempuh sekolah adalah penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta didik cerdas istimewa serta karakternya, di mana perlakuan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan karakter peserta didik cerdas istimewa disebabkan terjadinya *miss konsepsi* serta ketidaksesuaian (*lack of it*) antara tuntutan yang seharusnya dengan kenyataan pelaksanaan pada saat di kelas. Hal ini yang kemudian menyebabkan perlakuan dan pelayanan pembelajaran pada kelas akselerasi di sekolah menjadi kurang maksimal bahkan kurang berguna untuk mengembangkan potensi peserta didik cerdas istimewa.

Kurikulum berdiferensiasi untuk program percepatan belajar dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi kurikulum nasional dan muatan lokal dengan cara memodifikasi alokasi waktu, memodifikasi isi/materi, memodifikasi sarana-prasarana, memodifikasi lingkungan

belajar, dan memodifikasi pengelolaan kelas, Kurikulum program akselerasi di MTsN Ponorogo juga mengikuti pola pengembangan kurikulum diferensiasi tersebut.

Pola diferensiasi kurikulum program akselerasi di MTsN Ponorogo sudah diterapkan sejak awal pembukaan program akselerasi tahun 2009, pola tersebut menjadi embrio yang terus berkembang mengikuti perubahan kurikulum di Indonesia. Pada awal pembukaan program akselerasi sampai sekarang di MTsN Ponorogo masih menggunakan acuan kurikulum KTSP dan mulai mencanangkan kurikulum diferensiasi 2013 pada Pembelajaran akademik ditahun depan yaitu pada tahun demik 2016/2017.

Pengembangan pola kurikulum diferensiasi tersebut terus berjalan dengan berbagai modifikasi. Sehingga kemampuan pendidik serta tenaga kependidikan MTsN Ponorogo akan sangat menentukan hasil yang dicapai dalam kurikulum diferensiasi. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai pola diferensiasi kurikulum tersebut, yang dispesifikasi lagi dalam implementasinya ketika di sekolah. Melalui penelitian skripsi ini, peneliti mengambil judul implementasi kurikulum diferensiasi pendidikan kewarganegaraan pada kelas akselerasi peserta didik cerdas inklusif MTsN Ponorogo.

## **METODE**

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif tidak

boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Moleong, 2004:4).

Syaodih (2009 : 60) menjelaskan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sugiyono (2010:15) mengemukakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena memiliki beberapa pertimbangan, yaitu: (1) pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, (2) pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, (3) metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2004:9-10).

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian yang berjudul Implementasi Kurikulum diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan Pada Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusi MTsN Ponorogo ialah menggunakan pendekatan studi kasus. Salim (2006:116) menyejelaskan pendekatan studi kasus dipahami sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginginkan konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi pihak luar. Dengan

menggunakan desain penelitian studi kasus peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan di MTsN Ponorogo.

#### a. Tujuan

Pendidikan Kewarganegaraan di MTsN Ponorogo merupakan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat MTs bertujuan untuk:

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya

- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

#### b. Materi

Materi pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan haruslah menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan, potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan Alokasi waktu.

Adapun materi yang di berikan pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas Akselerasi PDCI MTsN Ponorogo adalah mencangkup sebagai berikut ;

- 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan
- 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
- 3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional

- HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
- 4) Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara
  - 5) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
  - 6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
  - 7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
  - 8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.
- c. Proses Pembelajaran
- Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.
- 1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
  - 2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
  - 3) Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
  - 4) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur ciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.
- d. Evaluasi
- Evaluasi atau yang lebih dikenal dengan istilah penilaian ialah suatu proses penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.
- Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

- 1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- 2) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- 3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
- 4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria

ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.

- 5) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

Penilaian dilakukan secara berkelanjutan guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik, baik sebagai efek langsung (*main effect*) maupun efek pengiring (*nurturant effect*) dari proses pembelajaran. Adapun instrumen yang digunakan dalam teknik penilaian pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas akselerasi MTsN Ponorogo ialah ;

Teknik	Bentuk Instrumen
Tes tertulis	Tes pilihan :Pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dll. Tesaisian : isian singkat dan uraian
Observasi (pengamatan)	Lembar observasi ( lembar pengamatan )
Penugasan Individu atau kelompok	Pekerjaan rumah Proyek
Tes Lisan	Daftar pertanyaan

#### **Kendala Implementasi Kurikulum Diferensiasi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan MTsN Ponorogo.**

Sebagaimana penjelasan dan pemahaman mengenai kurikulum Diferensiasi yang dijelaskan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1976 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Akselerasi Belajar

Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa Pada Madrasah yang menyebutkan bahwa Kurikulum Program Akselerasi adalah kurikulum nasional dan muatan lokal yang dimodifikasi dengan penekanan materi esensial dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan mewartakan integritas antara pengembangan

spiritual, logika, etika, dan estetika, serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir logistik, kreatif, sistematis, linier, dan konvergen, untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa mendatang.

Pendapat beberapa pakar kurikulum diferensiasi yang menjelaskan bahwa kurikulum diferensiasi adalah kurikulum nasional dan muatan lokal yang telah dimodifikasi dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : (1) modifikasi alokasi waktu, yang disesuaikan dengan kecepatan belajar bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; (2) modifikasi isi/materi, dipilih yang esensial; (3) modifikasi sarana-prasarana, yang disesuaikan dengan karakteristik siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yakni senang menemukan sendiri pengetahuan baru; (4) modifikasi lingkungan belajar yang memungkinkan siswa memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat memenuhi kehausan akan pengetahuan; (5) modifikasi pengelolaan kelas, yang memungkinkan siswa dapat bekerja di kelas, baik secara mandiri, berpasangan, maupun berkelompok.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum diferensiasi adalah kurikulum yang memodifikasi semua aspek kurikulum untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik dengan kecerdasan istimewa, oleh sebab itu apabila tidak diperhatikan dengan seksama maka akan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kendala dalam hasil belajar yang maksimal oleh peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa tersebut.

Hasil pengamatan yang diperkuat dari wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan kendala yang dihadapi peserta didik dan guru mata pelajaran pendidikan

kewarganegaraan MTsN Ponorogo. ada pada materi yang disampaikan oleh guru terlalu banyak, ini dikarenakan materi yang disampaikan oleh guru tidak terdapat modifikasi untuk memilih materi esensial. Sebagaimana dapat kita ketahui dari materi yang disajikan yang dirancang Guru Pendidikan Kewarganegaraan MTsN Ponorogo memang tidak terdapat modifikasi pada materi yang seharusnya dipilih atau dimodifikasi.

Kendala ini memang diakui oleh guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan MTsN Ponorogo yang menyatakan bahwa ada beberapa hal alasan untuk tidak melakukan modifikasi materi secara esensial sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Sulistyarningsih S.Pd ada beberapa pertimbangan untuk tidak melakukan modifikasi materi secara esensial dikarenakan ada kekhawatiran apabila dilakukan modifikasi maka yang terjadi kita hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, sedangkan PKn itu kan juga mengajar pendidikan karakter.

Beberapa data dan informasi yang peneliti dapatkan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam mengimplementasikan kurikulum diferensiasi tersebut terdapat pada tidak adanya modifikasi pemadatan materi yang esensial dan apabila dilakukan modifikasi pemadatan materi yang esensial maka risikonya adalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya ada *Transfer Of Knowledge* sekedar memberikan pengetahuan saja, sedangkan untuk menanamkan nilai – nilai dan norma – norma yang istilahnya dikenal dengan sebutan *Transfer of Value* dalam membentuk karakter sulit untuk dicapai oleh peserta didik.



### **Upaya Dalam mengatasi kendala Kurikulum Diferensiasi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Berangkat dari penjelasan di atas mengenai kendala implementasi kurikulum diferensiasi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kelas akselrasi peserta didik cerdas inklusif MTsN Ponorogo yaitu mengenai tidak adanya modifikasi pemadatan materi yang esensial dan apabila dilakukan modifikasi pemadatan materi yang esensial maka risikonya adalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya ada *Transfer Of Knowledge* atau hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, sedangkan untuk menanamkan nilai – nilai dan norma – norma yang terdapat pada materi pendidikan kewarganegaraan atau istilahnya *Transfer of Value* sulit untuk dicapai oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan untuk mencapai sebuah pembelajaran yang mengajarkan nilai – nilai norma yang seharusnya dimiliki peserta didik membutuhkan pengalaman belajar yang cukup panjang waktunya untuk memberikan pemaknaan dalam proses pembelajaran tersebut.

Maka untuk mengatasi kendala tersebut sebagai peneliti ingin memberikan sumbangsih pemikiran yaitu dalam mengimplentasikan kurikulum diferensiasi sejatinya harus terdapat pemadatan materi dikarenakan kebutuhan peserta didik yang mempunyai kecerdasan istimewa sangatlah berbeda dengan siswa regular, sebab ciri khas peserta didik yang mempunyai kecerdasan istimewa tersebut selalu ingin mengetahui hal – hal baru yang menantang pengetahuannya, sebagaimana pendapat beberapa pakar mengenai peserta didik tersebut.

Peneliti menawarkan solusi pemadatan materi dengan cara menentukan materi

esensial yang tidak membuang materi yang dianggap tidak perlu, tetapi menggabungkan materi yang dianggap mempunyai kesamaan dan cara berfikir yang urut – urut logis.

Adapun mengenai permasalahan yang timbul akibat adanya modifikasi pemadatan materi yang esensial yaitu mengenai hanya terdapat adanya *Transfer Of Knowledge* atau hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, sedangkan untuk menanamkan nilai – nilai dan norma – norma yang berlaku di Indonesia atau istilahnya *Transfer of Value* sulit untuk dicapai oleh peserta didik. Maka solusi untuk kendala yang timbul ini tidak bisa hanya diwajibkan pada mata pelajarannya Pendidikan Kewarganegaraan saja, sebab kurikulum sekolah yang memaksa adanya pemadatan alokasi waktu pelajaran ini yang sebenarnya menjadi berat untuk dibebankan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh sebab itu, sekolah yang mempunyai andil besar untuk mengatasi kendala ini, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan – kegiatan sekolah yang bersifat pendidikan karakter semisal, outbond, Pramuka, pondok romadhon, dan kegiatan – kegiatan extra yang lain.

Suatu keuntungan besar dimiliki MTsN Ponorogo karena untuk mengatasi kendala ini seharusnya tidak sulit, sebab ciri khas sekolah ini adalah sekolah agama sehingga pendidikan karakter bercirikan islam nasionalis sudah sangat cukup membekali siswa dalam menanamkan nilai nilai kearah karakter yang diharapkan sebagaimana tugas yang seharusnya ditbebaskan pada pembelajaran di Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa mengenai Implementasi Kurikulum Diferensiasi Pendidikan

Kewarganegaraan pada kelas akselerasi peserta didik cerdas inklusif MTsN Ponorogo maka dapat diambil simpulan bahwa. Proses Implementasi kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas Akselerasi PDCI MTsN Ponorogo Belum Terdapat Kesesuaian dengan maksud dari pada Kurikulum Diferensiasi sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1976 Tahun 2014.

Proses Implementasi kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas Akselerasi PDCI MTsN Ponorogo mendapatkan beberapa kendala didalamnya yaitu disebabkan oleh tidak adanya pemadatan materi yang esensial sehingga membuat proses pembelajaran menjadi tidak menantang dan apabila terdapat pemadatan materi maka risikonya adalah hanya terdapat *transfer of knowledge* sehingga tidak ada *transfer of value* dalam pembelajaran tersebut, Hal ini dipicu karena keadaan siswa yang cenderung berfikir cepat tetapi gampang bosan kalau materi yang disampaikan tidak membuat siswa berfikir lebih jauh.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka seharusnya didalam membuat kurikulum diferensiasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut harus ada terdapat pemadatan materi yang esensial dan efektif sehingga materi yang akan disampaikan memicu siswa untuk tertantang mempelajari sebuah materi yang diajarkan, sedangkan resiko terhadap adanya pemadatan materi tersebut sekolah seharusnya bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan yang timbul karena kebijakannya tersebut. Oleh sebab itu maka sekolah harus membuat beberapa kegiatan yang terencana dengan baik untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, semisal dengan

mengadakan kegiatan outbond, pramuka, dan kegiatan yang mempunyai karakter lainya.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Madrasah dalam proses pengembangan kurikulum sebaiknya sering mengadakan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan untuk guru-guru PKn sebagai pribadi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kemajuan siswanya agar mampu mengembangkan silabus dan RPP secara mandiri yang sesuai dengan kompetensi mengajarnya.

Madrasah harus lebih memperhatikan proses kegiatan pembelajaran yang terorganisir dan saling berkesinambungan dengan semua mata pelajaran agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar yang maksimal. Madrasah harus membuat beberapa kegiatan yang terancang dengan baik untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, semisal dengan mengadakan kegiatan outbond, pramuka, dan kegiatan yang mempunyai karakter lainya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomer 1976 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Akselerasi Belajar Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasasn Dan/Atau Bakat Istimewa Bagi Madrasah
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 *Tentang Standart Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- Salim, Agus. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Bandung: Alfabeta
- Syaodih, Sukmadinata. 2009. *Metode penelitian pendidikan.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **PENERAPAN MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS“5 KARAKTER WAJIB TARUNA” SMK Negeri 13 MALANG**

**Heka Fitria Fujiyama, Rohmad Widodo, Trisakti Handayani**  
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia  
Email: [heka\\_fitria@gmail.com](mailto:heka_fitria@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pendidikan karakter muncul akhir-akhir ini, setelah terjadi degradasi moral yang melanda bangsa Indonesia. Pendidikan karakter pada prinsipnya adalah sebagai upaya menumbuhkan kepekaan dan tanggung jawab sosial, membangun kecerdasan emosional, dan mewujudkan peserta didik memiliki etika yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang, (2) kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, (3) solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dihadapi. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan-tahapan dalam analisis data dilakukan dengan cara: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmasi. Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil penelitian yaitu: (1) Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dari taat, jujur, disiplin, bekerjasama dan berprestasi. 5 karakter diterapkan dalam semua aspek kehidupan di lingkungan sekolah. (2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna diantaranya; belum ada kesadaran penuh dalam diri taruna sehingga kecenderungan sulit menerapkan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, masih adanya guru yang tidak mendukung, kurang pengawasan orang tua dirumah. (3) Solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna yakni memberikan pencegahan secara preventif melalui buku saku dan al-kays, melakukan koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua, melakukan konsultasi kepada taruna-taruni oleh staff batalyon, kontrol sikap taruna-taruni melalui bimbingan konseling.

**Kata Kunci** : “5 karakter wajib taruna”

### **ABSTRACT**

Nowadays, character building in education is commonly spoken, let alone after degradation of the youth moral in Indonesia. Principally, character building is an attempt to grow the sensitivity and social responsibility, to build the emotional intelligence, and to create students with high attitude. This research is aimed to describe: (1) the implementation of character building in education based on the 5 obligatory characters of school with military based in SMKN 13 Malang, (2) the problems that are faced in implementing the character building in education based on the 5 obligatory characters of school with military based, (3) the ways to cope with the problems in implementing the character building in education based on the 5 obligatory characters of school military based. This research employed the qualitative research that produces the descriptive data which are written or oral data, and the attitude of the students. The data collection techniques that were used: interview, observation, and documentation. The steps in analyzing the data were: collecting the data, reduction data, findings, and drawing the

conclusion. The validity test were done by using credibility, transferable, dependable, and confirmable techniques. Based on the analysis, it can be drawn several results as follows: (1) 5 obligatory character of students was implemented in daily activities at school: obedient, honest, discipline, cooperate, and be an achiever. All students in education based military were taught about 5 obligatory characters which were implemented in every aspect at school. (2) The problems which were faced during the character building implementation were: there was no high awareness of students in implementing 5 obligatory characters. There was lack of support from teachers and parents at house. (3) The ways to cope with the problems which were implemented: gave the preventive ways through pocket book called al-kays, built cooperation between school side and parents, did consultation between students and staff battalion, attitude control of students through counseling advisory.

**Key words:** *“5 obligatory characters of school with military based”*

## PENDAHULUAN

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan harus dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan efisien sebagai pendukung utama dalam membangun karakter bangsa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada pasal 3, yang menyebutkan : “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dalam Undang-Undang tersebut dapat dipahami tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional pada intinya ialah suatu bentuk bimbingan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran peserta didik untuk menjadikan hidupnya terarah dengan baik dan mampu menjadi kepribadian yang berkarakter kuat tertanam pada pribadinya dalam kehidupan sehari-hari. pendidikan

karakter muncul kepermukaan akhir-akhir ini, setelah terjadi degradasi moral yang melanda bangsa Indonesia. Menurut Fadillah & Khorida (2013:16), pendidikan karakter, terambil dari dua suku kata yang berbeda, yaitu pendidikan dan karakter. Kedua kata ini mengandung makna sendiri-sendiri.

Karakter memberikan gambaran tentang suatu bangsa, sebagai penanda, penciri sekaligus pembeda suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Karakter memberikan arahan tentang bagaimana bangsa menapaki dan melewati suatu jaman dan mengantarkanya pada suatu derajat tertentu. Karakter suatu bangsa ditentukan dari karakter setiap individunya hal itu menandakan bahwa karakter memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa. Terbentuknya karakter yang kuat dan kokoh menjadi hal yang utama untuk dimiliki peserta didik dalam menghadapi tantangan hidup di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Pendidikan karakter diperoleh sejak pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi sehingga dapat mencetak peserta didik menjadi pribadi yang unggul guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan. Dirjen Dikti dalam Arifin M, & Barnawi

(2012:24), pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, mewujudkan, dan menebarkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Thomas Lichona dalam Muslich (2011:35) Akhir-akhir ini muncul fenomena-fenomena di kalangan pendidikan yang sudah cukup memprihatinkan. Berbagai tindakan negatif banyak terjadi di kalangan pelajar. Tindakan negatif yang dimaksud seperti (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, seperti tawuran antar pelajar, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk, (3) meningkatnya perilaku yang merusak diri, seperti narkoba, alkohol dan seks bebas, (4) semakin hilangnya pedoman moral yang baik, (5) semakin rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru, (5) Rendahnya rasa tanggung jawab pada setiap individu dan warga negara, (6) rendahnya sifat ketidak jujuran, (7) Adanya rasa curiga dan kebencian antar teman dll, Thomas Lichona dalam Muslich (2011:35). Melihat realitas tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa generasi bangsa kita telah mengalami degradasi peran dan fungsinya. Hal ini terbukti dengan adanya peristiwa tawuran antar pelajar hingga menelan korban jiwa, bahkan penggunaan obat-obatan terlarang marak dikalangan pelajar, perilaku seks bebas dan pemerkosaan pun sering terjadi pada pelajar sekolah. Hal-hal tersebut bila dibirkan terus menerus akan menjadi budaya negatif dan merusak pola pikir generasi muda. Seorang pelajar adalah generasi yang disiapkan untuk menjadi pembaharu untuk membawa bangsa ke

arah yang lebih baik. Lalu bagaimana seorang pelajar menjalankan fungsi dan perannya sebagai generasi bangsa, apabila masih banyak di temukan budaya-budaya negatif yang dilakukan oleh generasi muda. Budaya-budaya negatif tersebut menandakan bahwa telah terjadi krisis moral di dalam sistem pendidikan saat ini.

Pendidikan karakter disini diharap mampu menjadi alternatif dan solusi untuk krisis moral dan etika yang saat ini terjadi. Pendidikan karakter seharusnya mulai di tanamkan pada peserta didik agar tidak terjebak pada budaya negatif. Berkaitan dengan itu setiap institusi pendidikan terutama sekolah harus menekankan dan menerapkan pendidikan karakter khususnya kepada pribadi peserta didik, karena hal itu sebagai upaya dan jawaban dari permasalahan terkait krisis moral yang saat ini terjadi. Maka perlu dilakukan berbagai program terobosan yang terus menerus untuk mensosialisasikan pendidikan karakter, sehingga langkah-langkah yang diharapkan dapat diterapkan dengan baik. Program terobosan yang dimaksud adalah program pendidikan karakter yang dirancang sekolah untuk diterapkan kepada peserta didik selama berada dilingkungan sekolah, hal ini dilakukan dari proses kegiatan belajar mengajar (KBM) maupun kegiatan-kegiatan di luar kelas yang relevan untuk pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter, sehingga nilai-nilai yang diterapkan dalam pendidikan karakter bermanfaat bagi peserta didik.

Pendidikan Karakter dapat diterapkan di lingkungan sekolah sebab sekolah merupakan salah satu sarana bagi pendidikan, yang mentransformasikan ilmu dari guru kepada peserta didik. Pembelajaran di sekolah bertujuan untuk menangkis pengaruh budaya-budaya negatif, menanamkan pemahaman dan

penghayatan nilai kemanusiaan dan ketuhanan untuk menjadikan diri setiap peserta didik menjadi manusia yang berkarakter kuat dan berbudi pekerti luhur.

Studi pendahuluan dan fakta di lapangan SMK Negeri 13 Malang cukup antusias dalam proses pendidikan karakter, sekolah dengan basis taruna ini memiliki program terobosan untuk mendidik taruna dan taruni menjadi pribadi yang kuat dalam sikap maupun perilakunya. Hal ini terlihat jelas dalam program terobosan sekolah yakni pendidikan karakter melalui 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang. 5 karakter wajib taruna antara lain : taat, jujur, disiplin, bekerjasama dan berprestasi. 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang dibuat dari 5 pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh taruna dan taruni SMK Negeri 13 Malang, 5 pantangan yang tidak boleh dilakukan antara lain : menolak tugas, pantang berbohong, pantang terlambat, pantang konflik dan pantang menyerah. Berdasarkan hal tersebut tampak secara jelas bahwa SMK Negeri 13 Malang merupakan tempat bagi generasi muda untuk menjadi manusia terbaik. Selain itu Visi SMK Negeri 13 Malang unggul spiritual, IPTEK, berbudayanusantara, danberwawasan global. Dapat dilihat dari visi sekolah tersebut bahwa taruna-taruni, guru dan karyawan dibekali dengan spiritual budaya nusantara yang kuat, serta berwawasan global. SMK Negeri 13 Malang juga menerapkan pendidikan ketrunaan yang wajib diikuti oleh setiap taruna dan taruni, kegiatan wajib tersebut diterapkan sebagai salah satu sarana dalam mendidik taruna dan taruni yang disiplin, berjiwa kesatria serta bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan

sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Tingkat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh taruna dan taruni di SMK Negeri 13 Malang yang cukup sering terjadi adalah terlambat, lupa membawa buku saku, dan tidak memakai atribut lengkap dalam berseragam. Setiap pelanggaran maupun prestasi yang dilakukan oleh taruna dan taruni terekam dalam buku saku, buku saku adalah buku yang berfungsi untuk mencatat prestasi dan pelanggaran disiplin taruna, buku tersebut memberikan point pelanggaran bagi taruna yang melanggar dan juga memberikan point prestasi bagi yang berprestasi, setiap point dalam pelanggaran maupun prestasi berbeda dan sudah tercatat masing-masing pasal pada setiap buku saku. Bagi taruna dan taruni yang melanggar peraturan, sekolah memberikan sanksi yang mendidik misalnya bagi taruna atau taruni yang terlambat mereka diwajibkan untuk membawa bunga, dan mendapat catatan pelanggaran pada buku saku, sebaliknya bagi taruna dan taruni yang mendapatkan prestasi juga mendapat point prestasi sesuai dengan tingkat prestasi yang didapatkan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran sekolah untuk memberikan pengajaran bagi taruna dan taruni bahwa setiap perbuatan baik itu positif maupun negatif akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan apa yang dilakukannya, sehingga sikap disiplin, tanggung jawab, dan taat akan tertanam pada diri setiap taruna dan taruni sebagai bentuk penanaman nilai-nilai dari pendidikan karakter SMK Negeri 13 Malang.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis 5 Karakter Wajib Taruna SMK Negeri 13 Malang”.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan induktif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Bogdan & Tylor dalam zuriah, 2009:92).

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan desain penelitian kebijakan oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan datanya dikumpulkan berupa tulisan, kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Bogdan & Tylor dalam zuriah, 2009:92). Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala-gejala melalui pengumpulan data dari lapangan sebagai instrumen penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan antara lain : 1). Prosedur penelitian kualitatif lebih mudah; 2). Bisa lebih dekat dengan data penelitian ketika langsung terjun kelapangan, jenis dan pendekatan kualitatif ini untuk mencari data mengenai Penerapan Model Pendidikan Karakter Berbasis 5 Karakter SMK Negeri 13 Malang.

Sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Sugiono (2010:306), menyatakan penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulana data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 pasal 3 Tahun 2003 bahwa tujuan dari sistem pendidikan nasional pada intinya ialah suatu bentuk bimbingan dan pengembangan potensi peserta didik supaya terarah dan mampu menjadi pribadi yang berkarakter kuat. SMK Negeri 13 Malang merupakan salah satu sekolah berbasis taruna yang berusaha memberikan pendidikan karakter melalui pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang. Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut:

### **Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis 5 Karakter Wajib Taruna SMK Negeri 13 Malang**

Setiap lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah, pasti akan memberikan pengajaran yang positif terhadap peserta didiknya. Salah satu hal yang positif yang diberikan sekolah terhadap peserta didiknya adalah pendidikan karakter. Setiap sekolah pasti menerapkan pendidikan karakter kepada peserta didiknya sebagai upaya dan bentuk bimbingan dalam melahirkan generasi-generasi muda yang berkarakter kuat dalam sikap maupun perilakunya. Oleh sebab itu, peran sekolah sangat penting dalam hal menyisipkan pendidikan karakter disetiap pembelajaran. Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna begitu penting sebab dapat menjadikan taruna-taruni SMK Negeri 13 Malang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat. SMK Negeri 13 Malang merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang diterapkan di SMK Negeri 13 Malang yakni pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna.

Pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna merupakan



pendidikan karakter yang mengacu pada 5 nilai yaitu 1. taat 2. jujur 3. disiplin 4. bekerjasama dan 5. Berprestasi, dari kelima nilai itu diterapkan dan diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi lapangan, terkait penerapan pendidikan karakter berbasis 5 wajib taruna dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Apel pagi

Kegiatan awal pembelajaran dimulai dengan apel pagi bagi seluruh warga sekolah. Apel pagi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari, dimulai pukul 06.30 WIB. Di dalam kegiatan apel pagi masing-masing ketua kelas melakukan laporan terlebih dahulu kepada pembina apel untuk memberi laporan berapa jumlah anggota kelas yang tidak hadir, bagi taruna-taruni yang datang terlambat dan tidak mengikuti apel pagi akan mendapatkan sanksi berupa point pelanggaran pada buku saku, dan membawa bunga sebagai sanksi dari pelanggaran tersebut. Kegiatan apel pagi dilaksanakan sebagai bentuk dari penerapan karakter pertama yakni "taat" diharapkan semua warga sekolah termasuk juga taruna-taruni selalu taat untuk mengikuti kegiatan apel. Ketika karakter yang pertama "taat" dijalankan otomatis mereka disiplin yakni juga menerapkan karakter yang ketiga.

2) Imtaq, Tutor sebaya, Hatam Al-Qur'an bagi muslim dan Kebaktian bagi taruna non muslim

Kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa salah satunya diterapkan melalui Imtaq, Tutor sebaya dan Hatam Al-Qur'an, ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk membentuk keimanan bagi seluruh taruna-taruni agar membiasakan diri untuk membaca Asmaul Husna dan Al-Qur'an. Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai

dari Imtaq dilaksanakan setiap pagi sebelum proses belajar mengajar dikelas, tutor sebaya dilakukan setiap hari jumat pagi bagi taruna yang sudah lancar membaca diupayakan untuk memberi pengajaran bagi taruna yang belum lancar membaca Al-qur'an, dari imtaq dan tutor sebaya dilanjutkan dengan hatam Al-Qur'an dalam waktu 1 bulan sekali. Selanjutnya taruna yang beragama nasrani melakukan kajian kitab dibawah bimbingan guru yang seiman.

Imtaq bagi yang beragama muslim dan kajian kitab umat nasrani diprogramkan untuk diterapkan setiap hari. hal tersebut untuk menerapkan karakter yang pertama yakni "taat" taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kegiatan keagamaan maka taruna akan terbiasa untuk beribadah kepada Tuhan-NYA sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

3) Pemeriksaan seragam, atribut dan buku saku oleh staff batalyon

Pemeriksaan seragam, atribut dan buku saku dilakukan oleh staff batalyon, staff batalyon adalah taruna yang terpilih dan diberi tugas sebagai kendali mutu disiplin taruna. Pengecekan tersebut dilakukan untuk menghimbau agar setiap taruna SMK Negeri 13 Malang berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan buku saku merupakan buku yang harus dibawa setiap saat selama di lingkungan sekolah, karena berfungsi untuk mencatat prestasi dan pelanggaran disiplin taruna.

Memakai seragam lengkap, atribut dan membawa buku saku merupakan bentuk penanaman kataatan dan kedisiplinan yang ditanamkan oleh sekolah kepada taruna. Kegiatan tersebut dilakukan selain sebagai bentuk upaya pembiasaan juga sebagai penerapan karakter pertama "taat" untuk taat kepada peraturan sekolah dan penerapan karakter yang ketiga yakni "disiplin" disiplin terhadap semua bentuk peraturan sekolah.

#### 4) Sholat Dhuha dan Shlat Dzuhur Berjama'ah

Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya dilakukan di Imtaq saja tetapi juga dilaksanakan pada saat istirahat pertama yaitu dengan melaksanakan shalat dhuha berjamaah dan pada saat istirahat kedua shalat dzuhur berjamaah. Penerapan kegiatan tersebut diberi buku panduan (*Al-kays*) untuk mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran dengan meminta tanda tangan guru pembimbing atau Kepala Sekolah setelah melaksanakan ibadah sholat dhuha dan dzuhur.

Shalat dhuha dan dzuhur berjamaah sebagai bentuk kegiatan wajib agar taruna membiasakan diri untuk selalu melaksanakan ibadah, oleh sebab itu shalat dhuha dan dzuhur berjamaah menjadi kewajiban dan kegiatan dari penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna yang merupakan karakter pertama yakni "taat" taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### 5) Memberikan Penghormatan kepada guru dan atasan (senior)

Taruna SMK Negeri 13 Malang memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan, dengan memberikan penghormatan kepada Kepala sekolah, Pembina, Pendidik (guru), tamu dan juga senior. Senior adalah salah satu yang juga diwajibkan untuk diberikan penghormatan sebab SMK Negeri 13 Malang menganut asas senioritas. Penghormatan dilakukan dikelas sebelum pembelajaran dimulai dan diluar kelas ketika berpapasan, melakukan penghormatan hanya pada saat memakai pakaian dinas.

Penghormatan yang dilakukan sebagai bentuk pembiasaan taruna-taruna untuk memiliki karakter taruna sejati, penghormatan tersebut juga sebagai penerapan karakter pertama "taat" untuk taat kepada guru, senior dan semua orang yang wajib untuk dihormati.

#### 6) Kegiatan Ketrunaan

Ketrunaan adalah pendidikan dan Latihan Dasar Taruna (LATDASTAR) yang wajib diikuti bagi semua taruna-taruni SMK Negeri 13 Malang pada setiap rabu dan kamis setelah jam pembelajaran selesai. Latihan Dasar tersebut dilakukan untuk melatih karakter setiap anak agar menjadi taruna yang disiplin dan mempunyai bejiwa kesatria, latihan dasar taruna ini dibimbing langsung oleh pihak LANAL dalam rangka memberi materi ketrunaan.

Kegiatan ketrunaan yang diterapkan merupakan karakter ketiga yakni "disiplin", kegiatan tersebut sebagai upaya pembentukan dan pembiasaan disiplin sikap, mental dan perilaku agar menjadi taruna yang tangguh dan berjiwa kesatria.

#### 7) Sholat jum'at dan Kajian keputrian

Sholat jum'at adalah salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh taruna, dan keputrian dilakukan oleh taruni. Kegiatan ini dilakukan untuk memperdalam Ketaqwaan dan Keimanan para taruna SMK Negeri 13 Malang untuk selalu beribadah kepada Allah SWT.

#### 8) Upacara Bendera

Bentuk bimbingan yang diberikan Sekolah untuk membentuk sikap mencintai dan mengormati kepada Negara Indonesia salah satunya dengan melakukan upacara bendera. Upacara bendera dilakukan rutin setiap hari senin dan pada hari-hari besar bersejarah seperti hari kesaktian pancasila, hari pahlawan dll, dengan pelaksanaan tersebut diharapkan taruna-taruni akan menambah rasa nasionalisme terhadap Negara Indonesia.

Pelaksanaan upacara merupakan bentuk penerapan karakter pertama yakni "Taah" taat kepada negara Indonesia dengan melaksanakan upacara bendera sekolah menanamkan bentuk ketaatan kepada negara sehingga taruna akan mengormati dan mencintai Negara Indonesia.

- 9) Setiap sudut sekolah dipasang dengan kata-kata Mutiara, Semboyan dan Himbauan

Sekolah SMK Negeri 13 Malang mengupayakan taruna selalu memiliki karakter yang baik, upaya yang dilakukan sekolah selain melalui kegiatan nyata juga dilakukan melalui himbauan, semboyan maupun kata-kata mutiara hal ini dilakukan agar taruna-taruni dapat menghayati setiap kata-kata tersebut agar dapat menyatu dengan dirinya.

- 10) Merayakan Hari Besar Keagamaan

Hari keagamaan merupakan suatu wujud ucapan trimakasih yang diajarkan Sekolah kepada taruna untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekolah mengajarkan dapat merayakan hari besar tersebut bersama-sama. Salah satu perayaan yang rutin dilakukan di sekolah adalah merayakan Hari Raya Idul Adha dalam kegiatan ini setiap kelas diwajibkan untuk memberikan sedikit rezekinya untuk dibagikan kepada sesama.

Perayaan hari raya Idul Adha, kegiatan perayaan tidak dilakukan dengan penyembelihan hewan qurban saja melainkan juga dengan kegiatan istiqosah bersama yang dilanjutkan halal bihalal seperti yang ada pada gambar diatas. Hal tersebut dilakukan untuk memupuk karakter yang ketiga yakni “bekerjasama” agar seluruh taruna beserta guru serta karyawan SMK Negeri 13 Malang dapat saling bersilahturahmi dengan baik, menjalin hubungan baik sehingga kerjasama juga bisa dilakukan dengan baik.

- 11) Laporan kepada guru sebelum dimulai pembelajaran

Salah satu standar taruna adalah melakukan laporan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) hal ini dilakukan oleh taruna sebagai bentuk dari seorang taruna yang menghormati

setiap guru yang ada disekolah. Laporan dilakukan dengan hormat terlebih dahulu kemudian memberitahukan berapa jumlah siswa yang hadir dan berapa siswa yang tidak hadir dengan laporan berarti seluruh kelas sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk penanaman disiplin dan ketaatan kepada pendidik, yang wajib dan selalu dilakukan oleh taruna.

- 12) Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMK Negeri 13 Malang ada enam disesuaikan dengan minat dan jumlah siswa, ekstrakurikuler wajibnya adalah pramuka, pramuka dilakukan pada hari jum'at, dan kegiatan lainnya dilakukan pada hari sabtu setelah jam pembelajaran dikelas berakhir kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi: karate, tari, futsal, PMR dan BDI.

Kegiatan ekstra dilakukan sebagai pembinaan agar taruna dapat berprestasi tidak hanya akademik saja melainkan non akademik. Berprestasi adalah karakter kelima yang terus dibimbing selain melalui pembelajaran hal lainnya juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler.

- 13) Masuk kelas sesuai dengan standar Taruna

Untuk menumbuhkan jiwa korps dan kebersamaan di lingkungan kelas salah satunya dilakukan dengan cara baris-berbaris sesuai dengan standart taruna. Baris-berbaris yang dilakukan oleh taruna SMK Negeri 13 Malang dilakukan dengan perhitungan atribut dari atas hingga bawah. Taruna tidak dilakukan hanya pada saat kegiatan ketarunaan saja melainkan juga dipupuk dalam kegiatan sehari-hari termasuk pada saat taruna akan memasuki kelas.

#### 14) Kegiatan Pembelajaran berbasis *lesson study*

Dalam upaya peningkatan proses pembelajaran dan keprofesionalan guru, sekolah mengembangkan kegiatan *lesson study* berbasis sekolah yang langsung dimonitoring dan dievaluasi secara berkala oleh kepala sekolah. Kegiatan *lesson study* yang terdiri dari 3 tahapan *do*, *si* dan *reveleksi* telah terbukti membuat guru saling belajar dan tidak terikat dengan senioritas. Kerjasama adalah wujud dari penerapan karakter wajib taruna ke 4. *Lesson study* dilakukan untuk membangun kerjasama dan saling menghargai antara guru sebagai proses monitoring profesional guru, sehingga siswa juga ikut termotifasi untuk menjalin kerjasama dan membangun hubungan yang selaras antara taruna SMK Negeri 13 Malang. Pembelajaran berbasis *lesson study* dilakukan secara berkala 1 minggu sekali.

Kegiatan *lesson study* yang dilakukan terbukti selain sebagai peningkatan proses kegiatan belajar mengajar juga dapat membangun hubungan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, bapak ibu guru dan juga taruna SMK Negeri 13 Malang.

#### 15) Kegiatan LDK

Latihan dasar kepemimpinan adalah kegiatan yang diperuntukkan untuk staff batalyon, staff batalyon adalah taruna yang dipilih dan diberi tugas sebagai kendali mutu disiplin taruna. Kegiatan LDK berfungsi untuk memberikan pengetahuan organisasi dan membekali jiwa kepemimpinan bagi setiap taruna yang terpilih. Kegiatan LDK dilakukan sesuai dengan standart taruna yaitu mendisiplinkan seluruh staff batalyon agar menjadi melaksanakan tugas secara adil, tanggung jawab dan berdedikasi tinggi mengingat staff batalyon adalah organisasi tertinggi di SMK Negeri 13 Malang.

Kegiatan LDK wajib diikuti oleh staff batlyon sebelum masa jabatan sebab hal itu menjadi salah satu pembelajaran, dan proses pelatihan tanggung jawab agar nantinya mampu mengemban tugas dengan baik.

#### 16) Kegiatan Aksi hijau

Kegiatan aksi hijau dilakukan untuk menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan sekolah sebab kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Salah satu kegiatan trobosan untuk menjaga kebersihan dan membiasakan warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan menerapkan kegiatan aksi hijau. Aksi hijau sendiri dilakukan dengan memilih member *go green school*, member diberi tugas untuk memantau kebersihan dan untuk menghimbau seluruh warga sekolah dari guru, taruna hingga karyawan untuk bergotong royong dalam kebersihan.

Kegiatan aksi hijau yang dilakukan selain untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah, kegiatan ini dirasa mampu memupuk karakter yang ke 4 yakni bekerjasama, dengan melaksanakan kegiatan kasi hijau secara teratur maka kerjasama antara seluruh warga sekolah kan terjalin dengan baik.

Nilai-nilai tersebut diharapkan untuk memberikan pedoman dalam pembinaan kepribadian taruna yang diterapkan diproses pembelajaran selama berada disekolah dan diaplikasikan dalam bentuk tingkah laku setiap hari yang akan dibawa sepanjang hidup.

Manfaat dari pendidikan karakter adalah membentuk dan membangun pola pikir, sikap dan perilaku untuk selalu bersikap dengan baik, baik kepada Tuhannya, sesama manusia dan lingkungannya. Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna

diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dari jam pembelajaran dimulai hingga berakhir hal tersebut wajib dilaksanakan dan melekat pada diri setiap taruna-taruni. 5 karakter wajib taruna tersebut masing-masing sebagai daya pendorong untuk melakukan sikap dan perbuatan yang baik sehingga menjadi suatu pembiasaan pada diri setiap taruna, dalam penerapannya diberi pencegahan yang sifatnya preventif.

*Reward* diberikan melalui point yang ditulis pada halaman catatan prestasi pada buku saku dan point tersebut disesuaikan dengan prestasi yang diraih.

Pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna harus menjadi satu kesatuan dalam diri taruna-taruni, bagi yang tidak melaksanakan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna akan diberikan sanksi, mulai sanksi ringan hingga berat.

Sanksi diberikan kepada taruna yang tidak memakai atribut lengkap atau seragam tidak sesuai akan mendapatkan sanksi berupa *pus up* dan *scot jump*, jenis pelanggaran tersebut kategori jenis pelanggaran ringan dengan point 1.

Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna diterapkan pada saat kegiatan pembelajaran dimulai hingga berakhir, penerapan dimulai dari kegiatan apel pagi hingga berakhirnya proses pembelajaran di sekolah. Taruna dibiasakan untuk dapat menerapkan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna dan apabila ada taruna yang tidak bisa menerapkan maka akan mendapatkan sanksi melalui buku saku. Taruna yang tidak melaksanakan dan membiasakan diri dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna akan mendapatkan sanksi melalui buku saku.

Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna adalah untuk mendisiplinkan seluruhnya, baik itu disiplin dalam hal spritual, sikap, maupun perbuatan, dengan membiasakan mendisiplinkan taruna setiap hari maka akan terbiasa dengan berbagai aplikasi dari penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna. Penerapan pendidikan karakter berbasis “5 karakter wajib taruna” adalah sebagai upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai positif yang penting dalam hidup seorang taruna-taruni. “5 karakter wajib taruna” tersebut untuk dapat diterapkan dan diaplikasikan di sekolah dan lingkungan masyarakat yang nantinya akan dibawa sepanjang hidup. Sehingga menjadikan taruna menjadi manusia yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan jadi diri taruna yang berkepribadian baik, baik pribadi terhadap Tuhan, lingkungan dan sesama manusia.

Penerapan pendidikan karakter berbasis “5 karakter wajib taruna” diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, dari taat, jujur, disiplin, bekerjasama dan berprestasi. 5 karakter tersebut diterapkan dalam semua aspek kehidupan di lingkungan sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang dimulai dari jam 06.30 WIB yaitu dari proses pembelajaran dimulai hingga berakhir jam 15.30 WIB, selama proses pembelajaran berlangsung 5 karakter wajib taruna menjadi 1 kesatuan pada diri setiap taruna. Untuk memberikan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kedisiplinan siswa dipantau dengan buku disiplin taruna (buku saku) dan *al kays* untuk mencatat ibadah taruna serta diberikannya sanksi ringan hingga berat selama penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna.

### **Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis 5 Karakter Wajib Taruna SMK Negeri 13 Malang**

Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang, tentunya sudah berjalan namun dalam perkembangannya tentu tidak lepas dari adanya kendala yang terjadi. Kendala yang dimaksud adalah faktor penghambat yang dapat menghambat jalannya program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter. Kendala tersebut adalah kecenderungan taruna menolak untuk diajak dalam menerapkan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna karena bagi mereka itu adalah sesuatu yang berat.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna diantaranya: 1) Belum adanya kesadaran, sehingga kecenderungan taruna sulit menerapkan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, 2) Masih adanya guru yang kurang mendukung, 3) Kurang pengawasan orang tua dirumah, sehingga hal-hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang.

### **Solusi yang dapat dilakukan dalam Penerapan Pendidikan Karakter berbasis 5 Karakter Wajib Taruna SMK Negeri 13 Malang**

Setiap kendala-kendala yang dihadapi tentunya perlu dicari jalan keluar yang terbaik. Begitu pula kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang, diantaranya dengan memberikan pembinaan kepada bapak/

ibu guru agar mereka dapat memberikan teladan karena penerapan pendidikan karakter sebenarnya adalah keteladanan, meskipun 5 karakter wajib taruna diucapkan setiap senin oleh anak-anak akan tetapi tanpa keteladanan bapak/ibu guru penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna tidak akan berkembang dengan baik, karena taruna-taruni mereka juga melihat model dan contoh.

Selain pembinaan kepada bapak/ibu guru, penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna juga perlu didukung oleh semua pihak, baik itu instansi yang ada disekolah, pihak orang tua, kemudian kesadaran diri taruna jadi pembinaan tidak hanya dilakukan kepada bapak/ibu guru saja tetapi, orang tua dan yang paling penting pembinaan terhadap taruna-taruni ketika mereka membaca 5 karakter wajib taruna otomatis mereka harus menerapkannya, sebab 5 karakter wajib taruna akan sulit untuk diterapkan tanpa dukungan dari semua pihak.

Penjelasan Waka Kurikulum solusi yang dapat diambil dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna yaitu melalui buku saku, dan hal lain tak kalah penting adalah kearah wali kelas, wali kelas diharap memahami karakter dan kondisi taruna serta melakukan sosialisasi dengan orang tua terkait 5 karakter wajib taruna dan meminta untuk bekerjasama mengawasi taruna-taruni selama berada dirumah. Solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, kedisiplinan taruna dipantau dengan buku disiplin taruna (buku saku), kegiatan ibadah dengan buku kontrol ibadah (*al-kays*).

Pencegahan melalui buku saku diberikan dengan cara memberikan *riwed* berupa pont prestasi sesuai dengan jenis prestasi yang didapat oleh taruna, sebaliknya bila mereka melakukan pelanggaran maka mereka juga akan mendapatkan sanksi berupa pint pelanggaran melalui buku saku dan sanksi-sanksi lain sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran selama proses penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna.

Apabila buku saku diberikan untuk pencegahan semua penerapan kegiatan-kegiatan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, buku *al-kays* diberikan hanya untuk penerapan dalam kegiatan keagamaan saja buku ini diisi saat taruna melakukan ibadah shalat dhuha dan dzuhur di sekolah dengan meminta tanda tangan guru pendamping atau kepala sekolah dan selama mereka dirumah ibadah mereka akan dikontrol orang tua dengan cara meminta tanda tangan orang tua.

2) Komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua dilakukan pertemuan selama 1 bulan sekali dengan melakukan istiqosah bersama.

Komunikasi antara pihak sekolah menjadi solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi, agenda tersebut harus rutin dilakukan sebab dengan melakukan komunikasi dan koordinasi maka orang tua akan membantu pengawasan taruna selama berada dirumah.

Komunikasi antara pihak orang tua dilakukan untuk menjalankan program-program sekolah, termasuk program penerapan pendidikan karakter berbasis “5 karakter wajib taruna”. Program tersebut dilaksanakan salah satunya dengan melakukan istiqosah bersama yang dilanjutkan evaluasi dari seluruh program

hal ini dilakukan agar ada koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua wali murid.

3) Melakukan konsultasi kepada taruna-taruni yang dilakukan oleh staff batalyon

Dilakukan pada saat di luar kelas ataupun konsultasi langsung ke kelas-kelas hal itu dilakukan untuk melakukan koordinasi antara staff batalyon dengan seluruh taruna serta mengetahui bagaimana kedisiplinan taruna-taruni selama proses penerapan pendidikan karakter berbasis “5 karakter wajib taruna”.

4) Kontrol sikap taruna melalui bimbingan konseling

Bimbingan konseling dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol sikap taruna, bimbingan konseling dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar dan dilakukan di luar jam pembelajaran. Bimbingan konseling perkelas dilakukan 1 minggu sekali sesuai jadwal pembelajaran dengan memberikan materi motivasi, sikap, ataupun perilaku apabila di luar jam belajar mengajar taruna bisa konsultasi langsung pada saat jam istirahat berlangsung. Kontrol dilakukan juga bagi taruna-taruni yang bermasalah untuk dibina dengan baik agar tidak mengulangi kesalahannya. Bimbingan konseling tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendalami dan mengerti sikap dan perilaku taruna.

## SIMPULAN

Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, dari taat, jujur, disiplin, bekerjasama dan berprestasi. 5 karakter tersebut diterapkan dalam semua aspek kehidupan di lingkungan sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang dimulai dari jam 06.30 WIB yaitu dari proses pembelajaran dimulai hingga berakhir jam

15.30 WIB, selama proses pembelajaran berlangsung 5 karakter wajib taruna menjadi 1 kesatuan pada diri setiap taruna. Untuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kedisiplinan taruna dipantau dengan buku disiplin taruna (buku saku) dan kegiatan ibadah melalui buku kontrol ibadah (*al-kays*) serta pemberian sanksi dari ringan hingga berat bagi yang tidak menerapkan. Pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna diterapkan dalam kegiatan-kegiatan dari: 1) Apel pagi; 2) Imtaq, Tutor sebaya, Hatam Al-Qur'an bagi muslim dan Kebaktian bagi taruna-taruni non muslim; 3) Pengecekan seragam, atribut dan buku saku oleh staff batalyon; 4) Sholat Dhuha dan Shalat Dzuhur Berjama'ah; 5) Memberikan Penghormatan kepada guru dan atasan (senior); 6) Kegiatan Ketarunaan; 7) Sholat jum'at dan Kajian keputrian; 8) Upacara Bendera; 9) Setiap sudut sekolah dipasang dengan kata-kata Mutiara, Semboyan dan Himbauan; 10) Merayakan Hari Besar Keagamaan; 11) Laporan kepada guru sebelum dimulai pembelajaran; 12) Kegiatan Ekstakurikuler; 13) Masuk kelas sesuai dengan standar Taruna; 14) Kegiatan Pembelajaran berbasis *lesson study*; 13) Kegiatan LDK; 15) Kegiatan aksi hijau.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, diantaranya: 1) Belum adanya kesadaran, sehingga kecenderungan taruna sulit menerapkan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, 2) Masih adanya guru yang kurang mendukung, 3) Kurang pengawasan orang tua dirumah, sehingga hal-hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang.

Solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang adalah sebagai berikut: 1) Memberikan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, kedisiplinan taruna dipantau dengan buku disiplin taruna (buku saku), kegiatan ibadah dengan buku kontrol ibadah (*al-kays*), 2) Komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua dilakukan pertemuan selama 1 bulan sekali dengan melakukan istiqosah bersama, 3) Melakukan konsultasi kesetiap kelas yang dilakukan oleh staff batalyon untuk mendisiplinkan taruna, 4) Kontrol sikap taruna melalui bimbingan konseling, 5) Seluruh elemen sekolah terutama taruna SMK Negeri 13 Malang dan guru ikut menegakkan 5 karakter wajib taruna. Dengan demikian kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna dapat teratasi.

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna yang telah diterapkan oleh sekolah harus terkonsep dengan baik, karena sekolah merupakan pendidikan formal sebagai wadah untuk memberikan pembinaan kualitas diri dan jati diri generasi penerus bangsa. Sekolah perlu memberikan layanan pendidikan dalam bidang pengajaran, pelatihan dan pembinaan sebagai upaya untuk menjadikan generasi-generasi muda menjadi manusia yang berkarakter kuat.

Terkait kendala yang terjadi sekolah perlu memberikan pemahaman terhadap penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna kepada taruna itu sendiri. Pendidikan karakter harus dikonsep



dan dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Komunikasi dan koordinasi harus intensif untuk membahas tentang kebijakan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna yang diterapkan oleh SMK Negeri 13 Malang, sehingga semua warga sekolah memahami, mengerti dan dapat mendukung penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna.

Solusi dalam mengatasi kendala penerapan pendidikan karakter berbasis “5 karakter wajib taruna” yaitu dengan menciptakan suasana kedisiplinan untuk seluruh warga sekolah agar konsep dan penerapan dapat berjalan beriringan sehingga hal tersebut menjadi budaya positif sekolah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barnawi, Arifin M. 2012. *Strategi & Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter*.Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Fadlillah M, Khorida Mualifatuff Lilif. 2013. *Pendidikan Karakter Usia Dini*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter : Menjawab tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada pasal 3
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metedologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori Aplikasi)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Zuriah, Nurul, dkk. 2011. *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Akademik, Reliqius, dan Manusiawi. (PKBB AREMA)*. Malang : UMM Press.

## **PERANAN GURU PKn DALAM PEMBENTUKAN KEDISIPLINAN SISWA DI MAN MALANG 1**

**Kurniati, Rohmad Widodo, Budiono**

FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: nia\_isjueb@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan komponen yang sangat penting dalam mengembangkan sikap disiplin siswa. Karena disekolah siswa dibelajarkan tentang tata tertib dan kedisiplinan, aturan atau tata tertib sekolah berfungsi supaya siswa menjadi disiplin. Secara sederhana disiplin dapat diartikan sebagai sikap patuh, tata dan tertib terhadap peraturan yang berlaku disekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang membahas tentang peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa. Peran disiplin memang sangat penting bagi setiap individu, apalagi bagi peserta didik. Karena sikap disiplin yang muncul dari kesadaran diri seorang anak akan mengantarkan kepada kesuksesan belajar dan tentunya sikap disiplin itu didukung oleh kesadaran mentaati aturan, norma-norma dan tata tertib yang berlaku agar siswa menjadi individu yang tertib, teratur dan disiplin dalam berbagai hal. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa, (2) Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa, (3) Mendeskripsikan solusi yang dilakukan oleh Guru PKn dalam mengatasi pelanggaran kedisiplinan siswa. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu: (1) Guru PKn MAN Malang 1 telah membina kedisiplinan siswa dengan baik, (2) Kendala dari pelaksanaan disiplin sekolah kurang disadari oleh siswa dan cenderung melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan kurang adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa terhadap masalah kedisiplinan siswa tetapi hanya sebagian dari guru-guru saja. (3) Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kedisiplinan siswa, Guru PKn tetap melakukan pengawasan dan selalu mencaritahu permasalahan yang ada pada diri peserta didik dan tentunya pihak sekolah juga serta guru-guru dan karyawan yang ada di MAN Malang 1 berupaya agar saling kerjasama dalam membina kedisiplinan siswa. Oleh karena itu, tidak hanya petugas tatib saja yang membina kedisiplinan siswa tetapi semua civitas akademik yang ada di MAN Malang 1 harus menyadarinya serta ikut bertanggung jawab yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Maka dari itu pihak sekolah harus lebih mengefektifkan peraturan tata tertib lebih baik lagi dengan memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran agar siswa tidak melanggar peraturan tata-tertib sekolah.

**Kata kunci** : Guru, Siswa dan Kedisiplinan.

### **ABSTRACT**

School is formal education institution which is a very important component in developing the students discipline. Since in school the students are taught about the order and discipline, rules or school rules which still work in order to make the students being discipline. Simply discipline can be interpreted as a submissive attitude, order and discipline of the school regulations. This study used a qualitative descriptive approach which discusses about the role of Citizenship teachers in building students discipline. The role of discipline is very important for each individual, especially for the learners. Because of the discipline which appear from a child's self-awareness will lead to the success of learning and actually discipline was supported by awareness obey the rules, norms and rules that applied in order to make the students become individuals who orderly, organized

and discipline in various ways. The purpose of this study were: (1) Describing the role of Citizenship teachers in building the students discipline, (2) Describing the constraints faced by Citizenship teachers in building the students discipline, (3) Describing the solution that applied by Citizenship teachers in addressing violations of the student discipline. From this study we can conclude that: (1) Citizenship teachers at MAN Malang 1 has been built the students with good discipline, (2) The problems in the implementation of school discipline neglected by students and tend to commit violations of school rules and lack of communication among the school and teachers the teacher with students parents on disciplinary problems but only several teachers. (3) The solution was done in addressing student discipline; Citizenship teachers remain to observe and always seek out the existing problems in self-learners and actually also the school and the teachers and employees in MAN Malang 1 should do mutual cooperation in student discipline. Therefore, not only the Rule officer who build the students discipline but all the academic community in Malang MAN 1 should be aware of and take responsibility related to students discipline. Thus the school should streamline further about the disciplinary rules by giving sanction to the student who commits an offense so the students do not violate the rules of school discipline.

**Keywords** : Teacher, Students, Discipline.

## PENDAHULUAN

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan komponen yang sangat penting dalam mengembangkan sikap disiplin siswa, karena disekolah siswa dibelajarkan tentang tata tertib dan kedisiplinan. Aturan atau tata tertib sekolah berfungsi agar siswa menjadi disiplin. Secara sederhana disiplin dapat diartikan sebagai sikap patuh, tata dan tertib terhadap peraturan yang berlaku di sekolah.

Pemberlakuan disiplin menjadikan siswa dapat belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baik sehingga muncul keseimbangan diri dalam berhubungan dengan orang lain. Disiplin sekolah harus dilaksanakan dengan baik konsekuen dan konsisten. Kepala sekolah, guru dan pegawai lainnya yang ada dalam komponen-komponen sekolah ikut memberi teladan yang baik dalam menerapkan disiplin sekolah.

Komponen penting selain sekolah yaitu guru, dimana guru mempunyai peranan besar dalam membina kedisiplinan siswa. Peranan Guru PKn sangat penting, selain memberi materi pelajaran Guru PKn pun

berperan dalam membina kedisiplinan yang ada dalam diri siswanya seperti disiplin waktu, disiplin berpakaian dan berperilaku disiplin yang berdasarkan nilai moral, seorang guru harus bisa memberikan pembinaan disiplin siswanya melalui keteladanan, guru juga harus memberi dorongan kearah yang lebih baik. Guru sendiri harus teladan dan memberikan contoh yang baik kepada siswanya.

Peranan Guru PKn yaitu harus mampu membawa anak didiknya menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Proses pendidikan dapat berhasil apabila adanya upaya penciptaan suasana belajar mengajar yang kondusif, dimana didalamnya harus tertanam perilaku disiplin yang baik, untuk itu diperlukan peran dan figur seorang guru yang bias bertanggung jawab dalam mengajar disekolah dengan membina dan menjadi teladan bagi siswanya khususnya dalam hal kedisiplinan.

Dalam pengembangan disiplin disekolah perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama guru dan orang

tua. Guru yang setiap hari mengajar siswa dikelas dan berinteraksi secara langsung dengan siswa dapat diharapkan bisa membina kedisiplinan dengan baik. Orang tua sebagai pendidik, pengawas dan pengontrol ketika dirumah juga diharapkan dapat membimbing, mengawasi dan mendidik anaknya supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan orang tua.

Disiplin sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman (Priyodarminto, 1994:23).

Disiplin merupakan sesuatu yang menyatu di dalam diri seseorang. Bahkan, disiplin itu sesuatu yang menjadi bagian dalam hidup seseorang, yang muncul dalam pola tingkah lakunya sehari-hari. Disiplin terjadi dan terbentuk sebagai hasil dan dampak proses pembinaan cukup panjang yang dilakukan sejak dari dalam keluarga dan berlanjut dalam pendidikan disekolah. Keluarga dan sekolah menjadi tempat penting bagi pengembangan disiplin seseorang.

Pembentukan disiplin terjadi karena disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan, pendidikan, penanaman, kebiasaan dan keteladanan. Pembinaan itu dimulai dari lingkungan keluarga sejak kanak-kanak. Disiplin juga diproses melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda, dimulai dari keluarga dan pendidikan. (Priyodarminto, 1994:15)

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang sudah dilakukan. Di Madrasah Aliyah Negeri Malang 1, masih

banyak adanya pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa. Bentuk pelanggaran tersebut diantaranya: Siswa terlambat datang ke Madrasah, tidak masuk tanpa keterangan, mengeluarkan baju, keluar masuk ketika KBM berlangsung, tidak memakai atribut dan memakai sepatu di luar ketentuan sekolah.

Dari berbagai bentuk pelanggaran sekolah yang dilakukan oleh siswa di MAN Malang 1, maka guru dan pihak sekolah harus bisa menerapkan tentang peraturan dan tata tertib sekolah lebih efektif lagi, supaya tidak terjadinya pelanggaran terutama masalah kedatangan siswa yang terlambat dan sering tidak membawa atau memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, dari itu perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak sekolah terhadap siswa supaya siswa tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib yang dibuat oleh sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengkaji sejauh mana peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa di MAN Malang 1, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: "Peranan Guru PKn dalam Pembentukan Kedisiplinan Siswa di MAN Malang 1"

## **METODE**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari data-data, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik di balik

fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara data-data yang telah ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Metode Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dan orang-orang yang dapat diamati melalui metode penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk membuat diskripsi atau gambaran secara tertulis mengenai kenyataan yang sesungguhnya ada dengan teknik pengumpulan datanya, tidak di ubah dengan bentuk simbol atau bilangan.

Menurut Zuriyah (2009:92), penelitian kualitatif bersifat *generating theory* bukan *hypothesis testing* sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif. Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis, dan sistemik sehingga di peroleh ketepatan dalam interpretasi, sebab hakikat dari sesuatu fenomena atau gejala bagi penganut penelitian kualitatif adalah totalitas atau *Gestalt*.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang lebih bersifat deskriptif sehingga metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Jenis dan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mencari data-data tentang Peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa di MAN Malang 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa di MAN Malang 1

Peranan guru sebagai pendidik bagi pembentuk generasi yang bermoral pada masa sekarang dan masa akan datang adalah sangat penting. Dimana guru

bukan saja menyampaikan ilmu tetapi membentuk insan yang berketrampilan dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan spiritual. Guru yang memainkan peranan yang berkaitan dengan memberi bantuan dan semangat, memerhati dan mendisiplinkan anak didik supaya patuh terhadap peraturan-peraturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Peranan guru sangat besar karena secara langsung guru merupakan seseorang yang langsung berinteraksi dengan siswa dan melaksanakan transfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Sebagai seorang pendidik guru mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan.

Siswa terkadang sering datang terlambat ke sekolah dikarenakan beberapa alasan tertentu. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan Guru PKn dalam meningkatkan kedisiplinan siswa.

Adanya interaksi yang baik antara guru dan siswa dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang baik. Siswa didalam interaksi belajar mengajar adalah subjek yang akan mencapai tujuan pembelajaran dalam bentuk hasil belajar. Kegiatan proses mengajar tidak lain adalah untuk menanamkan sejumlah norma kedalam jiwa anak didik. Semua norma diyakini mengandung kebaikan dan perlu ditanamkan kedalam jiwa anak didik melalui peranan guru dalam pengajaran.

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah karakteristik siswa, baik karakteristik umum maupun karakteristik khusus, karena di MAN Malang ini terdapat karakteristik siswa yang berbedabeda, dengan perbedaan karakteristik tersebut maka pihak sekolah harus menerapkan lebih baik lagi tentang peraturan-peraturan yang harus

dilaksanakan dan dipatuhi oleh siswa, karena tidak menutup kemungkinan kalau perbedaan karakter siswa itu dapat memberikan dampak/pengaruh negatif bagi siswa lain, kecuali pihak sekolah memang benar-benar telah menerapkan peraturan dan tata tertib sebaik mungkin untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif kepada siswa.

Seorang guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua bagi peserta didik, dengan mengemban tugas yang dipercayakan orangtua kandung/wali siswa dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu penanaman terhadap jiwa dan watak siswa diperlukan agar dapat dengan mudah memahaminya, karena itu merupakan tugas guru sebagai orang tua kedua bagi peserta didik.

Pelaksanaan peraturan sekolah sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa. Dalam tata tertib, setiap siswa akan belajar mengetahui perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai untuk dilakukan. Apabila penerapan peraturan sekolah di MAN Malang 1 dirasa cukup ketat dan konsisten, seorang siswa akan berupaya lebih tertib lagi, karena jika tidak ada peraturan sekolah yang ketat maka siswa cenderung tidak tertib dan tidak disiplin. Sekolah yang mengembangkan tata tertib secara terencana dan dilaksanakan dengan baik, maka sekolah tersebut ikut memberikan kontribusi bagi pembentukan perilaku siswa yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan kepadanya.

Pembelajaran yang diadakan disekolah bertujuan untuk mencapai adanya perubahan tingkah-laku. Perubahan perilaku siswa merupakan hasil proses pembelajaran, dengan demikian tata tertib yang ditanamkan, dilatih dan dibiasakan, akan berubah menjadi kebiasaan yang baik pula bagi siswa.

Perubahan perilaku dan sikap disiplin siswa nampak setelah beberapa kali pertemuan selama pelajaran PKn berlangsung. Perubahan tersebut tentunya berdampak positif bagi siswa karena siswa yang ramai ketika pelajaran PKn ditegur dan diberikan sanksi secara langsung oleh Guru PKn. Sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada siswa agar tidak mengulang perbuatannya lagi. Hal tersebut dapat dijadikan suatu pelajaran oleh siswa yang tidak tertib di dalam kelas agar pada pertemuan selanjutnya siswa bisa lebih disiplin. Tetapi tidak hanya sanksi saja yang diberikan kepada siswa, siswa harus tetap diawasi agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran disekolah.

Dari segi tata tertib juga harus dilaksanakan secara efektif agar setiap siswa tahu dan paham bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensi yang harus dijalani, sehingga siswa diharapkan paham terhadap peraturan dan tata tertib yang ada disekolah. Merubah tingkah-laku seorang anak dari kelakuan yang tidak baik menjadi lebih baik, misalnya membuat sebuah aturan sekolah agar para siswa dibina dan mendorong sikap kedisiplinan siswa.

Menegakkan tata tertib sekolah yang ketat dan konsisten membuat siswa berusaha untuk taat dan patuh pada peraturan sekolah. Mungkin pada tahap awal mereka hanya taat dan patuh karena ada tekanan atau rasa takut kepada guru maupun sanksi. Tetapi hal seperti itu dapat berubah menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga dan disiplin akan menjadi kebiasaan bagi mereka, karena dapat diterima dan diterapkan secara pelan-pelan.

Pendekatan secara individual kepada anak didik mempunyai arti penting bagi pengajaran, karena dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik seorang

guru memerlukan strategi yang harus dilakukan, dengan strategi itu maka diharapkan dapat membantu guru dalam menangani berbagai permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Guru PKn bahwa sikap disiplin tidak hanya disampaikan ketika menyampaikan materi saja, tetapi setiap waktu harus ditanamkan pada masing-masing peserta didik, dengan begitu peserta didik menjadi terbiasa terhadap perilaku disiplin di sekolah. Jadi Guru PKn sangat berperan penting dalam pembinaan disiplin siswa disekolah, karena Guru PKn tugasnya bukan hanya mengajar saja tapi mendidik siswa-siswinya. Peranan utama guru disekolah adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, untuk itu perlu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menentukan strategi apa yang akan dilakukan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Guru harus mempersiapkan diri sebaik mungkin diantaranya perlu melakukan persiapan sebelum mengajar, menyediakan materi dan media sebelum kegiatan belajar mengajar, memastikan bahwa peserta didik sudah siap melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dikelas.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam membina kedisiplinan siswa, bukan hanya sebagai kewajiban dari seorang guru bidang studi didalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung, namun setiap berlangsungnya kegiatan dan aktivitas yang terjadi di lingkungan sekolah. Baik dalam proses belajar mengajar didalam kelas maupun diluar kelas. Kemampuan guru dalam melakukan kegiatan komunikasi yang baik dengan siswa dapat mempengaruhi proses

pembelajaran dan akan memberikan hasil yang baik bagi siswa. Pada pembelajaran Guru PKn di MAN Malang 1 diharuskan mampu mengenali karakter setiap siswanya agar dapat saling berhubungan dengan baik, dengan mengenali karakter siswanya maka guru dapat mempersiapkan strategi mengajar dan materi yang tepat untuk digunakan sebagai bahan ajar kepada siswa. Selanjutnya, guru harus dapat memberikan inovasi belajar yang kreatif agar siswa tidak bosan dengan apa yang diajarkan, dengan begitu proses kegiatan belajar akan lebih menyenangkan dan siswa tidak akan bosan pada saat belajar.

#### **Kendala yang dihadapi oleh Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa**

Dalam membina kedisiplinan siswa, terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi oleh guru dan pihak sekolah. Adanya suatu masalah tidak dapat dihindari, tetapi permasalahan tersebut harus dihadapi dengan sikap dan tindakan yang positif agar tidak merugikan bagi guru maupun peserta didik, dengan demikian peneliti menggali informasi kepada Guru PKn yang berkenaan dengan faktor dan kendala yang dihadapi dalam membina kedisiplinan siswa,

Sejak awal sekolah sudah mensosialisasikan tata tertib yang sudah disusun dan akan diberlakukan kepada siswa. Sosialisasi ini bertujuan agar semua pihak yang terkait mengetahui aturan-aturan yang berlaku disekolah. Sosialisasi dilakukan kepada guru, orang tua dan siswa. Sosialisasi kepada guru dapat dilakukan pada saat rapat, sementara dukungan guru diharapkan dapat memberi teladan yang baik bagi siswa. Guru merupakan orang pertama dalam penegakan disiplin sekolah juga diharapkan memberi dukungan bagi penerapan dan pelaksanaan disiplin sekolah terhadap

siswa. Sosialisasi kepada siswa dilakukan pada saat penerimaan siswa baru, sedangkan sosialisasi kepada orang tua dilakukan setiap tahun ajaran baru. Sosialisasi terhadap orang tua biasanya dapat dilakukan dengan mengundang wali murid untuk datang ke sekolah dan menjelaskan program-program sekolah akan diberlakukan.

Peraturan dan tata tertib sekolah sudah dibuat dan sebelum diterapkan harus disosialisasikan dengan guru-guru, orang tua siswa dan siswanya sendiri, dengan adanya sosialisasi tentang peraturan dan tata tertib sejak awal kepada guru, orang tua, dan siswa maka diharapkan peraturan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dipatuhi oleh siswa sehingga siswa tidak akan melanggar peraturan-peraturan yang diberlakukan disekolah.

Faktor yang mendukung pelaksanaan disiplin sekolah di MAN Malang 1 ini diantaranya peraturan dan tata tertib yang diberlakukan semakin ditingkatkan lagi keefektifannya, sarana dan prasarana yang ada di MAN Malang 1 cukup baik dan memadai fasilitasnya, guru dan pihak sekolah sangat memperhatikan perilaku siswa ketika disekolah. Setiap siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib dikenakan sanksi sesuai dengan yang diperbuat siswa. Faktor pendukung yang ada di MAN Malang 1 tersebut dikatakan sudah dapat menerapkan sikap disiplin terhadap siswanya. Tetapi didalam pelaksanaan mematuhi peraturan dan tata tertib itu siswa terkadang ada yang melanggar. Terjadinya pelanggaran tersebut merupakan tugas guru dan pihak sekolah yang menangani agar siswanya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi, dengan adanya sanksi yang diberikan, siswa akan berusaha menata perilakunya agar terbiasa tertib, teratur dan mematuhi

peraturan dan tata tertib yang berlaku disekolah. Penerapan disiplin akan mendorong, memotivasi dan memaksa peserta didik untuk meningkatkan belajar mereka disekolah, apabila kedisiplinan itu diterapkan dengan baik akan memberikan dampak yang baik bagi prestasi belajar siswa disekolah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bagaimana peranan guru PKn dalam meningkatkan kedisiplinan siswa itu sendiri selain didalam kegiatan proses belajar mengajar berlangsung, yaitu selama kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah, baik di kelas maupun di luar kelas, dan itu bukan hanya merupakan tugas dari salah satu guru bidang studi, namun secara keseluruhan pihak-pihak yang ada disekolah.

### **Solusi yang dilakukan oleh Guru PKn dalam mengatasi pelanggaran kedisiplinan siswa**

Dari semua permasalahan yang ada akibat kurang disiplinnya siswa sebagai faktor penghambat dan kendala dalam membina kedisiplinan, peneliti ingin mengetahui solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh guru PKn agar peraturan dan tata tertib di MAN Malang 1 ini berjalan dengan efektif dan dapat dipatuhi oleh siswa. Disiplin tidak dapat terwujud dengan waktu yang singkat karena diperlukan usaha dan kerja keras guru bersama kepala sekolah untuk mewujudkannya. Disiplin sekolah seharusnya dimulai dari hal yang terkecil misalnya aturan tentang memakai sepatu, searagam, kehadiran di sekolah, tatanan rambut, serta bawa yang dibawa.

Sejak awal sudah di sosialisasikan tentang peraturan yang dibuat harus dipatuhi oleh siswa. Peraturan tersebut sudah jelas ditunjukkan kepada siswa, maka sudah sepatutnya siswa mentaati setiap



peraturan yang telah dibuat oleh sekolah agar kegiatan belajar mengajar dan bersosialisasi di lingkungan sekolah dapat lebih efektif. Dalam hal menciptakan strategi itu Kepala Sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap pengembangan disiplin sekolah, dan dibantu oleh guru-guru lain.

Berdasarkan tata tertib yang sudah ditetapkan bahwa setiap siswa yang melakukan pelanggaran baik itu tentang kedisiplinan maupun melanggar peraturan tata tertib, maka mereka harus menerima hukuman/sanksi. Sanksi diberikan kepada siswa sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, kalau melanggar hanya sekedar membuang sampah sembarangan hanya diberikan teguran saja, Tetapi apabila terlambat datang ke sekolah, memakai sepatu diluar ketentuan dan memakai seragam yang tidak sesuai maka perlu tindakan dari guru BK dan Kesiswaan untuk menangani permasalahan siswa tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Guru PKn, Kepala Sekolah dan Guru BK memang benar bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebab ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan karakteristik tersebut. Bisa mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah, dari perbedaan beberapa karakteristik peserta didik, maka guru dan pihak sekolah harus bisa menerapkan peraturan dan tata tertib sekolah lebih efektif lagi, terutama permasalahan kedatangan siswa yang terlambat dan sering tidak membawa/memakai seragam yang sesuai, serta pelanggaran-pelanggaran lain. Dalam pengembangan disiplin sekolah perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama guru dan orang tua. Guru yang

setiap hari mengajar siswa dikelas dan berinteraksi secara langsung dengan siswa dapat diharapkan bisa membina kedisiplinan siswa dengan baik. Orang tua sebagai pendidik, pengawas dan pengontrol ketika dirumah juga diharapkan dapat membimbing, mengawasi dan mendidik anaknya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan orang tua. Disiplin memang sangat penting bagi setiap individu, apalagi bagi peserta didik, karena sikap disiplin yang muncul dari kesadaran diri peserta didik dalam belajar akan mengantarkan kepada kesuksesan belajar dan suatu saat ketika bekerja, dan tentunya sikap disiplin itu didukung oleh kesadaran mentaati aturan, norma-norma dan tata tertib yang berlaku agar peserta didik menjadi individu yang tertib, teratur dan dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari.

## SIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa di MAN Malang 1 diantaranya berupa: *Pertama*, Menegakkan disiplin kepada peserta didik dengan memberikan contoh langsung kepada anak didiknya dan menjadi teladan bagi peserta didik yaitu dengan datang tepat waktu. Sebab peserta didik selalu meniru apa yang dilakukan oleh gurunya, dengan melihat gurunya disiplin maka peserta didik akan membiasakan dirinya untuk selalu bersikap dan berperilaku disiplin disekolah. *Kedua*, Mengawasi perilaku peserta didik dalam setiap aktifitasnya dengan mengawasi perilaku anak didiknya. Guru PKn memiliki peranan yang luas dalam membina kedisiplinan

siswa-siswinya pada saat ia menyampaikan materi maupun diluar kegiatan belajar mengajar dengan begitu Guru PKn dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada anak didiknya. *Ketiga*, Selalu menanamkan sikap disiplin kepada peserta didik secara terus-menerus agar menjadi kebiasaan yang baik bagi anak didiknya dan memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran tentunya sanksi tersebut bersifat menguntungkan dan mendidik bagi siswa, dengan adanya sanksi tersebut siswa akan merasa jera terhadap sanksi yang diberikan dengan tidak terlambat lagi sehingga menjadikan peserta didik lebih disiplin dalam bertingkah-laku disekolah.

Kendala yang dihadapi oleh Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa diantaranya adalah: *Pertama*, Peraturan tata tertib sekolah kurang disadari oleh peserta didik dan peserta didik masih melakukan pelanggaran dengan begitu Guru PKn selalu berusaha mencari tahu penyebab keterlambatan anak didiknya karena itu merupakan bentuk dan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. *Kedua*, Masih kurang adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, disamping itu kendalanya dari faktor eksternal/pengaruh teman-temannya diluar anak MAN Malang 1 sehingga peserta didik cenderung melakukan pelanggaran. *Ketiga*, Belum semua guru mengingatkan ke siswa sehingga kedisiplinan ini masih terpaku pada petugas tatib karena keteladanan disiplin Kepala Sekolah serta Guru-guru dan karyawan MAN Malang 1 sangat berpengaruh terhadap disiplin peserta didik, mereka lebih mudah meniru apa yang mereka lihat dibanding apa yang mereka dengar.

Solusi yang dilakukan oleh Guru PKn dalam mengatasi pelanggaran kedisiplinan

siswa diantaranya adalah: *Pertama*, Guru PKn melakukan pendekatan dan memberi teguran kepada peserta didik yang sering melakukan pelanggaran dengan mendekatinya dan memberikan nasihat yang dapat diterima oleh peserta didik sehingga anak didiknya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi ketika disekolah serta berupaya agar siswa yang sering terlambat masuk kelas pada saat mata pelajaran PKn tidak melakukan pelanggaran lagi, jika siswa masih mengulangnya maka Guru PKn bertindak dan bekerjasama dengan orang tua peserta didik agar anak didiknya tidak mengulang lagi perbuatannya karena merugikan dirinya dan dapat mempengaruhi temannya yang lain. *Kedua*, Guru PKn Mendekati peserta didik dan memberi masukan kepada peserta didik untuk selalu berperilaku disiplin dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peserta didik untuk mencegah dan mengatasi tindakan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah.

*Ketiga*, Guru PKn mencari tahu permasalahan yang ada pada diri peserta didik sehingga menyebabkan peserta didik sering melakukan pelanggaran, dan memberikan solusi yang baik kalau tidak ada perubahan maka Guru PKn bertindak langsung dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa dan bekerjasama supaya peserta didik tidak melakukan pelanggaran disekolah. dan tentunya pihak sekolah juga serta guru-guru dan karyawan yang ada di MAN Malang 1 berupaya agar saling kerjasama dalam membina kedisiplinan siswa. *Keempat*, Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap permasalahan kedisiplinan siswa disekolah yaitu perlu adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan semua guru-guru dan karyawan termasuk orang tua siswa dan perlu adanya sosialisasi. Sosialisasi dilakukan kepada

guru, orang tua dan siswa secara terus-menerus, sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar semua pihak yang terkait mengetahui aturan-aturan yang berlaku disekolah.

Dari hasil penelitian terhadap peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa MAN Malang 1, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Guru PKn dapat memberikan pendekatan dan pengawasan secara terus-menerus kepada peserta didik apabila peserta didik masih mengulang perbuatannya yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran disekolah dan siswa yang sering terlambat masuk kelas pada saat mata pelajaran PKn berlangsung dengan begitu guru dapat bertindak dan melaporkannya kepada orang tua/wali serta dapat mengatasinya dengan baik agar mencegah perilaku ketidak disiplin mereka.

Guru PKn harus memberikan motivasi kepada peserta didik agar meningkatnya semangat belajar mereka agar anak didiknya selalu berperilaku disiplin disekolah maupun diluar lingkungan sekolah dan memberikan contoh dalam berdisiplin yaitu dengan selalu datang tepat waktu karena peserta didik biasanya selalu meniru yang dilakukan oleh gurunya

Tidak hanya Guru PKn saja yang berperan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MAN Malang 1 tetapi semua guru mata pelajaran itu harus bertanggung jawab dan berperan aktif terhadap kedisiplinan peserta didik. Guru harus menghindari kebiasaan yang tidak tepat waktu agar anak didiknya tidak melakukan pelanggaran. dengan meningkatkan dan memberi pembinaan, pengawasan yang ketat kepada peserta didik, perhatian yang kuat serta keteladanan semua Guru-guru dan karyawan yang ada di MAN Malang 1.

Kepala Sekolah harus lebih meningkatkan pengawasan dan pengarahan terhadap seluruh guru mata pelajaran agar selalu berkoordinasi untuk selalu bersama-sama membina disiplin siswa

Untuk meningkatkan pembinaan kedisiplinan peserta didik maka dari itu pihak sekolah melakukan kerjasama dan komunikasi dengan berbagai pihak seperti orang tua, siswa dan seluruh guru dan karyawan yang ada di MAN Malang 1 dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan kedisiplinan siswa.

Pihak sekolah juga harus lebih mengefektifkan lagi tata tertib tersebut dan memberlakukan peraturan tata tertib yang lebih tegas lagi sehingga mudah untuk diikuti dan mampu menciptakan suasana yang kondusif dilingkungan sekolah. Pembiasaan disiplin disekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi kehidupan siswa dimasa mendatang. Pada mulanya memang disiplin dirasakan sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan. Akan tetapi, bila aturan ini dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan dirinya dan sesama, lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan yang baik menuju arah disiplin pada diri siswa.

Sekolah sebagai tempat menimba ilmu maka diperlukan segala fasilitas yang mendukung untuk kenyamanan siswa belajar disekolah, dengan adanya sarana dan prasarana dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah maka siswa akan merasa aman dan nyaman sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2013. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prijodarminto, Soegeng. 1994. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Abadi.
- Saardiman A.M 2010. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Slameto. 2013. *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutirna. 2013. *Bimbingan dan Konseling (Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal)*. Yogyakarta: Andi.
- Tu'u Tulus. 2004. *Peran Disiplin pada Perilaku Siswa dan Prestasi siswa*. Jakarta: Gramedia.
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Isi, Strategi, dan Penilaian)* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori Aplikasi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

## Sumber internet:

- Dodi Supandi : <http://blogspot.com/2010/05/24karakteristik-pendidikan.html>  
(Diakses pada tgl 31 November 2014)
- Mashun: <http://blogspot.com/2013/11/tugas-dan-tanggung-jawab-guru.html>  
(Diakses pada tgl 29 November 2014)

## **PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EKSISTENSI MUSEUM SAMPARAJA BIMA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KOTA BIMA NTB**

**Marniyanti, Agus Tinus, M. Syahri**  
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia  
Email: marniyantibima@gmail.com

### **ABSTRAK**

Latar belakang Museum Samparaja Bima tidak hanya menyimpan naskah-naskah dan benda-benda bersejarah peninggalan kesultanan Bima, sebagai koleksi yang ada di Museum itu, akan tetapi Samparaja juga berbagai pakaian adat lama semasa Kesultanan Bima. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya Museum Samparaja Bima di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima. (2) Bagaimana eksistensi/ keberadaan Museum Samparaja Bima di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, dan (3) Apakah ada Partisipasi Masyarakat Bima Dalam mengembangkan Pariwisata Museum Samparaja. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka tapi mendiskripsikan, menguraikan dan menggambarkan. Adapun metode pengumpulan data itu sendiri yaitu wawancara dan dokumentasi resmi yang di dihasilkan, lokasi penelitian yaitu di Museum Samparaja Bima, instrument penelitian alat bantu bagi kualitas data yang terkumpul, data dan sumber data yang digunakan primer dan sekunder, analisis data yang digunakan adalah penyajian data dan kesimpulan. Hasil Penelitian diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya latar belakang berdirinya Museum Samparaja Bima di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima NTB Daerah bima mulai abad ke 14 sampai pertengahan abad ke 20 (1957) oleh warsito adalah Kerajaa /Kesultanan yang berpemerintahan sendiri (swaparaja) dibawah pimpinan seorang Raja/ Sultan. Dan di jadikan yayasan oleh Hj. Siti Maryam R. Salahuddin. berisi naskah-naskh, foto-foto Kesultanan/Raja jaman dulu dan baju adat Bima serta keramik. Sedangkan Eksistensi/keberadaannya di terima baik oleh masyarakat Bima karena selain menyimpan benda-benda bersejarah Museum juga merupakan warisan budaya Bima yang harus di jaga dan di lestarikan oleh semua masyarakat Bima karena itu merupakan cirri khas adat Bima yang masih ada sampai sekarang. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Setiap obyek wisata memiliki daya tarik tersendiri begitu juga obyek wisata Museum Samparaja Bima. Salah satu daya tarik obyek wisata Museum Samparaja adalah keindahan yang masih alami, asli, dan bangunanya yang unik. Untuk menjadikan obyek wisata serta berkembang lebih baik maka diperlukan proses pengelolaan obyek wisata Museum Samparaja. Gambar: Foto-foto Museum Samparaja Bima, isi dari Museum, profil Monggonao dan peta Kota Bima.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Museum Samparaja Bima, Pariwisata di Kota Bima

### **ABSTRACT**

The background of the Bima Samparaja Museum is not only save manuscripts and objects of historic relics of Bima sultanate, as the collections of the Museum, but Samparaja also store a variety of old traditional clothes during the Sultanate of Bima. The purpose of this study were (1) to find out how is the background of establishment Bima Samparaja Museum in the Monggonao village, Mpunda District of Bima City. (2) How is the existence / whereabouts in the Bima Samparaja Museum in the Monggonao village, Mpunda District of Bima City, and (3) Is there Public Participation In developing Tourism of Samparaja Museum. The methods of this study used a qualitative approach because of

the problems discussed in this study does not regard the numbers but describe, elaborate and illustrate. The data collection method itself, namely interviews and official documentation produced, the research location that is in the Bima Samparaja Museum, the tools research instrument for the quality of the data collected, data and data sources used primary and secondary. The data analysis used is data presenting and conclusions. The research result is known that the things that causes the background of the establishment of Bima Samparaja Museum in the Monggonao Village, Mpunda District, Bima City of NTB begins the 14<sup>th</sup> century until the mid-20<sup>th</sup> century (1957) by Warsito is Royal /self-governing Sultanate (Swaparaja) below the leadership of a King / Emperor. Then is become as a foundation by Hj. Siti Maryam R. Salahuddin which is contains of the texts, Sultanate/ King photographs of ancient, traditional dresses of Bima and ceramics. While existence / presence is well received by the Bima public because besides saving historic objects, the museum is also a cultural heritage of Bima that must be guarded and preserved by all Bima societies because it is a hallmark of the Bima custom which still exist today. Whereas of community participation in developing tourism, every tourism has its own attraction as well as a Bima Samparaja Museum tourism. One of tourism attraction is the Samparaja Museum is a nature beauty, original, and unique structure. For developing this tourism object it is necessary tourism management process in Samparaja Museum. Pictures: Photographs of Bima Samparaja Museum, the contents of the Museum, the profile of Monggonao, and maps of Bima City.

**Keywords:** Public Participation, Bima Samparaja Museum, Tourism place in Bima city.

## PENDAHULUAN

Daerah Bima terdapat banyak peninggalan masa lampau baik berupa cagar budaya maupun peninggalan situs budaya. Cagar budaya hasil peninggalan Kerajaan Bima berupa tempat-tempat bersejarah sebagai bukti sejarah bahwa di Bima telah terjadi kisah-kisah nyata yang perlu di kaji, dicermati dan diteliti secara intensif. Yang masih belum jelas dan perlu mendapatkan perhatian ilmuwan sejarah maupun arkeolog, bahwa di Bima memiliki situs-situs purbakala yang cukup banyak salah satunya Museum Samparaja Bima (Uma Asi Mbojo). penekanan dalam situs ini merupakan cagar budaya dan sebuah tempat bersejarah dan telah tercatat di arsip nasional menjadi cagar budaya nasional yang berada di Bima. Sehubungan dengan keberadaan situs belum dimuat dalam tulisan ini, karena kepastian informasih autentiknya belum jelas, kecuali situs Wadu pa'a di asakota, telah berkali-kali diteliti oleh para arkeolog pusat, inipun masih bersifat dugaan sementara dan belum

ada bukti keberadaannya (sumber cagar budaya Bima).

Pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. (Soekartijo, 2000:11). Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda tentang tujuan keberadaan pariwisata-pariwisata dan ini merupakan hal yang sangat wajar karena latar belakang pengetahuan serta pengalaman seseorang dalam memahami keberadaan pariwisata dan hakekat didalamnya. Namun sebagai tujuan tepat atau tidaknya pandangan masyarakat terhadap pertumbuhan dan perkembangan pariwisata muncul dengan adanya kesan dan tanggapan serta partisipasi dari masyarakat terhadap aktivitas pariwisata. Dengan memahami tujuan pariwisata secara mendalam maka masyarakat yang semula beranggapan pada kepariwisataan maka lambat laun akan menyadari bahwa betapa pentingnya obyek-obyek pariwisata yang ada. Pandangan yang positif dari masyarakat akan terlihat dari tingkah laku yang selama

ini dialami, dirasakan, dan dipikirkan. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial, punya naluri untuk berhubungan dengan orang lain (Karyono,1999:7). Perjalanan wisata dari daerah lain ke daerah lain merupakan gejala sosial manusia yang ingin berinteraksi dengan orang lain. Untuk membangun suatu pandangan yang positif dari masyarakat terhadap keberadaan pariwisata tidaklah sulit karena secara geografis kepulauan Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau terkenal dengan jambud khatulistiwa yang berpotensi sebagai obyek tujuan wisata karena pariwisata merupakan suatu fenomena geografis yang menjadi tujuan wisata yang mempunyai peranan dalam pariwisata. Dalam perkembangan ekonomi pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat di andalkan sebagai industri jasa yang sangat berpotensi guna menambah pemasukan devisa Negara. Dari segi ekonomi pariwisata meliputi berbagai macam usaha bisnis besar maupun kecil (Pendi,1999: 81). Industri pariwisata merupakan badan usaha yang sangat kompleks yang meliputi dua faktor yaitu subyek dan obyek pariwisata dimana wisatawan adalah subyek dan alat, dan perlengkapan adalah obyek yang dalam bahasa asing dinamakan travel plant atau visito plant. Beraneka ragam usaha yang di timbulkan untuk menciptakan iklim sosial ekonomi yang mampu memicu tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan produktivitas masyarakat. Serta memiliki kemampuan dan turut bertanggung jawab dalam rangka mendukung tumbuh dan berkembangnya jasa kepariwisataan sebagai sumber perekonomian dengan sasaran agar seluruh sumber daya yang ada dapat di gunakan sebagaimana mestinya baik SDA ataupun SDM biasa menjadi bagian untuk turut serta berpartisipasi dalam mengembangkan

pariwisata yang ada di Indonesia. Sebagaimana peneliti ketahui keuntungan dalam negeri dari pariwisata antara lain: dorongan untuk memperluas lapangan kerja, pasaran baru untuk hari-hari produksi tertentu, efek penggadaan, mendorong penanaman modal asing, memajukan pengembangan daerah, mendistribusikan kembali pendapatan Nasional.

Maka dengan perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang nantinya berlanjut terhadap pemerataan pendapatan masyarakat. Jika di tinjau dari sudut pandang sosiologis kegiatan pariwisata sekurang-kurangnya mencakup 3 dimensi interaksi yaitu kultural, politik, dan bisnis (Usman, 2004: 5 ). Dalam dimensi interaksi yaitu cultural kegiatan pariwisata memberi ajang alkulturasi budaya berbagai macam etnis bangsa melalui pariwisata juga bisa terjadi alkulturasi budaya antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga di harapkan lewat sektor pariwisata para penduduk akan dapat memperkenalkan keindahan dan sumber daya alam yang ada serta dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi di sisi lain sektor pariwisata sangat berpengaruh negative terhadap budaya-budaya yang ada, di mana bangsa Indonesia memiliki adat ketimuran yang masih berlandaskan norma-norma yang ada dalam segala hal baik perbuatan dan secara berpakaian. Tapi tidak di pungkiri juga masih melekatnya kebudayaan meniru yang di sebabkan karena sering melihat keadaan tertentu. Masyarakat dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain. Sebagaimana yang kita ketahui masalah sosial yang ada di suatu obyek wisata yang satu dengan wisata yang lain.

Wisata budaya mengenal lebih banyak obyek karena selain obyeknya berupa hasil karya manusia masa lampau dan masa kini, juga berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas manusia itu sendiri (Munandar, 2001:1).

Di mana yang sering menjadi persoalan adalah sopan santun dalam hal berpakaian, pada semua tempat wisata baik pantai atau sejenis Museum Samparaja Bima. Hendaknya sebagai pengunjung memiliki kesadaran akan batas atau norma-norma yang ada di obyek wisata. Sebagai suatu masyarakat yang masih berpegang teguh pada norma-norma agama dan adat istiadat hendaknya masyarakat secara terus mempertahankan etika-etika yang ada tanpa meniru atau mengadopsi adat istiadat bangsa lain, agar norma-norma yang ada tidak hilang begitu saja. Dengan demikian Yayasan Museum Kebudayaan “Samparaja” Bima yang di ketahui oleh HJ. Siti Maryam R. Salahuddin, SH., Puteri dari Sultan Salahuddin Sultan Bima terakhir. Tujuan di bangunya Museum “Samparaja” ini supaya bisa menyelamatkan benda-benda budaya bersejarah dari kepunahan, melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang adi luhung dan mengadakan usaha penelitian serta pembahasan menyangkut budaya daerah Bima untuk memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia. Adapun yang menjadi koleksi dalam Museum Samparaja Bima ini yaitu peninggalan Kesultanan Bima yang berupa naskah-naskah lama yang tertulis dalam aksara Arab berbahasa Melayu yang jumlahnya cukup banyak, dilakukan tindakan penyelamatan terhadap fisik maupun isi naskah yang mengandung berbagai macam jenis ilmu, sejarah pemerintahan di Bima, Hukum Adat dan Hukum Islam yang di terapkan, ilmu pertanian, kelautan, perbintangan, hubungan

interaksi dengan daerah-daerah lain maupun hubungan perdagangan dengan Negara asing.

Museum Samparaja tidak hanya menyimpan naskah-naskah dan benda-benda bersejarah peninggalan sultan Bima sebagai koleksi yang ada dalam Museum itu, akan tetapi Museum “Samparaja” juga memperagakan berbagai pakain adat lama semasa Kesultanan Bima dari pakaian adat pangkat-pangkat adat, pakaian upacara-upacara adat, pakaian boneka-boneka manequin laki-laki / perempuan yang di tempatkan dalam vitrin. Selain dari pada itu, tersimpan pula benda-benda hasil karya tradisional berupa ukiran dari kayu dan perak serta barang-barang keramik lama.

Berpijak dari hal tersebut di atas di harapkan lewat penelitian ini segala bentuk fenomena yang ada dalam sektor pariwisata akan dapat terselesaikan tentunya dengan melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintahan pengelola dan juga masyarakat luas pada umumnya untuk ikut serta dalam partisipasi memecahkan segala bentuk persoalan yang di hadapi baik itu yang menyangkut kebersihan, keamanan dan menjaga fasilitas yang ada agar tetap terawat dan tahan lama. Seperti halnya obyek wisata Museum Samparaja Bima. sebagai obyek penelitian ini di harapkan memeberikan keadilan yang besar terhadap pembangunan karena sebagaimana kita ketahui obyek wisata Museum Samparaja Bima merupakan asset daerah yang dapat menyumbang pendapatan daerah dan ini merupakan kebanggaan pada diri kita karena kita mempunyai potensi daerah yang sudah banyak dikenal orang. Disisi lain mengenai segala sesuatu permasalahan yang di hadapi oleh obyek wisata Museum Samparaja Bima akan di bahas pada bab selanjutnya.



## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka. Tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang pengembangan Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja Bima dalam Mengembangkan Pariwisata di Kota Bima. Ide dari penelitian ini, yaitu supaya kita dapat mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena atau memperoleh hasil. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang atau perilaku yang di amati, Bogdan dan Tylor (dalam Zuriah, 2009: 92).

Moleong (2011: 5), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi (*key instrument*) alat peneliti yang utama, yang berarti bahwa peneliti berperan aktif dalam membuat rencana penelitian, proses pelaksanaan penelitian, serta menjadi faktor keseluruhan proses dari hasil penelitian Museum Samparaja Bima di Kota Bima itu sendiri.

Dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi penelitian dengan informasi salah satu sfat Museum Samparaja Bima, ibu rumah tangga, penjaga Museum Samparaja Bima, tukang ojek Kota Bima. Maka akan di susun dan dianalisis sehingga dapat di buat kesimpulan.

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan yang di dasarkan pada kriteria tertentu. Menurut Maleong (2011:327), ada 4 kriteria dalam pemeriksaan data, yaitu: *pertama*

Kredibilitas (kepercayaan), yaitu criteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasih yang di kumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan responden sebagai informan untuk hasil penelitian yang memenuhi kredibilitas. *Kedua* Keteralihan, yaitu kriteri untuk memenuhi bahwa hasil penelitian yang di lakukan dalam konteks tertentu dapat di aplikasikan di transfer pada konteks atau setting lain yang dimiliki tipeologi yang sama. *Ketiga* Kebergantungan, yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati apakah membuat kesalahan dalam mengoseptualisasikan rencana penelitiannya. Tehnik terbaik yang di lakukan untuk langkah ini adalah dengan *dependability audit*, yaitu meminta independen auditor untuk *me-riview* aktifitas peneliti. Pada penelitian ini, untuk menghindari kesalahan yang di timbulkan dari penelitian sendiri maka dibutuhkan orang lain sebagai auditornya. Informasih yang diperoleh dari informan di Museum Samparaja Bima daerah Kota Bima khususnya meliputi staf museum, penjaga museum, pengunjung, ibu rumah tangga, serta tukang ojek yang berupa data mentah dan keurutan di dcek kembali dan di *re-view* dengan kata yang telah ada oleh orang lain. *Keempat* Kepastian adalah kriteria untuk menilai bermutu atau tidaknya hasil penelitian. Jika *dipendabilitas* digunakan untuk menilai melalui kualitas dari proses yang di tempuh oleh peneliti. Maka *konfirmasiabilitas* digunakan untuk menilai kualitas hasil penelitian sendiri. Dengan tekanan pernyataan apakah data dan informasih serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada dalam *audit taril*. Untuk

mengecek data dalam penelitian ini menggunakan *kredibilitas*. Zuriyah (2009:110), mengatakan bahwa kredibilitas adalah criteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang telah di kumpulkan. Artinya hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan responde sebagai informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Paparan Data Dan Perbedaan Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja Bima Dalam Mengembangkan Pariwisata di Kota Bima.**

Museum Samparaja Bima adalah bagian dari sejarah perjalanan Bima di masa lalu dan didirikannya museum tersebut tidak lain supaya masyarakat Bima mau belajar tentang sejarahnya sendiri sebelum belajar sejarah daerah lain agar kita bisa memperkenalkan budaya kita di mata orang lain bahkan di mata dunia inilah sejarah Bima yang menyimpan banyak keelokan dan harus di lestarikan dan di pelajari asal-usulnya supaya kita bangga menjadi bagian dari Kota Bima yang mempunyai banyak sekali sejarah yang nyata adanya salah satunya Museum Samparaja Bima yang masih berdiri kokoh hingga saat ini.

Walaupun ada faktor yang menghambat perbaikan Museum Samparaja Bima dari tahun –ketahun ini karena pemerintahan Bima yang kurang memperhatikan masalah ini dan yang menjadi persoalannya sekarang ya anggaran dana yang belum ada untuk memperbaiki atap Museum yang mulai rusak di makan usinya. Tapi dengan adanya Museum Samparaja Bima ini saya selaku penjaga Museum Samparaja dan masyarakat Bima khususnya Kecamatan Mpunda tempat berdirinya Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja Bima Dalam Mengembangkan

Museum Samparaja Bima di dibangun sebaik mungkin dan mendapat dukungan dari berbagai pihak selama berdirinya termasuk dinas pariwisata Kota Bima. Museum Samparaja merupakan upaya untuk melestarikan budaya Bima yang mulai terkikis dimakan usia dan perlu perawatan serta kesadaran dari pemerintah dan masyarakat sekitar Museum Khususnya. Di dalam museum terdapat banyak koleksi pada zaman dulu seperti naskah-naskah, keramik, baju adat, foto-foto. Hal tersebut benar-benar perlu kesadaran dari dalam diri kita, sehingga dengan adanya Museum Samparaja masyarakat bisa mengetahui dan menambah pengalaman masyarakat yang dekat dengan museum mau merawat dan menjaga Museum sampai kapanpun karena itu merupakan ciri khas dari daerah Bima di perkuat pula oleh ibu rumah tangga ibu Safia.

Pihak Museum harus bekerja sama dengan masyarakat baik dari masyarakat mpunda Kota Bima itu sendiri maupun masyarakat Kota Bima yang lainnya demi kesuksesan Museum Samparaja dan menanamkan karakter kuat kepada masyarakat dan anak-anak bangsa berikutnya sebagai calon pemimpin bangsa yang akan datang dalam mewarisi budaya mereka masing-masing dan mampu menjaga serta melestarikannya dalam memperkenalkan budaya itu di dunia nasional maupun internasional agar mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kota Bima maupun Negara. Sehingga, mereka dapat memberikan kontribusi yang positif pada lingkungan tempat berdirinya budaya Museum Samparaja Bima. Dari penjelasan tersebut, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang studi yang memuat tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja Bima Dalam Mengembangkan

Pariwisata di Kota Bima harus diimbangi dengan kekompakan antara masyarakat dan pemerintah Kota Bima setempat dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dalam pendidikan berkarakter yang ada dalam bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan pedoman perangkat pembelajaran yang telah disesuaikan dan dengan kehidupan social budaya.

Museum Samparaja Bima memang harus dilestarikan terus keberadaannya sampai sekarang, dan di kembangkan di lembaga pendidikan sekolah juga. Suapaya mereka bisa tau apa itu Museum dan mereka mampu menjaga dan melestarikannya. Museum Samparaja ini sangat penting karena menyimpan banyak benda-benda bersejarah Bima di masa lalu, dan museum ini juga yang memberikan rezeki kepada tukang ojek yang melintasi Museum Samparaja Bima sebagai kendaraan / transportasi cepat dan mudah di jangkau oleh para wisatawan yang mau berkunjung ke Museum Samparaja ojek merupakan alternatif cepat pula untuk sampai ketujuan berwisata dimana pun dan kapan pu termasuk di Museum Samparaja, apa lagi di daerah Kota Bima khususnya Kecamatan Mpunda Kota Bima hampir semuanya jalannya di lewati oleh tukang atau kendaraan roda dua seperti ojek dari berbagai Desa untuk mencari penumpang dan sumber rezeki mereka dengan berojek. Tukang ojek juga merupakan salah satu pemasukan ekonomi keluarga bagi kepala rumah tangga dalam mencari rejeki dengan mengantar pariwisata/ masyarakat kemana saja dengan disewakan untuk berkunjung serta berkeliling ketempat berwisata yang ada di Bima NTB termasuk berwisata ke Museum Samparaja Bima yang memiliki begitu banyak cerita sejarah perjalanan Bima zaman dulu hingga sekarang.

### **Dampak yang di temukan dalam Eksistensi/ keberadaan Museum Samparaja Bima di Kelurahan Monggonao Kota Bima.**

Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja Bima dalam Mengembangkan Pariwisata di Kota Bima berjalan dengan baik. Namun perkembangannya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi selama adanya Museum.

Eksistensi/keberadaan Museum Samparaja di Kelurahan Monggonao Kota Bima, yaitu merupakan salah satu bukti sejarah dan dampaknya sangat baik untuk para masyarakat Bima keseluruhan bisa tau perjalanan dan eksistensi suatu Museum Samparaja Bima hingga sekarang tapi sayang kurangnya informasi dari pemerintah Bima jadi banyak yang tidak tau berdirinya Museum Samparaja.

Penjaga Museum Samparaja Bima menegaskan bahwa eksistensi/keberadaan Museum Samparaja Bima mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Sehingga penjaga Museum merasa bangga melayani para pengunjung yang datang setiap saat karena dengan adanya pengelolaan Museum Samparaja di Kelurahan monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, yaitu hanya kurangnya perhatian dari pemerintahan Kota Bima dalam pelaksanaan perbaikan atap Museum Samparaja.

Pelaksanaan eksistensi/keberadaan Museum Samparaja kelurahan monggonao mengalami kendala dalam memperbaiki atap dan sebagainya dalam hal untuk membangun kehidupan masa depan yang akan datang dengan jalan menyampaikan/ menyatakan yang sebenarnya yang terjadi pada masa Museum Samparaja.

Kendala yang sangat mendasar adalah pemerintah dan masyarakat setempat agar

membangun kesadaran diri masing-masing dalam memperbaiki Museum Samparaja supaya tetap kokoh dan berdiri tegap untuk mendatangkan para wisatawan dan menarik perhatian pengunjung lainnya .

**Solusi yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditemukan apakah ada Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Pariwisata Museum Samparaja Kota Bima NTB.**

Setiap kendala-kendala yang dihadapi tentunya perlu dicari solusi. Sehingga Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata Museum Samparaja mengalami perkembangan dari tahun-ketahun dengan baik dan harapannya dapat memberikan masukan bagi pendataan masyarakat dan daerah Kota Bima khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dianalisis oleh peneliti tentang mengembangkan pariwisata Museum Samparaja melalui Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja Bima Dalam Mengembangkan Pariwisata di Kota Bima. Peneliti menggali informasi-informasi kepada informan mengenai apa saja kendala-kendala pengembangan pariwisata Museum Samparaja melalui Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja Bima dalam Mengembangkan Pariwisata di Kota Bima.

Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang muncul baik masyarakat Bima, di luar Bima yang tidak di dalam pengembangan Partisipasi Masyarakat Bima dalam ingin agar pembangunan tersebut berjalan lancar melalui Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja dalam mengembangkan, wisatawan local maupun manca Negara. Dan kita harus mengurangi dampak pariwisata Museum agar makin maju dan jaya terus sepanjang masa kita

harus kompak dan bersatu dalam membangun Museum Samparaja menjadi Museum yang berkembang setiap tahunnya dan selalu di kunjungi Bima Dalam Mengembangkan Pariwisata di Kota Bima.

Solusi yang di ambil untuk mengatasi masalah yang muncul dalam mengembangkan pariwisata Museum Samparaja Bima yaitu, menjadwalkan hal-hal yang berkaitan dengan dijadikanya Museum Samparaja Bima di bukanya hari apa saja, jam berapa waktu berkunjung ke Museum dan tarif harga masuk mulai dari anak-anak hingga dewasa dengan begitu semua akan terasa terjadwal. Solusi yang diambil untuk mengatasi masalah yang muncul dalam mengembangkan pariwisata Museum kepada seluruh masyarakat yang masih belum tau dan memahami apa itu pariwisata itu sendiri pemerintah harus segera bertindak supaya bisa mencegah hal-hal yang tidak di inginkan.

Berdasarkan solusi tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang muncul dalam mengembangkan pariwisata Museum samparaja kita sebagai masyarakat Rabang ngodu yang bekerja sebagai ojek termasuk ikut berpartisipasi dalam rangka meramaikan obyek wisata karena itu mengantar pengunjung pulang-pergi dan pemerintah serta masyarakat harus bertindak untuk pelestarian Museum Samparaja Bima agar menjadi tempat wisata yang ramai di kunjung local maupun inter local dan betah berwisata di Bima apa lagi di Museum Samparaj Bima yang keindahan dan keasliannya masih terjaga dan terawat sampai sekarang ini.

## **SIMPULAN**

Museum Samparaja Bima dimulai dari Abad ke-14 sampai pertengahan abad ke -20 ( 1957 ) adalah kerajaan kesultanan

yang berpemerintahan sendiri (Swaparaja) dibawah pimpinan seorang Raja/Sultan. Dari perjalanan patut dijaga dan dipelihara dengan baik jangan sampai hilang atau punah sama sekali. Salah satu diantaranya adalah naskah-naskah. Naskah tersebut berisi catatan-catatan sejarah, keputusan-keputusan pemerintah kerajaan, falsahah, tata tertib hukum masyarakat dan segala aspek kehidupan sosial hasil budaya dari masyarakat Bima, yang keadaannya sangat dikhawatirkan akan punah. Museum Samparaja selain sebagai sarana untuk menyimpan benda-benda budaya dan bersejarah, juga memperagakan berbagai macam pakaian-pakaian adat Bima semasa Kesultanan dan pakaian pangkat-pangkat adat, pakaian upacara-upacara adat, pakaian pengantin dan pakaian anak-anak, perak serta barang-barang keramik lama.

Museum ini juga di pergunakan untuk latihan tari-tarian klasik bima yang sudah hampir punah, di samping itu juga berfungsi sebagai sumber informasi penelitian atau pengkajian kebudayaan Bima dengan terkumpulnya naskah-naskah bersejarah dan tulisan - tulisan yang mengungkap masalah budaya.

Dalam hal ini tidak hanya pengelolaan saja yang memiliki potensi akan tetapi masyarakat juga sangat berperan karena perkembangan obyek wisata akan bias terjadi apabila masyarakat ikut serta dalam partisipasi dalam proses pengelolaanya. Seperti yang di ungkapkan oleh pegawai Museum Samparaja yang mengatakan bahwa:” Masyarakat ikut serta terlibat dalam proses pengelolaan setelah kemerdekaan atau sejak Eksistensi/keberadaan Museum Samparaja Bima dalam mengembangkan pariwisata di Kota Bima.

Setiap obyek wisata memiliki daya tarik tersendiri begitu juga obyek wisata Museum Samparaja Bima. Salah satu daya tarik obyek wisata Museum Samparaja adalah keindahan yang masih alami, asli, dan bangunanya yang unik. Untuk menjadikan obyek wisata menjadi berkembang kerah yang lebih baik maka diperlukan proses pengelolaan obyek wisata. Obyek wisata Museum Samparaja Bima dipegang oleh Hj. Siti Maryam R. Salahuddin. Disini masyarakat sangatlah penting, keterlibatan masyarakat itu bisa dilihat ketika mereka ikut gotong royong memperbaiki atap rumah-rumah yang sudah akan punah.

Eksitesni/keberadaan Museum Samparaja di Kelurahan Monggono Kota Bima, yaitu merupakan salah satu bukti sejarahan dan dampaknya sangat baik untuk para masyaralat Bima keseluruhan bisa tau perjalanan dan eksistensi suatu Museum Samparaja Bima hingga sekarang tapi sayang kurangnay infomasih dari pemerintah Bima jadi banyak yang tidak tau berdirinya Museum Samparaja.

Pendapat Staf, berbeda dengan yang di sampaikan oleh Ibu Aisyah selaku penjaga Museum Samparaja Kota Bima, dengan tegas mengatakan dampak eksistensi/ keberadaan Museum Samparaja Bima ini. dalam pengembangan Partisipasi Masyarakat Bima dalam inginkan agar pembangunan tersebut berjalan lancar melalui Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja dalam mengembangkan, wisatawan local maupun manca Negara. Dan kita harus mengurangi dampak pariwisata Museum agar makin maju dan jaya terus sepanjang masa kita harus kompak dan bersatu dalam membangun Museum Samparaja menjadi Museum yang berkembang setiap tahunya dan selalu di kunjungi Bima dalam Mengembangkan Pariwisata di Kota Bima.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Karyono A, Hari 1997: 11, *Kepariwisataan*, Jakarta: Grasindo
- Moleong, 2002, *Metode Penelitian*, Rejama Rosda Karya, Jakarta
- Munandar, Agus Aris, 2001, *Wisata Sejarah, Makalah Disampaikan Dalam Penataran Tenaga Teknis Bidang Kesejahteraan Bogor*
- Muljadi, A.J, 2003, *Pengertian pariwisata, pusat pendidikan dan Pelatihan Kebudayaan dan Pariwisata.*
- Soekardijo , R.G, 2002: 1, *Anatomi Pariwisata*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Usman, Dr, Suyanto, 2004: 53, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Siti Maryam R. Salahuddin Mukhlis, 2007. *Katalog Naskah Bima* Yogyakarta: Lenge Pritika
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi penelitian sosioial dan pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zuriah, Nurul. 2000. *Modul Mata Kuliah Penelitian Pendidikan dan Penulisan Karya Ilmiah*. Progam Akta Mengajar FKIP-UMM Malang.
2014. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekertariat Jendralm MPR RI

## **PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI KOTA MALANG**

**Muhammad Hidayansyah, Trisakti Handayani, M. Syahri**  
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia  
Email: [dayatkonte2010@gmail.com](mailto:dayatkonte2010@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan acara lima tahun sekali yang dilaksanakan di Indonesia, kegiatan ini sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik, dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Malang, selain itu untuk mengetahui peran KPU Kota Malang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014, dan untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Penelitian ini menggunakan Model penelitian deskriptif, yaitu suatu model penelitian dengan mencatat, mendeskripsikan dan menginterpretasikan peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum prseiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang, dan penelitian ini menggunakan tiga tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilih umum presiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang sangat besar. Artinya ini sesuai dengan realitas dan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa tahun 2014 partisipasi masyarakat Kota Malang sangat meningkat. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dan observasi kepada pemerintahan Kota Malang, Partai Politik dan Masyarakat Kota Malang, selain itu hal yang paling mendukung adalah hasil perhitungn suara di Kota Malang, menunjukkan sebanyak 70% masyarakat Kota Malang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 d Kota Malang.

**Kata Kunci :** Peran KPU, Partisipasi Masyarakat.

### **ABSTRACT**

General election for president and vice president is an event held every five years in Indonesia. This is a program which is used for channeling the aspirations of all communities, especially in influencing political decisions. This study aims to determine the role and participation of Malang communities in the presidential and vice presidential elections 2014. Besides, this study also aims to determine the role of General Elections Commission (KPU) of Malang in general election of president and vice president in 2014, and to explain the enabling and inhibiting factors of communities' participation in the election of president and vice president in 2014. The approach used in this study is descriptive study, which is a study model by noting, describing and interpreting the role of KPU in increasing the communities' political participation in the elections of president and vice president 2014 in Malang. This study uses three methods in collecting the data. They are interview, documentation, and observation. Based on the result of the study, it can be concluded that the General Elections Commission has a big role in increasing communities' political participation in the elections of president and vice president 2014 in Malang. This means that it corresponds to the reality and the facts which occurred, that in 2014 the participation of Malang communities greatly increased. This is supported by the results of the interviews and observations to the government of Malang, Political Parties in Malang and also Malang communities. Besides, the most favorable case is the

result of vote counting in Malang which shows as much as 70% of people in Malang participated in the elections for president and vice president 2014 in Malang.

**Key words:** Role of the General Elections Commissions, Communities Participations

## PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan Negara tersebut. Demokrasi merupakan hak rakyat untuk memilih pemimpin yang di inginkan oleh rakyat itu sendiri, seperti yang tertera di dalam Undang-undang Dasar Negara Repeublik Indonesia Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Di tinjau dari pasal 1 ayat 2, bisa disimpulkan bahwa Demokrasi merupakan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk memilih dan menentukan Pemimpin yang mereka inginkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam melakukan pemilihan untuk menentukan seorang pemimpin tidaklah muda, maka dari itu di Indonesia sudah mengatur tentang bagaimana memilih seorang pemimpin yaitu dengan cara pemelihan umum (PEMILU).

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilkasanalan secara langsung, Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang asas penyelenggaraan pemilu..

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat menjadi KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksnakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, selanjutnya disingkat KPUD, adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di tingkat kota/kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di tingkat kabupaten/kota berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007. Pemilu merupakan instrument pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara. Pemilu sebagai penyaluran atas hak asasi manusia karena merupakan legalitas dan legitimasi politik dalam demokrasi modern. Dalam Negara yang mempunyai penduduk besar, demokrasi merupakan sistem perwakilan yang dipilih lewat pemilu dan peserta pemilu dapat secara kelembagaan (Parpol) atau perorangan. Indonesia merupakan Negara terbesar yang memilih pemimpin dengan cara pemilihan umum, seperti tertera di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22 E ayat 3 yang berbunyi “ Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311). Pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden baru saja dilaksanakan di



Indonesia yaitu pada tanggal 09 Juli 2014 yang dimenangkan pasangan calon Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai presiden periode 2014-2019. Pemilihan umum ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota Malang Propinsi Jawa Timur. Khusus Kota Malang suara tertinggi diraih oleh calon presiden nomor urut 2 yaitu presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla dan sekarang sudah menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode tahun 2014-2019. Kemenangan yang di raih oleh Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla tidak lepas dari kerja keras tim dan partai, dan khusus daerah Kota Malang suara terbanyak diraih oleh calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla.

Pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia tidak lepas dari kerjasama tim yang di pusat dan di setiap daerah termasuk di daerah Kota Malang dengan berhasilnya PEMILU tahun 2014, KPU Kota Malang mempunyai peran penting sehingga pemilihan umum (PEMILU) tahun 2014 bisa berjalan dengan baik, dan dilihat dari pemilihan Presiden dan wakil presiden dari tahun 2004 dan 2009 partisipasi masyarakat Kota Malang sangatlah rendah, sedangkan pada saat pemilihan presiden tahun 2014 partisipasi masyarakat Kota Malang sangat tinggi. Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan di atas maka presentase respon masyarakat Kota Malang terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden di tahun 2014 adalah 70 %, dengan presentase tersebut maka masyarakat Kota Malang sudah mengerti dan mengetahui bagaimana menjadi warga Negara yang baik yaitu salah satunya adalah dengan cara memilih presiden dan wakil presiden.

Penyelenggaraan pemilihan Prsiden dan wakil Prseiden menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden mempunyai tahapan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi : Penyusunan daftar Pemilih, Pendaftaran bakal Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Masa Kampanye, Masa tenang, Pemungutan dan penghitungan suara, Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengucapan sumpah/janji Presiden **dan Wakil Presiden.**

Pemilihan umum (PEMILU) selalu menjadi kegiatan yang selalu diminati oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, berdasarkan penjelasan diatas bahwa di Kota Malang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 tingkat partisipasih masyarakatnya sangat meningkat dibandingkan tahun 2004 dan 2009, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Malang, karena melihat pertisipasi masyarakat yang sangat tinggi, maka peneliti ingin mengetahui apakah meningkatnya partisipasi politik masyarakat di Kota Malang meningkatnya karena peran dari KPU Kota Malang atau meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Malang karena ada faktor faktor lain seperti peran partai politik, dll.

## **METODE**

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian deskriptif yang bertujuan membuat paparan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu secara harfiah, penelitian deskriptif

merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 2000:18-19).

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, maksudnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi melalui pendekatan kualitatif akan didapatkan data deskriptif artinya tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data melalui analisa dan interpretasi tentang data tersebut, data-data yang diperoleh secara tertulis dan lisan.

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Definisi kata sebenarnya memiliki kemiripan dan definisi informasi, hanya informasi lebih ditonjolkan aspek materi (Bungin, 2001:123). Sumber data merupakan salah satu yang penting dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu harus memahami sumber data yang diperoleh dari para informan (Bungin, 2001:129). Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan kompeten dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik bertujuan memilih secara acak siapa yang dijadikan informan karena informan yang dipilih harus mengerti dan memahami masalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Malang.

Pemilihan umum merupakan kegiatan terbesar yang 5 tahun sekali dilaksanakan

di Indonesia, kegiatan Nasional ini melibatkan seluruh Elemen masyarakat, dan melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan umum Presiden dan wakil presiden adalah suatu pesta rakyat yang terbesar di Indonesia, karena melibatkan semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marouke, pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 kemarin memenangkan calon pasangan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2014-2019.

Melihat dari hasil Pemilihan Umum 9 Juli 2014, terkait dengan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam Pemilihan Umum dapat dikatakan sangat baik, dikarenakan partisipasi masyarakat Kota Malang tahun 2014 meningkat di bandingkan tahun 2009, ini dikarenakan kerjasama seluruh pihak, dari KPU, Partai Politik, Pemerintahan Kota Malang, TNI, Polisi, dan Masyarakat Kota Malang. Meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Malang sangat berpengaruh besar terhadap hasil suara yang menentukan Prseiden dan Wakil Presiden 2014-2009.

Partisipasi masyarakat mempunyai peningkatan yang sangat signifikan dan tolak ukur partisipasi politik masyarakat dilihat dari jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan umum kemarin, dengan melihat partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maka masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pemilihan umum, ini di karenakan masyarakat merupakan suatu system yang mempunyai hubungan-hubungan yang ditata dan masyarakat merasa

mempunyai identitas atau hak yang sama dalam mengikuti pemilihan umum, hal ini seperti yang dijelaskan oleh *Robert M. McIver* dalam Budiardjo (2009:46) masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Sementara itu, *Koentjaraningrat* mengatakan “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Hal ini juga seperti yang di jelaskan oleh Ketua Devisi Sosialisasi, Organisasi dan Hubungan antar Lembaga KPU Kota Malang.

Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa untuk melihat partisipasi politik masyarakat Kota Malang yang menjadi tolak ukur adalah jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan umum 2014 kemarin, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat besar dalam menentukan presiden dan wakil presiden 2014-2019, dan dari hasil Observasi tercatat masyarakat Kota Malang yang ikut berpartisipasi pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sebanyak 459.506, dan dari data tersebut sebanyak 453.099 masyarakat Kota Malang yang mempunyai suara sah, dan 6.407 suara tidak sah. Dalam pemilihan umum, masyarakat menjadi objek utama karena masyarakatlah yang mempunyai hak memilih dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Masyarakat Kota Malang sebagian besar sudah mengerti dan faham mengenai pemilihan umum, hal ini terlihat dari hasil observasi dan dari hasil wawancara kepada informan yang sebagian besar adalah masyarakat Kota Malang, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi, untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Perilaku memilih merupakan realitas sosial politik, dari berbagai ragam masyarakat di Kota Malang, sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita, dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum, dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye.

Masyarakat ikut memilih calon presiden dan wakil presiden karena mereka ingin mempunyai calon presiden dan wakil presiden yang bisa menepati janji-janjinya dan bisa mensejahterakan masyarakat. Figur calon presiden dan wakil presiden bisa mempengaruhi masyarakat, karena masyarakat bisa melihat dan menilai dengan

sendirinya calon yang mereka inginkan, selain itu juga visi dan misi para calon juga bisa menjadikan salah satu alasan bagi masyarakat untuk ikut memilih sehingga tingkat partisipasi masyarakat Kota Malang semakin meningkat dalam pemilihan umum visi dan misi menjadi tolak ukur untuk menjadi calon pemimpin, selain itu juga masyarakat juga pasti mengetahui bagaimana perilaku calon pemimpin, dengan demikian maka masyarakat Kota Malang sebelum memilih calon presiden dan wakil presiden masyarakat harus benar-benar jeli dalam melihat dan mengamati calon presiden dan wakil presiden yang diinginkan oleh mereka.

Masyarakat Kota Malang sebagian besar mempunyai respon yang baik akan kegiatan pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun ini, karena dalam pemilihan masyarakat bebas memilih calon pemimpin yang mereka inginkan, hal ini seperti yang di sampaikan oleh Sekertaris DPC PDIP Kota Malang yang sekaligus anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019.

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden di perlukan adanya dukungan dari semua elemen masyarakat, selain masyarakat Partai Politik juga melakukan dukungan dan bekerja sama dengan KPU Kota Malang guna berjalannya pemilihan umum dengan baik dan aman di Kota Malang, hal ini seperti hasil wawancara di atas bahwa peran partai politik sangat membantu KPU dalam melakukan sosialisasi, meskipun sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik untuk mempromosikan calon presidenya sendiri, tetapi dengan cara itu masyarakat bisa mengetahui tentang pemilihan umum dan tata cara pencoblosan.

Pemilihan umum adalah tanggung jawab besar bagi KPU, maka dari itu KPU tidak bisa melaksanakan kegiatan ini

dengan sendiri karena KPU pasti membutuhkan banyak bantuan dari semua pihak terutama pihak partai politik. Melihat kerjasama yang baik antar KPU dan partai politik, ini yang membuat pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 bisa berjalan dengan baik khususnya di Kota Malang, dari hasil observasi dan pengamatan pada pemilihan umum tidak ada konflik yang berkepanjangan antaran partai politik dan KPU, dan tidak ada konflik antar sesama partai politik di Kota Malang, selain itu agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, respon masyarakat Kota Malang yang sangat baik, dari informasi yang di dapatkan dilapangan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 hampir tidak ada Money Politik, dari hasil wawancara dengan masyarakat, hampir semuanya mengatakan tidak menenrma edaran uang politik

Praktek dari Money Politik dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain seperti distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *ilegal*, dan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.

Dari sisi waktunya, praktik Money Politik di negara ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahapan-tahapan yakni pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa

kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi karena masyarakat sangat gampang di hasut atau di pengaruhi oleh orang lain maupun oknum-oknum politik lainnya, maka dari masyarakat harus jeli dan harus bisa menolak money politik yang datang dalam bentuk apapun yang di berikan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Karena peran masyarakat sangat besar dalam pemilihan umum, karena objek dalam pemilihan umum adalah masyarakat, tetapi terkadang hak mereka dibeli atau di bayar dengan uang oleh para calon pemimpin, tetapi dari penjelasan informan yang di wawancara, masyarakat Kota Malang tidak ada yang menerima uang money politik.

Praktek Money Politik atau yang lajimi di kenal dengan Politik Uang, kerap terjadi di negeri ini pada setiap yang namanya Pemilihan, baik itu dikalangan Partai Politik/ Organisasi Masya/kepemudaan, maupun pemilihan dalam lingkaran pemerintahan, mulai dari tingkat Kepala Lingkungan/ Kepala Desa, sampai kepada Pemilihan Kepala Daerah dan Calon Anggota Legeslatif/ bahkan sampai kepada tahap pemilihan kepala Negara.

Walaupun praktek Politik Uang yang di jalankan/di lakukan oleh para calon yang akan di pilih, namun amatlah sukar untuk membuktikannya. Seperti apa yang di katakan Oleh Riyas Rasyit penggagas Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa Money Politik itu ibarat kentut. Yang tercium hanya baunya, namun untuk membuktikan siapa yang kentut sangatlah sukar. Karena bagaimanapun sipenerima uang dari calon yang akan di pilih tidak akan berani untuk buka mulut, di sebabkan ada nya Undang undang yang mengatur,

sipemberi dan sipenerima sama sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara, tetapi dari hasil observasi dan wawancara bahwa masyarakat Kota Malang hampir 70% tidak ada yang menerima suap atau menerima edaran money politik yang dilakukan beberapa oknum pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 kemarin. Secara garis besar pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 masyarakat Kota Malang memilih sesuai dengan keinginan dan kemauan hati, karena masyarakat Kota Malang bersih dari money politik.

#### **Peran KPU Kota Malang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.**

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2014 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum, yaitu 1945, 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Akan tetapi pemilihan pada tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang dianggap istimewa karena ditengah suasana kemerdekaan yang masih tidak stabil Indonesia melakukan PEMILU, bahkan dunia internasional memuji pemilu pada tahun tersebut. Pemilihan umum berlangsung dengan terbuka, jujur dan fair, meski belum ada sarana komunikasi secanggih pada saat ini atau pun jaringan kerja KPU, tetapi saat ini KPU mempunyai peran yang sangat penting dan sangat besar dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil prsiden di Indonesia

Peran KPU sangat besar, karena dengan adanya KPU maka kegiatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden bisa berjalan dengan baik, bisa bergerak cepat bahkan bisa menyatukan masyarakat Indonesia dari sabang sampai marouke, semuanya dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam

menentukan presiden dan wakil presiden Indonesia. Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar terwujudnya tujuan utama pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil kepada para pemilih. Maka peran KPU menjadi salah satu tonggak utama dalam mengsucceskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014.

Peran KPU Kota Malang dalam pemilihan umum tahun 2014 sangat besar, sehingga tingkat partisipasi masyarakat di Kota Malang sangat meningkat, peran KPU bukan hanya sekedar penyelenggara tetapi sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa menjadi pemilih yang baik dalam pemilihan umum 2014. Selain itu peran KPU juga adalah menyediakan dan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan pemilihan umum, KPU mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan kegiatan ini, peran penting KPU lah yang bisa membawa system demokrasi di Indonesia semakin baik, karena dengan kinerja KPU yang baik dan jujur, maka masyarakatpun bisa leluasa memberikan hak mereka dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh KPU Kota Malang, dari menyediakan layanan bagi masyarakat sampai dengan melakukan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang di lapangan, dan sebagaimana dokumen berikut ini, yang menjelaskan bagaimana peran KPU Kota Malang.

Pemilihan umum merupakan kerja keras KPU dalam melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi kerja keras KPU Kota Malang harus di topan dengan partisipasi masyarakat Kota Malang, dari beberapa informan yang di wawancarai, memang masyarakat Kota Malang mengetahui tentang politik, tentang tata cara pencoblosan itu melalui sosialisasi dari KPU Kota Malang, sehingga masyarakat mengerti dan memahami tentang pencoblosan. Seperti yang di utarakan oleh salah satu informan yang telah di wawancarai, mereka mengaku mendapat info dari KPU ketika KPU melakukan sosialisasi, karena dari pihak KPU melakukan sosialisasi bukan hanya bertatap muka tetapi KPU bersosialisasi melalui beberapa media seperti TV, Koran, Radio.

Strategi yang dilakukan oleh KPU adalah strategi yang sangat bagus, karena KPU melakukan sosialisasi bukan hanya dengan satu cara, tetapi KPU melakukan sosialisasi dengan berbagai cara dari bersosialisasi bertatap muka sampai dengan Panflet, baliho, dll. Segala cara yang dilakukan oleh KPU Kota Malang untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Malang hal ini lah yang membuat peran KPU Kota Malang semakin baik karena dengan adanya peran KPU masyarakat Kota Malang semakin tau dan semakin mengerti akan hak dan kewajiban mereka sebagai rakyat Indonesia, dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU maka masyarakat Kota Malang semakin mengerti akan tentang pemilihan umum. Dari berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh KPU salah satu yang sangat menunjang agar peran masyarakat meningkat, KPU melakukan beberapa hal seperti dengan dokumen berikut ini, yang dimana KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain bersosialisasi, peran KPU adalah memberikan ruang kepada partai politik untuk melakukan sosialisasi, karena KPU juga bekerja sama dengan semua pihak untuk melaksanakan dan melancarkan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, dengan kerjasama dengan semua pihak maka pemilihan umum bisa berjalan dengan baik, pekerjaan KPU bukan hanya mengsucceskan pemilihan umum 2014, tetapi juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi harus di akui oleh KPU bahwasanya peran partai politik juga sangat besar dalam hal pemilihan umum.

Peran KPU Kota Malang sangat besar, selain dari berbagai sosialisasi yang dilakukan KPU juga menjalin kerja sama dengan beberapa pihak dari pemerintahan sampai dengan partai politik, selain pemerintah dan partai politik, KPU juga bekerjasama dengan pihak keamanan seperti Kepolisian dan TNI, kerjasama ini sangat berguna karena pemilihan umum rentang akan kehilangan suara, kerusakan, TPS, demo atau berbagai macam masalah lainnya. Dari hasil observasi dan dokumen yang di dapatkan keberadaan pihak keamanan sangat di perlukan sekali,

Mengacu dari penjelasan para informan di atas, mengatakan bahwa sangat besar peran KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014, terlihat dari berbagai cara yang dilakukan oleh KPU, dari melakukan sosialisasi, sampai bekerja sama dengan Pemerintahan, partai politik dan pasti masyarakat pun ikut berpartisipasi dalam mendukung kinerja KPU terlihat banyaknya relawan relawan yang ikut membantu KPU dalam kegiatan pemilihan umum, sehingga KPU tidak bekerja sendiri, berhasilan pemilihan umum 2014 kemarin

karena kerjasama KPU Kota Malang dengan semua pihak.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat KPU Kota Malang dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.**

Banyak faktor yang membuat partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan bisa meningkat dan terkadang juga bisa menurun, tanpa terkecuali pemilihan presiden dan wakil presiden. Faktor masyarakat tidak ikut dalam pemilihan bisa jadi kurangnya informasi yang mereka terima, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya karena memilih Golput atau Apatis terhadap pemilihan karena semakin berkurangnya tingkat kepercayaan mereka terhadap pemimpinnya. Dalam suatu masyarakat terkadang usaha meningkatkan tingkat pemilihan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan tidak jauh dengan faktor penghambat dan faktor pendukungnya.

Pemilihan umum bukanlah kegiatan yang sederhana, tetapi pemilihan umum adalah suatu kegiatan yang sangat besar, kegiatan yang mencakup seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia, pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan kegiatan yang membutuhkan kerjasama yang baik, tetapi terkadang pada saat kegiatan berlangsung pasti akan ada beberapa faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam suatu kegiatan pasti ada, apalagi kegiatan Pemilu yang melibatkan hampir seluruh masyarakat Indonesia, selain itu faktor pendukung dan faktor penghambat adalah bukti nyata bahwa menjalankan kegiatan besar seperti pemilihan umum bukanlah perkara yang gampang, pasti akan ada beberapa permasalahan yang di temui dalam

melakukan kegiatan dari persoalan memilih tetap, hak suara, money politik, demo, maka dari itu dari permasalahan yang di dapatkan maka di perlukan kerjasama dengan bebrapa pihak, salah satunya adalah pihak keamanan, dari hasil wawancara dan observasi di atas maka bisa kita simpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung itu ada. Hal ini di dukung oleh gambar berikut ini.

Faktor pendukung dan faktor penghambat akan selalu ada di setiap kegiatan pemilihan umum, seperti pada saat melakukan sosialisasi tentang pemilihan umum kepada masyarakat Kota Malang. Faktor pendukung dan faktor penghambat selalu menjadi bahan evaluasi yang selalu dilakukan dalam setiap kegiatan, karena Faktor pendukung dan faktor penghambat adalah bagian yang tidak bisa kita lupakan atau kita hapus, Faktor pendukung dan faktor penghambat menjadi bagian yang penting pada saat kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Dari hasil observasi, mengacu dari hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan di berbagai informan, faktor pendukung dan faktor penghambat selalu menjadi titik perhatian, karena itu bisa menjadi bahan evaluasi kembali dan faktor pendukung dan faktor penghambat akan selalu ada di setiap kegiatan yang kita lakukan.

## **SIMPULAN**

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang sangat baik, bahkan sangat meningkat di bandingkan partisipasi pada tahun tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari meningkatnya partisipasi mencapai 70%, sedangkang tingkat Golput semakin menurun yaitu 30%, hal ini menandakan bahwa masyarakat Kota Malang sudah mengerti dan memahami

tentang politik dan sudah mengerti bagaimana mencoblos, dan sudah memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

Peran KPU Kota Malang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 sangat besar, karena KPU merancang kegiatan dengan baik, dari sosialisasi, pengurusan data, sampai hari H pencoblosan, semua dilakukan oleh KPU guna meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam pemilihan umum 2014, peran KPU Kota Malang mempunyai dampak positif terhadap partisipasi masyarakat Kota Malang sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari paertisipasi masyarakat Kota Malang pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014.

Faktor pendukung dan faktor penghambat KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Kota Malang sangat beragam dari faktor pendukung, seperti banyaknya masyarakat yang ingin menjadi relawan dalam pemilihan umum presiden dan wakil preiden 2014, selain itu adanya kerja sama KPU Kota Malang dengan Pemerintahan Kota Malang, Partai Politik, TNI, Polri, dan juga kerja sama dengan masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya terdiri dari beberapa faktor seperti faktor teknis, faktor dana yang di alokasikan kepada KPU untuk menjalankan kegiatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, selain itu juga faktor data masyarakat yang berpindah penduduk, dan faktor sosialisasi yang sedikit kurang berjalan baik di karenakan masalah dana dan masalah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan, dengan kesimpulan



yang sudah tertera di atas, melalui banyak pertimbangan dari hasil penelitian yang di lakukan dan ada beberapa saran yang ingin di sampaikan yaitu: Diharapkan kepada masyarakat Kota Malang untuk meningkatkan lagi pengetahuan tentang politik, tentang menjadi masyarakat yang baik dan benar tanpa harus golput apalagi menerima uang dari pihak mana pun demi membeli hak suara anda, pemilu harus melatih seluruh masyarakat di Indonesia untuk tetap jujur, untuk tetap semangat mengikuti pemilihan umum yang dimana dilakukan lima tahun sekali yang diperuntukan untuk masyarakat, maka ikutilah agar masyarakat bisa menentukan pemimpin untuk indoneia kedepannya.

Bagi KPU Kota Malang semoga kedepannya lebih bagus lagi dalam melakukan tugas dan kewajiban guna meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Malang, dan lakukanlah sosialisasi bukan hanya di daerah Kota saja, tetapi juga di daerah daerah pinggir Kota, dan juga jangan sampai ada masyarakat Kota Malang yang tidak mengikuti pemilihan presiden maupun pemilihan pemilihan yang lainnya. Semoga untuk kedepanya masyarakat dan KPU Kota Malang bisa bekerja sama dengan baik, dan juga kerja sama dengan pihak pihak yang lain seperti Pemerintahan, Partai Politik, Polri dan TNI, dan semoga di pemilihan umum yang akan datang partisipasi masyarakat semakin meningkat, dan kinerja KPU semakin baik lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo. Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin. Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga university Press.

Undang-undang Dasar Negara Repeublik Indonesia Pasal 1 ayat 2.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22 E ayat 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Repubilik Indonesia pasal 10 ayat 2 Nomor 22 Tahun 2007.

## **PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI KOTA MALANG**

**Muhammad Hidayansyah, Trisakti Handayani, M. Syahri**

FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: [dayatkonte2010@gmail.com](mailto:dayatkonte2010@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan acara lima tahun sekali yang dilaksanakan di Indonesia, kegiatan ini sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik, dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Malang, selain itu untuk mengetahui peran KPU Kota Malang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014, dan untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Penelitian ini menggunakan Model penelitian deskriptif, yaitu suatu model penelitian dengan mencatat, mendeskripsikan dan menginterpretasikan peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum prseiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang, dan penelitian ini menggunakan tiga tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihn umum presiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang sangat besar. Artinya ini sesuai dengan realitas dan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa tahun 2014 partisipasi masyarakat Kota Malang sangat meningkat. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dan observasi kepada pememrintahan Kota Malang, Partai Politik dan Masyarakat Kota Malang, selain itu hal yang paling mendukung adalah hasil perthitungan suara di Kota Malang, menunjukkan sebanyak 70% masyarakat Kota Malang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 d Kota Malang.

**Kata Kunci :** Peran KPU, Partisipasi Masyarakat.

### **ABSTRACT**

General election for president and vice president is an event held every five years in Indonesia. This is a program which is used for channeling the aspirations of all communities, especially in influencing political decisions. This study aims to determine the role and participation of Malang communities in the presidential and vice presidential elections 2014. Besides, this study also aims to determine the role of General Elections Commission (KPU) of Malang in general election of president and vice president in 2014, and to explain the enabling and inhibiting factors of communities' participation in the election of president and vice president in 2014. The approach used in this study is descriptive study, which is a study model by noting, describing and interpreting the role of KPU in increasing the communities' political participation in the elections of president and vice president 2014 in Malang. This study uses three methods in collecting the data. They are interview, documentation, and observation. Based on the result of the study, it can be concluded that the General Elections Commission has a big role in increasing communities' political participation in the elections of president and vice president 2014 in Malang. This means that it corresponds to the reality and the facts which occurred, that in 2014 the participation of Malang communities greatly increased. This is supported by the results of the interviews and observations to the government of Malang, Political Parties in Malang and also Malang communities. Besides, the most favorable case is the

result of vote counting in Malang which shows as much as 70% of people in Malang participated in the elections for president and vice president 2014 in Malang.

**Key words:** Role of the General Elections Commissions, Communities Participations

## PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan Negara tersebut. Demokrasi merupakan hak rakyat untuk memilih pemimpin yang di inginkan oleh rakyat itu sendiri, seperti yang tertera di dalam Undang-undang Dasar Negara Repeublik Indonesia Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Di tinjau dari pasal 1 ayat 2, bisa disimpulkan bahwa Demokrasi merupakan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk memilih dan menentukan Pemimpin yang mereka inginkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam melakukan pemilihan untuk menentukan seorang pemimpin tidaklah muda, maka dari itu di Indonesia sudah mengatur tentang bagaimana memilih seorang pemimpin yaitu dengan cara pemelihan umum (PEMILU).

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilkasanalan secara langsung, Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang asas penyelenggaraan pemilu..

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat menjadi KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksnakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, selanjutnya disingkat KPUD, adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di tingkat kota/kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di tingkat kabupaten/kota berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007. Pemilu merupakan instrument pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara. Pemilu sebagai penyaluran atas hak asasi manusia karena merupakan legalitas dan legitimasi politik dalam demokrasi modern. Dalam Negara yang mempunyai penduduk besar, demokrasi merupakan sistem perwakilan yang dipilih lewat pemilu dan peserta pemilu dapat secara kelembagaan (Parpol) atau perorangan. Indonesia merupakan Negara terbesar yang memilih pemimpin dengan cara pemilihan umum, seperti tertera di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22 E ayat 3 yang berbunyi “ Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311). Pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden baru saja dilaksanakan di

Indonesia yaitu pada tanggal 09 Juli 2014 yang dimenangkan pasangan calon Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai presiden periode 2014-2019. Pemilihan umum ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota Malang Propinsi Jawa Timur. Khusus Kota Malang suara tertinggi diraih oleh calon presiden nomor urut 2 yaitu presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla dan sekarang sudah menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode tahun 2014-2019. Kemenangan yang di raih oleh Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla tidak lepas dari kerja keras tim dan partai, dan khusus daerah Kota Malang suara terbanyak diraih oleh calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla.

Pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia tidak lepas dari kerjasama tim yang di pusat dan di setiap daerah termasuk di daerah Kota Malang dengan berhasilnya PEMILU tahun 2014, KPU Kota Malang mempunyai peran penting sehingga pemilihan umum (PEMILU) tahun 2014 bisa berjalan dengan baik, dan dilihat dari pemilihan Presiden dan wakil presiden dari tahun 2004 dan 2009 partisipasi masyarakat Kota Malang sangatlah rendah, sedangkan pada saat pemilihan presiden tahun 2014 partisipasi masyarakat Kota Malang sangat tinggi. Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan di atas maka presentase respon masyarakat Kota Malang terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden di tahun 2014 adalah 70 %, dengan presentase tersebut maka masyarakat Kota Malang sudah mengerti dan mengetahui bagaimana menjadi warga Negara yang baik yaitu salah satunya adalah dengan cara memilih presiden dan wakil presiden.

Penyelenggaraan pemilihan Prsiden dan wakil Prseiden menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden mempunyai tahapan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi : Penyusunan daftar Pemilih, Pendaftaran bakal Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Masa Kampanye, Masa tenang, Pemungutan dan penghitungan suara, Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengucapan sumpah/janji Presiden **dan Wakil Presiden.**

Pemilihan umum (PEMILU) selalu menjadi kegiatan yang selalu diminati oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, berdasarkan penjelasan diatas bahwa di Kota Malang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 tingkat partisipasih masyarakatnya sangat meningkat dibandingkan tahun 2004 dan 2009, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Malang, karena melihat pertisipasi masyarakat yang sangat tinggi, maka peneliti ingin mengetahui apakah meningkatnya partisipasi politik masyarakat di Kota Malang meningkatnya karena peran dari KPU Kota Malang atau meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Malang karena ada faktor faktor lain seperti peran partai politik, dll.

## **METODE**

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian deskriptif yang bertujuan membuat paparan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu secara harfiah, penelitian deskriptif

merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 2000:18-19).

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, maksudnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi melalui pendekatan kualitatif akan didapatkan data deskriptif artinya tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data melalui analisa dan interpretasi tentang data tersebut, data-data yang diperoleh secara tertulis dan lisan.

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Definisi kata sebenarnya memiliki kemiripan dan definisi informasi, hanya informasi lebih ditonjolkan aspek materi (Bungin, 2001:123). Sumber data merupakan salah satu yang penting dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu harus memahami sumber data yang diperoleh dari para informan (Bungin, 2001:129). Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan kompeten dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik bertujuan memilih secara acak siapa yang dijadikan informan karena informan yang dipilih harus mengerti dan memahami masalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Malang.

Pemilihan umum merupakan kegiatan terbesar yang 5 tahun sekali dilaksanakan

di Indonesia, kegiatan Nasional ini melibatkan seluruh Elemen masyarakat, dan melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan umum Presiden dan wakil presiden adalah suatu pesta rakyat yang terbesar di Indonesia, karena melibatkan semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marouke, pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 kemarin memenangkan calon pasangan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2014-2019.

Melihat dari hasil Pemilihan Umum 9 Juli 2014, terkait dengan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam Pemilihan Umum dapat dikatakan sangat baik, dikarenakan partisipasi masyarakat Kota Malang tahun 2014 meningkat di bandingkan tahun 2009, ini dikarenakan kerjasama seluruh pihak, dari KPU, Partai Politik, Pemerintahan Kota Malang, TNI, Polisi, dan Masyarakat Kota Malang. Meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Malang sangat berpengaruh besar terhadap hasil suara yang menentukan Prseiden dan Wakil Presiden 2014-2009.

Partisipasi masyarakat mempunyai peningkatan yang sangat signifikan dan tolak ukur partisipasi politik masyarakat dilihat dari jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan umum kemarin, dengan melihat partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maka masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pemilihan umum, ini di karenakan masyarakat merupakan suatu system yang mempunyai hubungan-hubungan yang ditata dan masyarakat merasa

mempunyai identitas atau hak yang sama dalam mengikuti pemilihan umum, hal ini seperti yang dijelaskan oleh *Robert M. McIver* dalam Budiardjo (2009:46) masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Sementara itu, *Koentjaraningrat* mengatakan “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Hal ini juga seperti yang di jelaskan oleh Ketua Devisi Sosialisasi, Organisasi dan Hubungan antar Lembaga KPU Kota Malang.

Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa untuk melihat partisipasi politik masyarakat Kota Malang yang menjadi tolak ukur adalah jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan umum 2014 kemarin, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat besar dalam menentukan presiden dan wakil presiden 2014-2019, dan dari hasil Observasi tercatat masyarakat Kota Malang yang ikut berpartisipasi pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sebanyak 459.506, dan dari data tersebut sebanyak 453.099 masyarakat Kota Malang yang mempunyai suara sah, dan 6.407 suara tidak sah. Dalam pemilihan umum, masyarakat menjadi objek utama karena masyarakatlah yang mempunyai hak memilih dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Masyarakat Kota Malang sebagian besar sudah mengerti dan faham mengenai pemilihan umum, hal ini terlihat dari hasil observasi dan dari hasil wawancara kepada informan yang sebagian besar adalah masyarakat Kota Malang, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi, untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Perilaku memilih merupakan realitas sosial politik, dari berbagai ragam masyarakat di Kota Malang, sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita, dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum, dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye.

Masyarakat ikut memilih calon presiden dan wakil presiden karena mereka ingin mempunyai calon presiden dan wakil presiden yang bisa menepati janji-janjinya dan bisa mensejahterakan masyarakat. Figur calon presiden dan wakil presiden bisa mempengaruhi masyarakat, karena masyarakat bisa melihat dan menilai dengan

sendirinya calon yang mereka inginkan, selain itu juga visi dan misi para calon juga bisa menjadikan salah satu alasan bagi masyarakat untuk ikut memilih sehingga tingkat partisipasi masyarakat Kota Malang semakin meningkat dalam pemilihan umum visi dan misi menjadi tolak ukur untuk menjadi calon pemimpin, selain itu juga masyarakat juga pasti mengetahui bagaimana perilaku calon pemimpin, dengan demikian maka masyarakat Kota Malang sebelum memilih calon presiden dan wakil presiden masyarakat harus benar-benar jeli dalam melihat dan mengamati calon presiden dan wakil presiden yang diinginkan oleh mereka.

Masyarakat Kota Malang sebagian besar mempunyai respon yang baik akan kegiatan pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun ini, karena dalam pemilihan masyarakat bebas memilih calon pemimpin yang mereka inginkan, hal ini seperti yang di sampaikan oleh Sekertaris DPC PDIP Kota Malang yang sekaligus anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019.

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden di perlukan adanya dukungan dari semua elemen masyarakat, selain masyarakat Partai Politik juga melakukan dukungan dan bekerja sama dengan KPU Kota Malang guna berjalannya pemilihan umum dengan baik dan aman di Kota Malang, hal ini seperti hasil wawancara di atas bahwa peran partai politik sangat membantu KPU dalam melakukan sosialisasi, meskipun sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik untuk mempromosikan calon presidenya sendiri, tetapi dengan cara itu masyarakat bisa mengetahui tentang pemilihan umum dan tata cara pencoblosan.

Pemilihan umum adalah tanggung jawab besar bagi KPU, maka dari itu KPU tidak bisa melaksanakan kegiatan ini

dengan sendiri karena KPU pasti membutuhkan banyak bantuan dari semua pihak terutama pihak partai politik. Melihat kerjasama yang baik antar KPU dan partai politik, ini yang membuat pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 bisa berjalan dengan baik khususnya di Kota Malang, dari hasil observasi dan pengamatan pada pemilihan umum tidak ada konflik yang berkepanjangan antaran partai politik dan KPU, dan tidak ada konflik antar sesama partai politik di Kota Malang, selain itu agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, respon masyarakat Kota Malang yang sangat baik, dari informasi yang di dapatkan dilapangan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 hampir tidak ada Money Politik, dari hasil wawancara dengan masyarakat, hampir semuanya mengatakan tidak menenrma edaran uang politik

Praktek dari Money Politik dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain seperti distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *ilegal*, dan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.

Dari sisi waktunya, praktik Money Politik di negara ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahapan-tahapan yakni pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa

kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi karena masyarakat sangat gampang di hasut atau di pengaruhi oleh orang lain maupun oknum-oknum politik lainnya, maka dari masyarakat harus jeli dan harus bisa menolak money politik yang datang dalam bentuk apapun yang di berikan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Karena peran masyarakat sangat besar dalam pemilihan umum, karena objek dalam pemilihan umum adalah masyarakat, tetapi terkadang hak mereka dibeli atau di bayar dengan uang oleh para calon pemimpin, tetapi dari penjelasan informan yang di wawancara, masyarakat Kota Malang tidak ada yang menerima uang money politik.

Praktek Money Politik atau yang lajimi di kenal dengan Politik Uang, kerap terjadi di negeri ini pada setiap yang namanya Pemilihan, baik itu dikalangan Partai Politik/ Organisasi Masya/kepemudaan, maupun pemilihan dalam lingkaran pemerintahan, mulai dari tingkat Kepala Lingkungan/ Kepala Desa, sampai kepada Pemilihan Kepala Daerah dan Calon Anggota Legeslatif/ bahkan sampai kepada tahap pemilihan kepala Negara.

Walaupun praktek Politik Uang yang di jalankan/di lakukan oleh para calon yang akan di pilih, namun amatlah sukar untuk membuktikannya. Seperti apa yang di katakan Oleh Riyas Rasyit penggagas Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa Money Politik itu ibarat kentut. Yang tercium hanya baunya, namun untuk membuktikan siapa yang kentut sangatlah sukar. Karena bagaimanapun sipenerima uang dari calon yang akan di pilih tidak akan berani untuk buka mulut, di sebabkan ada nya Undang undang yang mengatur,

sipemberi dan sipenerima sama sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara, tetapi dari hasil observasi dan wawancara bahwa masyarakat Kota Malang hampir 70% tidak ada yang menerima suap atau menerima edaran money politik yang dilakukan beberapa oknum pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 kemarin. Secara garis besar pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 masyarakat Kota Malang memilih sesuai dengan keinginan dan kemauan hati, karena masyarakat Kota Malang bersih dari money politik.

#### **Peran KPU Kota Malang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.**

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2014 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum, yaitu 1945, 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Akan tetapi pemilihan pada tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang dianggap istimewa karena ditengah suasana kemerdekaan yang masih tidak stabil Indonesia melakukan PEMILU, bahkan dunia internasional memuji pemilu pada tahun tersebut. Pemilihan umum berlangsung dengan terbuka, jujur dan fair, meski belum ada sarana komunikasi secanggih pada saat ini atau pun jaringan kerja KPU, tetapi saat ini KPU mempunyai peran yang sangat penting dan sangat besar dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil prsiden di Indonesia

Peran KPU sangat besar, karena dengan adanya KPU maka kegiatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden bisa berjalan dengan baik, bisa bergerak cepat bahkan bisa menyatukan masyarakat Indonesia dari sabang sampai marouke, semuanya dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam



menentukan presiden dan wakil presiden Indonesia. Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar terwujudnya tujuan utama pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil kepada para pemilih. Maka peran KPU menjadi salah satu tonggak utama dalam mengsucceskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014.

Peran KPU Kota Malang dalam pemilihan umum tahun 2014 sangat besar, sehingga tingkat partisipasi masyarakat di Kota Malang sangat meningkat, peran KPU bukan hanya sekedar penyelenggara tetapi sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa menjadi pemilih yang baik dalam pemilihan umum 2014. Selain itu peran KPU juga adalah menyediakan dan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan pemilihan umum, KPU mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan kegiatan ini, peran penting KPU lah yang bisa membawa system demokrasi di Indonesia semakin baik, karena dengan kinerja KPU yang baik dan jujur, maka masyarakatpun bisa leluasa memberikan hak mereka dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh KPU Kota Malang, dari menyediakan layanan bagi masyarakat sampai dengan melakukan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang di lapangan, dan sebagaimana dokumen berikut ini, yang menjelaskan bagaimana peran KPU Kota Malang.

Pemilihan umum merupakan kerja keras KPU dalam melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi kerja keras KPU Kota Malang harus di topan dengan partisipasi masyarakat Kota Malang, dari beberapa informan yang di wawancarai, memang masyarakat Kota Malang mengetahui tentang politik, tentang tata cara pencoblosan itu melalui sosialisasi dari KPU Kota Malang, sehingga masyarakat mengerti dan memahami tentang pencoblosan. Seperti yang di utarakan oleh salah satu informan yang telah di wawancarai, mereka mengaku mendapat info dari KPU ketika KPU melakukan sosialisasi, karena dari pihak KPU melakukan sosialisasi bukan hanya bertatap muka tetapi KPU bersosialisasi melalui beberapa media seperti TV, Koran, Radio.

Strategi yang dilakukan oleh KPU adalah strategi yang sangat bagus, karena KPU melakukan sosialisasi bukan hanya dengan satu cara, tetapi KPU melakukan sosialisasi dengan berbagai cara dari bersosialisasi bertatap muka sampai dengan Panflet, baliho, dll. Segala cara yang dilakukan oleh KPU Kota Malang untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Malang hal ini lah yang membuat peran KPU Kota Malang semakin baik karena dengan adanya peran KPU masyarakat Kota Malang semakin tau dan semakin mengerti akan hak dan kewajiban mereka sebagai rakyat Indonesia, dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU maka masyarakat Kota Malang semakin mengerti akan tentang pemilihan umum. Dari berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh KPU salah satu yang sangat menunjang agar peran masyarakat meningkat, KPU melakukan beberapa hal seperti dengan dokumen berikut ini, yang dimana KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain bersosialisasi, peran KPU adalah memberikan ruang kepada partai politik untuk melakukan sosialisasi, karena KPU juga bekerja sama dengan semua pihak untuk melaksanakan dan melancarkan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, dengan kerjasama dengan semua pihak maka pemilihan umum bisa berjalan dengan baik, pekerjaan KPU bukan hanya mengsucceskan pemilihan umum 2014, tetapi juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi harus di akui oleh KPU bahwasanya peran partai politik juga sangat besar dalam hal pemilihan umum.

Peran KPU Kota Malang sangat besar, selain dari berbagai sosialisasi yang dilakukan KPU juga menjalin kerja sama dengan beberapa pihak dari pemerintahan sampai dengan partai politik, selain pemerintah dan partai politik, KPU juga bekerjasama dengan pihak keamanan seperti Kepolisian dan TNI, kerjasama ini sangat berguna karena pemilihan umum rentang akan kehilangan suara, kerusukan, TPS, demo atau berbagai macam masalah lainnya. Dari hasil observasi dan dokumen yang di dapatkan keberadaan pihak keamanan sangat di perlukan sekali,

Mengacu dari penjelasan para informan di atas, mengatakan bahwa sangat besar peran KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014, terlihat dari berbagai cara yang dilakukan oleh KPU, dari melakukan sosialisasi, sampai bekerja sama dengan Pemerintahan, partai politik dan pasti masyarakat pun ikut berpartisipasi dalam mendukung kinerja KPU terlihat banyaknya relawan relawan yang ikut membantu KPU dalam kegiatan pemilihan umum, sehingga KPU tidak bekerja sendiri, berhasilan pemilihan umum 2014 kemarin

karena kerjasama KPU Kota Malang dengan semua pihak.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat KPU Kota Malang dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.**

Banyak faktor yang membuat partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan bisa meningkat dan terkadang juga bisa menurun, tanpa terkecuali pemilihan presiden dan wakil presiden. Faktor masyarakat tidak ikut dalam pemilihan bisa jadi kurangnya informasi yang mereka terima, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya karena memilih Golput atau Apatis terhadap pemilihan karena semakin berkurangnya tingkat kepercayaan mereka terhadap pemimpinnya. Dalam suatu masyarakat terkadang usaha meningkatkan tingkat pemilihan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan tidak jauh dengan faktor penghambat dan faktor pendukungnya.

Pemilihan umum bukanlah kegiatan yang sederhana, tetapi pemilihan umum adalah suatu kegiatan yang sangat besar, kegiatan yang mencakup seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia, pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan kegiatan yang membutuhkan kerjasama yang baik, tetapi terkadang pada saat kegiatan berlangsung pasti akan ada beberapa faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam suatu kegiatan pasti ada, apalagi kegiatan Pemilu yang melibatkan hampir seluruh masyarakat Indonesia, selain itu faktor pendukung dan faktor penghambat adalah bukti nyata bahwa menjalankan kegiatan besar seperti pemilihan umum bukanlah perkara yang gampang, pasti akan ada beberapa permasalahan yang di temui dalam

melakukan kegiatan dari persoalan memilih tetap, hak suara, money politik, demo, maka dari itu dari permasalahan yang di dapatkan maka di perlukan kerjasama dengan bebrapa pihak, salah satunya adalah pihak keamanan, dari hasil wawancara dan observasi di atas maka bisa kita simpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung itu ada. Hal ini di dukung oleh gambar berikut ini.

Faktor pendukung dan faktor penghambat akan selalu ada di setiap kegiatan pemilihan umum, seperti pada saat melakukan sosialisasi tentang pemilihan umum kepada masyarakat Kota Malang. Faktor pendukung dan faktor penghambat selalu menjadi bahan evaluasi yang selalu dilakukan dalam setiap kegiatan, karena Faktor pendukung dan faktor penghambat adalah bagian yang tidak bisa kita lupakan atau kita hapus, Faktor pendukung dan faktor penghambat menjadi bagian yang penting pada saat kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Dari hasil observasi, mengacu dari hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan di berbagai informan, faktor pendukung dan faktor penghambat selalu menjadi titik perhatian, karena itu bisa menjadi bahan evaluasi kembali dan faktor pendukung dan faktor penghambat akan selalu ada di setiap kegiatan yang kita lakukan.

## **SIMPULAN**

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang sangat baik, bahkan sangat meningkat di bandingkan partisipasi pada tahun tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari meningkatnya partisipasi mencapai 70%, sedangkang tingkat Golput semakin menurun yaitu 30%, hal ini menandakan bahwa masyarakat Kota Malang sudah mengerti dan memahami

tentang politik dan sudah mengerti bagaimana mencoblos, dan sudah memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

Peran KPU Kota Malang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 sangat besar, karena KPU merancang kegiatan dengan baik, dari sosialisasi, pengurusan data, sampai hari H pencoblosan, semua dilakukan oleh KPU guna meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam pemilihan umum 2014, peran KPU Kota Malang mempunyai dampak positif terhadap partisipasi masyarakat Kota Malang sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari paertisipasi masyarakat Kota Malang pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014.

Faktor pendukung dan faktor penghambat KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Kota Malang sangat beragam dari faktor pendukung, seperti banyaknya masyarakat yang ingin menjadi relawan dalam pemilihan umum presiden dan wakil preiden 2014, selain itu adanya kerja sama KPU Kota Malang dengan Pemerintahan Kota Malang, Partai Politik, TNI, Polri, dan juga kerja sama dengan masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya terdiri dari beberapa faktor seperti faktor teknis, faktor dana yang di alokasikan kepada KPU untuk menjalankan kegiatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, selain itu juga faktor data masyarakat yang berpindah penduduk, dan faktor sosialisasi yang sedikit kurang berjalan baik di karenakan masalah dana dan masalah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan, dengan kesimpulan

yang sudah tertera di atas, melalui banyak pertimbangan dari hasil penelitian yang dilakukan dan ada beberapa saran yang ingin di sampaikan yaitu: Diharapkan kepada masyarakat Kota Malang untuk meningkatkan lagi pengetahuan tentang politik, tentang menjadi masyarakat yang baik dan benar tanpa harus golput apalagi menerima uang dari pihak mana pun demi membeli hak suara anda, pemilu harus melatih seluruh masyarakat di Indonesia untuk tetap jujur, untuk tetap semangat mengikuti pemilihan umum yang dimana dilakukan lima tahun sekali yang diperuntukan untuk masyarakat, maka ikutilah agar masyarakat bisa menentukan pemimpin untuk indoneia kedepannya.

Bagi KPU Kota Malang semoga kedepannya lebih bagus lagi dalam melakukan tugas dan kewajiban guna meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Malang, dan lakukanlah sosialisasi bukan hanya di daerah Kota saja, tetapi juga di daerah daerah pinggir Kota, dan juga jangan sampai ada masyarakat Kota Malang yang tidak mengikuti pemilihan presiden maupun pemilihan pemilihan yang lainnya. Semoga untuk kedepanya masyarakat dan KPU Kota Malang bisa bekerja sama dengan baik, dan juga kerja sama dengan pihak pihak yang lain seperti Pemerintahan, Partai Politik, Polri dan TNI, dan semoga di pemilihan umum yang akan datang partisipasi masyarakat semakin meningkat, dan kinerja KPU semakin baik lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo. Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin. Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga university Press.

Undang-undang Dasar Negara Repeublik Indonesia Pasal 1 ayat 2.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22 E ayat 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Repubilik Indonesia pasal 10 ayat 2 Nomor 22 Tahun 2007.

## **MODEL PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PPKn BERBASIS ANDROID DI SMPN 25 MALANG**

**Naufal Muhammad Kautsar, Nurul Zuriah, Rohmad Widodo**

FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: [naufalmk@yahoo.com](mailto:naufalmk@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kondisi kegiatan belajar dan mengajar PPKn sebelum adanya penerapan pengembangan media pembelajaran berbasis android. (2).Mengetahui pengembangan media pembelajaran berbasis IT yang ada di SMPN 25 Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian research and development. Sumber data dipilih kepala sekolah, guru kelas VIII, serta peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 25 Malang. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih memerlukan waktu 6 bulan. Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk akhir media pembelajaran berbasis aplikasi android yang disebut dengan media BENEKO Educapp. Pengembangan media dikembangkan melalui lima tahapan (analisis, design, development, implementation and evaluation). Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan pada kelas kecil dan besar. Uji coba kelas kecil dilakukan pada kelas VIII B dengan sampel random sebanyak 5 peserta didik, memperoleh hasil 82.6% , disimpulkan produk ini layak digunakan. Hasil uji coba luas dilakukan kepada kelas A, B, D. Hasil yang diperoleh 29 peserta didik kelas VIII A SMPN 25 Malang memperoleh respon dengan presentase 78,2% , disimpulkan produk ini layak untuk digunakan. Uji coba luas dilakukan kepada 28 peserta didik kelas VIII C SMPN 25 Malang memperoleh respon dengan presentase 74.7 % , disimpulkan produk ini cukup layak untuk digunakan. Uji coba luas dilakukan kepada 29 peserta didik kelas VIII D SMPN 25 Malang memperoleh respon dengan presentase 87, 6 % , disimpulkan produk ini sangat layak untuk digunakan. Terakhir uji coba lapangan dilakukan kepada guru PPKn kelas VIII SMPN 25 Malang memperoleh respon dengan skor 92, 7 % , disimpulkan produk ini sangat layak untuk digunakan.

**Kata Kunci:** Android, BENEKO Educapp, Media, PPKn.

### **ABSTRACT**

This study aims to: (1) Know the condition of teaching and learning activities of PPKn before the implementation of the development of android-based learning media. (2). Knowing the development of IT-based learning media in SMPN 25 Malang. The type of research used in this study is the type of research and development research. As a data source selected principals, teachers class VIII, and 8th graders in SMP Negeri 25 Malang. This study was conducted approximately 1-6 months. This development research produces the end product of instructional media based on android application called BENEKO Educapp media. Media development is developed through five stages (analysis, design, development, implementation and evaluation). Based on field trials conducted on small and large classes. For small classes done in class VIII B with random samples of 5 students, obtained 82.6% results, this product concluded feasible to use. For extensive testing conducted to class A, B, D. The results obtained by 29 students of grade VIII A SMPN 25 Malang get response with percentage of 78.2%, it is concluded that this product is suitable for use. Extensive trials conducted to 28 students of grade VIII C SMPN 25 Malang get response with a percentage of 74.7%, concluded this product is quite feasible to use. Extensive trials were conducted to 29 students of grade VIII D SMPN 25 Malang obtained response with 87% percentage, 6%, concluded this product is very feasible to use. The

last field trial was done to the teacher of Vocational School VIII SMPN 25 Malang get response with score 92,7%, concluded this product very feasible to be used.

**Keywords:** Android, BENEKO Educapp, Media, PPKn.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat dan canggih, anak muda sekarang khususnya peserta didik SMA dan SMP sudah jauh lebih menguasai teknologi dibanding generasi sebelumnya, anak-anak SMP dan SMA sekarang sudah mempunyai *gadget* canggih seperti *handphone* untuk menunjang kehidupan. Sebagai seorang pendidik tentu harus bisa mengimbangi anak muda zaman sekarang dalam hal *melek* teknologi, supaya tidak dianggap ketinggalan zaman dan diremehkan peserta didik.

PPKn (*Civic Education*) adalah pembelajaran yang menggugah rasa ingin tahu dan kepercayaan (*trust*) terhadap norma-norma sosial yang mengatur hubungan personal dalam masyarakat sebagaimana mengatur partisipasi politik (Alberta dalam Susiatik, 2013).

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hilang maknanya apabila peserta didik tidak menyukai mata pelajaran tersebut. Ketidaksukaan ini di sebabkan karena menurut peserta didik materi PPKn terlalu rumit sehingga banyak yang harus dihafalkan. Para peserta didik sudah terlanjur menganggap PPKn adalah mata pelajaran hafalan, bukan pemahaman. Selain faktor di atas, penyebab PPKn tidak diminati adalah dari pembawa materi itu sendiri, yaitu guru mata pelajaran PPKn. Menerangkan materi terlalu cepat sampai terlalu lamban. Selain itu, penjelasan dari guru tidak membuat peserta didik semakin jelas atas materi yang disampaikan, malah menambah bingung peserta didik. Terkadang juga, guru tidak begitu menguasai materi, sehingga terkadang

ketika guru sedang mengajar di dalam kelas peserta didik kebanyakan tidak memperhatikan dan malah asik sendiri dengan teman-temannya (Allica, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, Penulis sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, yang merupakan calon guru Pendidikan Kewarganegaraan, melakukan inovasi suatu media pembelajaran yang menggunakan media aplikasi android untuk menarik perhatian peserta didik agar peserta didik lebih konsentrasi dalam mengikuti mata pelajaran PPKn.

Menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, tentunya diperlukan sebuah media pembelajaran yang menyelaraskan dengan kemajuan zaman, yang mampu merangsang minat seluruh tatanan masyarakat terutama peserta didik. Media yang dikembangkan tentulah harus dapat mengikuti kebutuhan zaman sekarang serta dapat diakses. Sayangnya, pemanfaatan media pembelajaran di Indonesia masih sangatlah minim, bagi media berupa IT maupun non-IT. Dibuktikan dengan hasil survei berikut ini bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh guru adalah "Peningkatan kemampuan di bidang keahlian" (42%), "Minimnya alat bantu mengajar di sekolah" (24%), "Kurikulum" (15%), "Kompetensi Pedagogik perlu diasah" (8%), "Gaji" (5%), "Pelatihan dan diklat hanya teoritis" (3%) dan permasalahan-permasalahan yang lain yang dihadapi guru (3%) (Mashoedah, 2015).

Tetapi seiring kemajuan IPTEK di Indonesia, permasalahan pemanfaatan

media yang inovatif dan mudah diakses menemui titik terang. Penggunaan media pembelajaran berbasis android dinilai mampu menjadi salah satu solusi meningkatkan minat mengikuti mata pelajaran PPKn di SMPN 25 Malang. Pasalnya, menurut lembaga riset digital marketing Emarketer pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif *smartphone* di Indonesia diperkirakan akan mencapai lebih dari 100 juta orang. Artinya, Indonesia akan menempati posisi tertinggi keempat pengguna android terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika (Rahmayani. 2015). Potensi pemakaian android di Indonesia khususnya di lingkungan sekolah SMPN 25 Malang harus bisa dimanfaatkan dengan baik khususnya dalam bidang akademik, maka dari itu penulis membawa salah satu inovasi solusi upaya menjawab peluang pengembangan media pembelajaran android untuk bidang pendidikan.

## **METODE**

Penelitian ini bertempat di SMPN 25 Malang. Peneliti memilih SMPN 25 Malang di karenakan di SMPN 25 Malang peneliti mengenal lingkungan dan seluk beluk problematika di dalamnya, di karenakan kebetulan SMPN 25 merupakan tempat peneliti magang. Menurut analisa penulis SMPN 25 Malang merupakan tempat strategis untuk diadakan penelitian.

Pengembangan produk aplikasi android BENEKO EducApp ini menggunakan jenis pengembangan metode ADDIE. Pengembangan ADDIE terdiri atas 5 fase yang saling terkait, yaitu *Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate*.

ADDIE merupakan model desain media pembelajaran yang berlandaskan

pada pendekatan sistematis sebagai prosedural pendekatan sistem yang telah diwujudkan dalam banyak praktik metodologi untuk pengembangan teks, materi. Hasil akhir dari penelitian ini merupakan produk awal bagi fase pengembangan berikutnya.

Observasi dilakukan bertempat di SMPN 25 Malang kelas VIII untuk mendapatkan informasi terkait proses pembelajaran, karakteristik peserta didik dan analisis kebutuhan di sekolah. Observasi dilakukan sebelum di berikan produk. Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik selama proses belajar mengajar dikelas khususnya saat pembelajaran PPKn, apakah dalam proses pembelajaran PPKn sudah menggunakan media pembelajaran atau belum. Peneliti juga mengobservasi karakteristik peserta didik saat proses pembelajaran.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai guru PPKn kelas VIII dan kepala sekolah SMPN 25 Malang. Wawancara dengan Guru PPKn dilakukan untuk mendapatkan informasi ketika melakukan studi pendahuluan yang meliputi kendala guru dalam mengajar, mengetahui KI, KD dan materi yang digunakan dalam pembelajaran PPKn, mengetahui minat peserta didik terhadap mata pelajaran PPKn dan juga media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran PPKn. Peneliti juga mewawancarai tentang kelemahan dan kelebihan media yang selama ini digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan wawancara dengan kepala sekolah dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis IT yang telah dilakukan di SMPN 25 Malang.

Angket pada penelitian berupa angket validasi, angket respon peserta didik, serta respon guru. Angket validasi diajukan kepada ahli media pembelajaran, ahli Pemrograman dan ahli materi (guru), angket respon peserta didik diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui kemenarikan media pembelajaran yang akan dikembangkan. Terakhir angket respon guru diajukan kepada guru mata pelajaran PPKn kelas VIII. Angket validasi diberikan pada saat evaluasi produk untuk penyempurnaan produk media pembelajaran berbasis android. Angket respon peserta didik dan respon guru diberikan setelah produk diterapkan.

Peneliti menggunakan metode Annas dalam teknik analisis data. Annas (2016:55) menyebutkan “data yang berupa data verbal deskriptif dianalisis secara kualitatif. Sedangkan untuk menganalisis data berupa uji ahli, uji praktisi dan uji lapangan dilakukan secara kuantitatif”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi proses kegiatan belajar dan mengajar PPKn

Kondisi kegiatan belajar dan mengajar PPKn sebelum adanya penerapan dari pengembangan media pembelajaran berbasis android di kelas 8 SMPN 25 Malang, peserta didik ketika mata pelajaran PPKn jam mengajar Ibu Rhegita pagi, semangat belajarnya masih tinggi, tapi ketika Ibu Rhegita mengajar mata pelajaran PPKn siang, minat belajar peserta didik turun. Ketika mata pelajaran PPKn ditaruh pada saat jam pelajaran siang peserta didik kebanyakan mengantuk, tidak konsentrasi serta kurang semangat.

Media pembelajaran yang biasanya digunakan guru PPKn di kelas 8 SMPN 25 Malang adalah dengan media pembelajaran menggunakan kompas,

dalam penggunaannya anak-anak nantinya akan melihat arah mata angin yang guru mata pelajaran tempel di *power point*, arah mata angin ada 4 yang menggunakan penamaan arah mata angin jawa. Di setiap arah mata angin itu ada akronimnya yaitu tahapan-tahapan yang harus anak-anak lakukan.

Tapi sayangnya, penggunaan media pembelajaran ini tidak begitu efektif dalam meningkatkan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran.

Perkembangan dari suatu media pembelajaran berbasis IT di SMPN 25 sudah pernah dilakukan, namun kurang begitu optimal di karenakan ada peserta didik yang menyalahgunakan fasilitas IT untuk kegiatan negatif, sehingga sekolah akhirnya belum bisa memfasilitasi untuk adanya suatu pengembangan media berbasis IT kalau menggunakan HP android, karena rawan untuk disalahgunakan.

### Pengembangan Aplikasi Android Media Pembelajaran PPKn BENEKO Educapp.

Pengembangan produk aplikasi media pembelajaran BENEKO EducApp ini menggunakan jenis pengembangan metode ADDIE. Pengembangan ADDIE terdiri atas 5 fase yang saling terkait, yaitu *Analyze, Design, Development, Implement, dan Evaluate* (Tegeh, dkk, 2014).

#### 1. Tahap Validasi

Tahap ini media divalidasi oleh 1 orang ahli materi sekaligus user yaitu guru mata pelajaran PPKn, Ibu Regita Resih Kemuning, S.Pd dan 2 orang ahli IT yaitu operator jaringan Infokom UMM Bapak Faizal harwin. S.Kom, dan operator jaringan DPPM Dicky Cahyo Hariyanto. S.Kom. Terakhir ahli media pembelajaran Dr. Nurul Zuriah, M.Si. Masukan dan saran dari ahli materi, ahli media serta ahli



IT akan dijadikan dasar untuk revisi media agar media yang dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

Hasil yang diperoleh dari validasi media pembelajaran ahli materi berdasarkan angket validator dapat diperoleh skor 87,27 %. Berdasarkan pedoman kelayakan kriteria interpretasi maka produk aplikasi BENEKO, berada pada kualifikasi “sangat layak” dengan mempunyai skor antara 86%-100 %, artinya produk aplikasi android ini dianggap sangat layak untuk dipakai di sekolah.

Hasil yang diperoleh dari validasi media pembelajaran ahli Program I berdasarkan angket validator dapat diperoleh skor 70 %. Berdasarkan pedoman kelayakan kriteria interpretasi Sugiono, maka produk aplikasi android ini, berada pada kualifikasi “cukup layak” dengan mempunyai skor antara 56 %-75 %, artinya produk aplikasi android ini dianggap cukup layak untuk dipakai di sekolah.

Hasil yang diperoleh dari validasi media pembelajaran ahli Program II berdasarkan angket validator dapat diperoleh skor 90 %. Berdasarkan pedoman kelayakan kriteria interpretasi Sugiono, maka produk aplikasi android ini, berada pada kualifikasi “sangat layak” dengan mempunyai skor antara 86%-100 %, artinya produk aplikasi android ini dianggap sangat layak untuk dipakai di sekolah meskipun perlu diperbaiki.

Hasil yang diperoleh dari validasi media pembelajaran ahli media pembelajaran berdasarkan angket validator dapat diperoleh skor 92,5 %. Berdasarkan pedoman kelayakan kriteria interpretasi Sugiono, maka produk aplikasi android ini, berada pada kualifikasi “sangat layak” dengan mempunyai skor antara 86%-100 %, artinya produk aplikasi android ini

dianggap sangat layak untuk dipakai di sekolah.

## 2. Tahap Implementasi

Uji coba media dilakukan untuk mengetahui keterterapan media berbasis android. Peneliti memerlukan partisipasi peserta didik dalam melakukan uji coba media. Sehingga peneliti melakukan uji coba media pada sekolah SMPN 25 Malang kelas VIII dengan jumlah sampel 5 peserta didik untuk kelas VIII B untuk uji coba kecil dan uji kelompok besar di kelas VIII A, C, D jumlah sampel 29, 28, dan 29 peserta didik.

### a. Uji Coba Terbatas

Hasil yang diperoleh dari data yang diperoleh dari uji coba produk kepada 5 peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 25 Malang berdasarkan angket respon peserta didik dapat diperoleh skor 82.6%. Berdasarkan pedoman kelayakan kriteria interpretasi sugiono, maka produk aplikasi android ini, berada pada kualifikasi “layak” dengan mempunyai skor antara 76 % - 85 % , artinya produk aplikasi android ini dianggap layak untuk dipakai di sekolah dan digunakan dalam media pembelajaran PPKn dan secara umum media pembelajaran Beneko Educapp ini tidak diperlukan adanya direvisi lagi.

### b. Uji Coba Luas

Hasil yang diperoleh dari data yang diperoleh dari uji coba produk kepada 29 peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 25 Malang berdasarkan angket respon peserta didik dapat diperoleh skor 78,2%. Berdasarkan pedoman kelayakan kriteria interpretasi Sugiono, maka produk aplikasi android ini, berada pada kualifikasi “layak” dengan mempunyai skor antara 76 % - 85 %, artinya produk aplikasi android ini dianggap layak untuk dipakai di sekolah.

Hasil yang diperoleh dari data yang diperoleh dari uji coba produk kepada 28

peserta didik kelas VIII C SMP Negeri 25 Malang berdasarkan angket respon peserta didik dapat diperoleh skor 74,7%. Berdasarkan pedoman kelayakan kriteria interpretasi Sugiono, maka produk aplikasi android ini, berada pada kualifikasi “cukup layak” dengan mempunyai skor antara 56%-75 %, artinya produk aplikasi android ini dianggap cukup layak untuk dipakai di sekolah dan digunakan dalam media pembelajaran PPKn.

Hasil yang diperoleh dari data yang diperoleh dari uji coba produk kepada 29 peserta didik kelas VIII D SMP Negeri 25 Malang berdasarkan angket respon peserta didik dapat diperoleh skor 87, 6 %. Berdasarkan pedoman kelayakan kriteria interpretasi Sugiono, maka produk aplikasi android ini, berada pada kualifikasi “sangat layak” dengan mempunyai skor antara 86%-100 %, artinya produk aplikasi android ini dianggap sangat layak untuk dipakai di sekolah dan digunakan dalam media pembelajaran PPKn.

#### c. Hasil Respon Guru

Penelitian ini respon guru digunakan peneliti untuk mengetahui kelayakan materi media pembelajaran yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui hasil respon guru, digunakan angket respon guru yang dilakukan oleh Ibu Rhegita Resih Kemuning, S.Pd selaku guru mata pelajaran PPKn kelas VIII SMPN 25 Malang. Peneliti memilih guru kelas sebagai respon guru karena guru kelas yang mengetahui karakteristik dan kebiasaan saat pembelajaran, sehingga guru tahu betul pengaruh sebelum penggunaan media dan sesudah penggunaan media itu seperti apa.

Hasil yang diperoleh dari responden guru PPKn kelas VIII SMPN 25 Malang berdasarkan angket dapat diperoleh skor

92,7 %. Berdasarkan pedoman kelayakan kriteria interpretasi Sugiono , maka produk aplikasi android ini, berada pada kualifikasi “sangat layak” dengan mempunyai skor antara 86%-100 %, artinya produk aplikasi android ini dianggap sangat layak untuk dipakai di sekolah dan digunakan sebagai media pembelajaran PPKn.

#### 4. Tahap Evaluasi

Bersamaan dengan uji coba aplikasi, penulis juga menyebar angket untuk melihat daya tarik dan kekurangan pada media. Dari segi inovasi dan ketertarikan, sebagian besar peserta didik termasuk guru pengampu menilai bahwa media ini inovatif dan sangat menarik. Tetapi, dari angket ditemukan kekurangan dan masukan mulai dari tombol close yang tidak berfungsi serta kompatibilitas media pada handphone peserta. Dari kritik dan masukan tersebut, maka penulis mengembangkan ulang media untuk mengatasi permasalahan yang muncul tadi. Di karenakan model ADDIE ini bersifat saling terkait, maka evaluasi dapat dilakukan pada tahap manapun sehingga yang mengambil peran penting dalam pengembangan aplikasi ini adalah pada tahap evaluasi.

**Tabel Kriteria interpretasi sugiono dalam annas (2016 : 56)**

Kategori	Persentase	Kualifikasi
4	86% - 100 %	Sangat Layak
3	76 % - 85 %	Layak
2	56 % - 75 %	Cukup Layak
1	<55 %	Tidak Layak

#### SIMPULAN

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk akhir media pembelajaran berbasis aplikasi android yang disebut dengan media BENEKO Educapp.

Pengembangan media dikembangkan melalui lima tahapan (*analisis, design, development, implementation and evaluation*). Tahap analisis digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di sekolah. Tahap perancangan digunakan untuk penyusunan rancangan bentuk media yang akan dikembangkan. Tahap pengembangan adalah tahap untuk membuat dan merancang media untuk dilakukan uji validasi oleh para ahli. Kelayakan media pembelajaran BENEKO Educapp diperoleh dari hasil penilaian dan tanggapan positif dari uji validasi ahli, respon peserta didik dan respon guru. Hasil validasi ahli materi menunjukkan bahwa materi yang digunakan dalam media sudah sesuai dengan kompetensi yang berlaku hal ini sesuai dengan perolehan sebesar 87,27 %, hasil validasi ahli program I sebesar 70 %, hasil validasi ahli program II sebesar 90 % serta hasil validasi ahli media pembelajaran 92,5 %. Skor tersebut menunjukkan bahwa media valid digunakan sebagai media pembelajaran.

Hasil uji coba kecil memperoleh hasil 82,6% yang artinya produk ini layak digunakan. Hasil yang diperoleh dari uji coba luas 29 peserta didik kelas VIII A SMPN 25 Malang memperoleh respon yang baik dengan presentase 78,2% yang artinya produk ini layak untuk digunakan. Uji coba luas yang dilakukan kepada 28 peserta didik kelas VIII C SMPN 25 Malang memperoleh respon yang baik dengan presentase 74,7 % yang artinya produk ini cukup layak untuk digunakan. Uji coba luas yang dilakukan kepada 29 peserta didik kelas VIII D SMPN 25 Malang memperoleh respon yang baik dengan presentase 87,6 % yang artinya produk ini sangat layak untuk digunakan.

Terakhir uji coba lapangan dilakukan kepada guru PPKn kelas VIII SMPN 25 Malang memperoleh respon yang baik dengan skor 92,7 % yang artinya produk ini sangat layak untuk digunakan. Pada beberapa data di atas dapat disimpulkan bahwa media BENEKO EDUCAPP dinyatakan layak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Iis Prasetyo, “*Teknik Analisis Data Dalam Research And Development*”, (Online), (<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310875/pengabdian/teknik-analisis-data-dalam-research-and-development.pdf>.) Diakses 13 Desember 2017.
- Ramhmayani, I. 2015. *Indonesia Raksasa Teknologi Asia*, (Online), [https://kominform.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan\\_media](https://kominform.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media). (diakses tanggal 26 Februari 2018).
- Thrasning Ayu, Allica. 2015. *PKn Membosankan? Whats Wrong*, (Online), [https://www.kompasiana.com/allica/pkn-membosankan-whats-wrong\\_552fd0506ea83451408b465e](https://www.kompasiana.com/allica/pkn-membosankan-whats-wrong_552fd0506ea83451408b465e). (Diakses 5 April 2018).
- Tegeh, IM, et.al. 2014. *Model Penelitian Pengembangan*. Singaraja: Graha Ilmu.
- Ribab Sibilana. Annas. *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Kelas XI di SMA Negeri 2 Malang*. Tesis tidak Diterbitkan. Malang: Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Susiatik, Titik. 2013. Pengembangan E-Module Berbasis Problem Based Learning Mata Pelajaran Kimia Untuk Siswa Kelas X Sma Negeri 8 Malang, (Online), Vol 1 (6) : 1159—1168, (<http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/download/6460/2741>) diakses 14 Mei 2018.

Mashoedah. 2015. Kajian Penggunaan Media Pembelajaran dalam Pelatihan Peningkatan Kompetensi Profesional Guru, (Online), Vol 1 (1) : 17 - 25, (<https://journal.uny.ac.id/index.php/elinvo/article/download/10875/8985>) diakses 14 Desember 2017.

## **PERAN KEGIATAN PRAMUKA DALAM PENGEMBANGAN SIKAP NASIONALISME SISWA MAN 1 BANYUWANGI**

**Nopalta Bagus Samudra, M. Mansur Ibrahim, M. Syahri**  
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang  
nofaltabagus123@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan, kendala, solusi, serta peran kegiatan pramuka dalam pengembangan sikap nasionalisme siswa MAN 1 Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dijabarkan berupa data deskriptif. Lokasi penelitian adalah MAN 1 Banyuwangi. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data tersebut berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan peran kegiatan pramuka dalam pengembangan sikap nasionalisme siswa MAN 1 Banyuwangi, pada tahap pelaksanaan kegiatan pramuka MAN 1 Banyuwangi menggunakan metode kepramukaan yang berpedoman pada buku satuan kecakapan umum pramuka. Pada penelitian ini terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya minat siswa, serta jumlah pembina yang tidak seimbang. Solusi untuk kendala yang dihadapi yaitu dengan pemberian sanksi yang tegas, mengadakan latihan dengan cara berpindah-pindah agar siswa lebih antusias, serta melakukan pelatihan kepada pihak guru dan BK untuk meningkatkan SDM tentang kepramukaan. Kemudian peran kegiatan ini dalam pengembangan sikap nasionalisme siswa di MAN 1 Banyuwangi yaitu tidak hanya sebagai pembentuk moral, penanaman nilai nasionalisme dan juga sebagai motivator yang mengajarkan jiwa nasionalisme, disiplin, jujur dan mengajarkan siswa lebih dekat kepada negaranya, peran kegiatan pramuka juga sebagai kegiatan yang menstimulus dan menjaga agar rasa nasionalisme siswa tetap terjaga.

**Kata Kunci :** Pramuka, Sikap Nasionalisme.

### **ABSTRACT**

This study aims to obtain data on the implementation, constraints, solutions, and the role of scout activities in the development of student nationalism attitude MAN 1 Banyuwangi, District Banyuwangi, Banyuwangi. This study uses a qualitative approach with data that is described in the form of descriptive data. The location of the research is MAN 1 Banyuwangi. Sources of data in this study is divided into two primary data sources and secondary data sources. This research procedure uses interviews, observations and document studies. Data analysis techniques such as data reduction, data presentation, and data verification. The results showed the role of scout activities in the development of student nationalism attitude MAN 1 Banyuwangi, in the implementation stage of the scout MAN 1 Banyuwangi using scouting method based on the general scout skills unit book. In this study there are inhibiting factors that are the lack of student interest, the amount of coach is not balanced. The solution to the obstacles faced is by giving strict sanctions, conducting the exercises by moving around to make the students more enthusiastic, as well as training the teachers and BK to improve the human resources of scouting. Then the role of this activity in the development of students' nationalism attitude in MAN 1 Banyuwangi is not only as a moral builder, the cultivation of the value of nationalism and also as a motivator who teach the soul of nationalism, discipline, honest

and teach students closer to his country, the role of scout activities as well as activities stimulate and maintain the sense of student nationalism is maintained.

**Keywords:** scouting movement, nationalism

## PENDAHULUAN

Kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat merupakan tujuan serta fungsi dari pendidikan nasional yang mana hal ini disebutkan dalam pasal Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan ataupun potensi saja, tetapi diimbangi dengan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, berakhlak mulia, serta selalu beriman dan betaqwa kepada pencipta-Nya dan bertanggung jawab.

Hal tersebut merupakan acuan bangsa Indonesia yang dijadikan dasar serta tujuan pendidikan nasional. Akan tetapi dapat disaksikan bersama, bahwa sekarang ini pendidikan belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan yang berdasar kepada landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Pembentukan manusia yang cerdas yang disertai keimanan dan ketaqwaan serta memiliki budi pekerti yang luhur belum bisa terwujudkan.

Lingkungan masyarakat sekarang ini sangat meresahkan, karena lunturnya nilai-nilai yang ada dalam lingkungan akibat gejala dari merosotnya nilai, akhlak dan moral dikalangan masyarakat. Nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti nilai kasih sayang, keadilan, kejujuran dan sikap tolong menolong pada masyarakat kini hanya slogan saja. Bukan hanya dalam lingkungan masyarakat saja, krisis akhlak juga terjadi dalam kehidupan elite politik telah dikotori dengan adanya fitnah, saling merendahkan elit politik yang lain, politik adu domba, penyelewengan baik

kekuasaan serta jabatan, serta perbuatan maksiat lainnya.

Krisis akhlak dapat juga terjadi dalam kehidupan berbagai lapisan masyarakat pada beberapa sikap sebagian dari mereka merampas hak orang lain dengan sangat mudah, seperti mencuri, mencopet serta menjarah. Peran dunia pendidikan sangat penting dan sentral agar siswa (khususnya generasi muda) akan dibawa serta dibimbing menuju perubahan yang berarti perubahan tersebut merupakan suatu kemajuan sosial serta kemajuan bangsa.

Jika pengaruh tersebut terus menerus dibiarkan, bisa kita bayangkan akan memberikan dampak terhadap rusaknya generasi muda. Seperti kebobrokan moral, timbulnya tindakan yang tidak mencerminkan budaya bangsa, lebih bangga terhadap budaya luar dari pada budaya sendiri. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang menjadi penentu bagaimana bangsa kedepannya dan menjadi seperti apa bangsa ini ada di tangan generasi muda.

Penurunan sikap nasionalisme pada siswa merupakan suatu realita dan memiliki bukti yaitu pada hari senin pada sekolah melakukan kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI dan Hari Pendidikan Nasional banyak siswa mengikuti kegiatan upacara dengan tidak hikmat, siswa sambil bergurau dengan temannya. Kemudian kurangnya pemakaian produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri menandakan bahwa siswa tidak mencintai produk negerinya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya kegiatan yang

bersifat mendidik terhadap generasi muda tentang arti penting sikap nasionalisme, sehingga melalui kegiatan pramuka digantungkan suatu harapan agar siswa memiliki jiwa nasionalisme agar mempunyai perasaan cinta terhadap tanah airnya kemudian generasi muda pastinya akan rela berkorban apapun demi bangsanya sehingga generasi muda juga pastinya akan lebih mencintai produk dalam negeri dibanding produk luar. Oleh karena itu, sikap nasionalisme harus dibudayakan kepada generasi muda khususnya dikalangan SMA agar mereka lebih tahu pentingnya rasa nasionalisme sehingga mereka memiliki jiwa nasionalisme agar bangsa Indonesia tetap aman, nyaman dan damai dari gangguan luar.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di MAN 1 Banyuwangi dan peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan salah satu guru ekstrakurikuler bagian kepramukaan. Bahwa minat siswa rendah untuk mengikuti kegiatan pramuka dan bisa dikatakan tidak diperdulikan oleh sebagian siswa. Rendahnya minat siswa terhadap kegiatan ini menjadikan kurangnya rasa cinta tanah air atau nasionalisme pada sebagian siswa MAN 1 Banyuwangi. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terhadap kegiatan pramuka yang dilaksanakan di MAN 1 Banyuwangi untuk mengetahui peran kegiatan tersebut sehingga dapat merubah pola pikir siswa supaya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah terhadap perkembangan sikap nasionalisme siswa dan upaya yang dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan permasalahan yang timbul mengenai

kurangnya sikap nasionalisme dengan menggunakan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan pada siswa khususnya MAN 1 Banyuwangi.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menghasikan data-data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pembina pramuka, Kepala sekolah, guru, dan siswa yang mengikuti kegiatan pramuka. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Desember 2017. Prosedur penelitian terdiri dari: (1) tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, mengurus surat perizinan untuk melakukan penelitian, observasi lapangan, menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses penelitian dan menyiapkan mental serta akhlak yang baik; (2) tahap pekerjaan lapangan meliputi: melakukan penelitian untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan, hambatan, solusi dan peran kegiatan pramuka serta melakukan wawancara dengan subjek penelitian; dan (3) tahap penyusunan laporan meliputi: menyusun bab 4 dan bab 5 berdasarkan data yang diperoleh.

Instrumen penelitian terdiri dari: (1) observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan, hambatan, solusi serta peran kegiatan pramuka di MAN 1 Banyuwangi,

(2) wawancara digunakan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pramuka, penghambat pelaksanaan kegiatan pramuka, solusi untuk mengantisipasi penghambat pelaksanaan kegiatan pramuka, serta untuk mengetahui peran kegiatan pramuka dalam pengembangan sikap nasionalisme siswa MAN 1 Banyuwangi; (3) dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan kejadian-kejadian dilapangan.

Teknik analisis data terdiri dari: (1) pengumpulan data meliputi: Peneliti melakukan pengumpulan semua data yang berkaitan dengan penelitiannya secara objektif, apa adanya serta sesuai dengan hasil observasi, wawancara dilakukan terhadap responden terkait serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan judul penelitian; (2) reduksi data meliputi: Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan pada saat peneliti mengolah dan memilah pada saat menganalisis data. Penelitian merangkum, melihat hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting yang harus dipaparkan terkait dengan penelitian di MAN 1 Banyuwangi serta membuang data yang tidak perlu untuk proses analisis data; (3) penyajian data meliputi: Penelitian melakukan penyajian data yang akan memudahkan untuk memahami data atau sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber dilapangan dan telah disusun serta sistematis sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari sumber data di MAN 1

Banyuwangi yang dijadikan lokasi penelitian; dan (4) penarikan kesimpulan meliputi: Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan yang kemudian kesimpulan itu digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan pada saat mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian. Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai yang timbul dari data yang harus diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan kegiatan pramuka di MAN 1 Banyuwangi disesuaikan dengan metode kepramukaan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatannya seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan secara rutin karena merupakan program wajib meskipun mereka mengikuti karena terpaksa. Dalam latihan rutin mingguan ini pembina pramuka sudah menggunakan Metode Kepramukaan. Dalam kegiatan pembelajaran siswa kurang antusias dengan dibentuknya regu kemudian diberi tugas secara mandiri. Selama latihan rutin mingguan yang berlangsung pada bulan 2017 dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MAN 1 Banyuwangi sudah disesuaikan dengan program yang telah dibuat oleh pihak mandrasah. Tetapi masih ada keterlambatan dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan karena siswa banyak yang terlambat mengikuti kegiatan pramuka.

Faktor atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka yaitu



pembina dan pembantu pembina pramuka MAN 1 Banyuwangi masih kesulitan dalam mengelola siswa atau peserta kegiatan pramuka. Hal ini bisa dilihat siswa asik bermain sendiri hanya sebagian saja yang mendengarkan pembina saat memberikan sebuah materi, bisa dikatakan bahwa siswa mengikuti kegiatan dengan tidak benar terlihat beberapa siswa asik santai sendiri tidak membantu temannya yang melakukan kegiatan bakti sosial. Dengan banyaknya jumlah siswa yang mengikuti yaitu 400 siswa kelas X dan 400 siswa kelas XI dan terbagi menjadi beberapa regu, pembina hanya 2 dan pembantu pembina hanya 1, dari masing-masing regu, jarak tiap regu sangat berdekatan, sehingga menimbulkan kegaduhan dan kurangnya ketertiban siswa, siswa tidak berkonsentrasi untuk regunya sendiri, kadang bermain dengan regu yang lain dan pelaksanaan kegiatan pun diselang-seling yang mana kelas X dan XI bergantian melaksanakan kegiatan sehingga pertemuan kegiatan kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah pembina pramuka sehingga kesulitan dalam mengondisikan semua siswa. Beberapa hambatan juga ditemukan peneliti selama observasi diantaranya mulai dari kepala madrasah yang melakukan evaluasi dalam kegiatan tersebut, serta pembina beserta pembantunya tidak terlihat melakukan penilaian kepada siswa. Padahal hal tersebut adalah faktor penting agar tujuan kegiatan pramuka dapat tercapai dan juga supaya pihak sekolah dapat mengetahui perkembangan baik dari siswa ataupun kegiatan pramuka itu sendiri.

Solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pramuka ada beberapa hal yaitu dengan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada orang tua siswa bahwa kegiatan

pramuka dapat memberi dampak yang positif terhadap siswa, menyajikan kegiatan yang lebih menarik sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pramuka, memberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang tidak mengikuti kegiatan dan melanggar perintah pembina, mengadakan pelatihan kepada guru-guru sehingga bisa menjadi pembina dan mengadakan pelatihan yang selalu berpindah-pindah agar ada nuansa baru sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti kegiatan pramuka. Pembina pramuka memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengikuti kegiatan dengan baik dengan berupa teguran lisan dan hukuman seperti menulis surah Al-baqarah 100 ayat, kemudian kegiatan dilaksanakan di lokasi yang berpindah-pindah agar siswa lebih antusias.

Peran kegiatan pramuka dalam pengembangan sikap nasionalisme siswa yaitu mempunyai peran penting terhadap sikap nasionalisme siswa. Sering ditemui bahwa generasi muda saat ini telah mengalami penurunan nilai-nilai nasionalisme yang berakibat menipisnya rasa cinta tanah air, menurunnya moral dan nilai-nilai Pancasila yang tergerus oleh arus globalisasi. Dengan adanya kegiatan wajib pramuka ini yang dilaksanakan di MAN 1 Banyuwangi akan berdampak pada diri mereka (siswa) yang mana akan membawa siswa menjadi siswa yang mempunyai jati diri, bermoral Pancasila, dan cinta kepada tanah air atau bangsanya yaitu Indonesia. Peran lain dari kegiatan pramuka terhadap sikap nasionalisme siswa melainkan juga sebagai kegiatan yang dapat menstimulus dan menjaga agar rasa nasionalisme siswa tetap terjaga. Hal ini dilakukan agar siswa selaku peserta kegiatan pramuka selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada Pancasila yaitu nilai religius, gotong-royong, mandiri serta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

Hasil wawancara dengan beberapa responden penelitian tentang pelaksanaan kegiatan pramuka di MAN 1 Banyuwangi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pramuka pihak madrasah telah melakukan persiapan berupa rencana kegiatan tahunan tentang kegiatan pramuka bukan hanya rencana program tahunan saja akan tetapi pihak madrasah juga memiliki rencana anggaran terhadap kegiatan pramuka. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan pramuka berjalan dengan lancar dan penyampaian materi dapat dilakukan secara sistematis karena adanya program yang sudah terstruktur. Pihak sekolah sudah melakukan persiapan baik berupa rencana kegiatan rutin mingguan maupun tahunan sebagai penunjang kegiatan pramuka yang dilaksanakan di MAN 1 Banyuwangi seperti latihan rutin setiap minggunya yaitu pada hari jumat dan hari minggu khusus untuk calon BANSUS, kemah tiga kali dalam setahun, bakti sosial, pelatihan bela negara bersama KODIM dan perkemahan sabtu dan minggu. Kegiatan pramuka di MAN 1 Banyuwangi juga telah disesuaikan dengan buku panduan SKU pramuka.

Hasil wawancara dengan beberapa responden penelitian tentang kendala dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di MAN 1 Banyuwangi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pramuka adalah sebagai berikut. (a) siswa kurang disiplin dan kurang serius dalam mengikuti kegiatan, (b) pelaksanaan yang tidak sesuai dari waktu yang telah dijadwalkan, (c) perbandingan jumlah antara pembina dan siswa yang tidak sesuai, (d) antusias dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler masih kurang.

Hasil wawancara dengan beberapa responden penelitian tentang solusi untuk

kendala yang dihadapi dalam kegiatan pramuka, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa solusi untuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka adalah sebagai berikut. (a) melaksanakan kegiatan dengan cara berpindah-pindah tempat lokasi, (b) menyajikan kegiatan yang lebih menarik, (c) memberikan sanksi yang tegas atas siswa yang kurang disiplin, (d) melakukan peningkatan kualitas SDM pembina maupun guru kelas tentang kepramukaan yang dilaksanakan disekolah misalnya pelatihan bersama kodim, polres dan kwarcab agar jumlah pembina seimbang dengan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pramuka dan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Hasil wawancara dengan beberapa responden penelitian tentang peran kegiatan pramuka dalam pengembangan sikap nasionalisme siswa MAN 1 Banyuwangi sebagai berikut:

**Kepala Sekolah MAN 1 Banyuwangi “Drs. H. Soeraji, M.Pdi, M.Ag” mengungkapkan:**

*“Kegiatan pramuka sangat memiliki peran penting dalam pengembangan sikap nasionalisme, karena cikal bakal terbentuknya sebuah kedisiplinan berawal dari kegiatan pramuka. Karena pramuka itu utamanya dan kuncinya adalah sebuah kedisiplinan. Kegiatan pramuka juga sebagai faktor pendukung terhadap perkembangan sikap nasionalisme siswa dengan pembiasaan dengan materi-materi yang berhubungan dengan nasionalisme. Dasa Dharma dan Trisatya seperti*

*bunyiya berjanji akan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 itu merupakan bagian dari jiwa nasionalisme yang sangat luar biasa. Kegiatan pramuka juga menjadi kegiatan yang memotivasi anak dan membiasakan anak untuk selalu menerapkan jiwa-jiwa patriotisme, jiwa pemuda yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, bicara apa adanya, tolong menolong, dan memperhatikan sesama itu merupakan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila” (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2017)..*

**Pembina Kegiatan Pramuka MAN 1 Banyuwangi “Rina Wigati Handayani, S.Pd” mengungkapkan:**

*“Peranan kegiatan pramuka juga sebagai faktor pendukung pertumbuhan nasionalisme, karena didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang mana sifatnya menanamkan nilai-nilai nasionalisme seperti latihan upacara, baksos keaman makam pahlawan, dengan adanya kegiatan ini kita dapat menstimulus dan menjaga agar rasa nasionalisme yang di miliki siswa tetap terjaga” (wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017).*

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan pendapat bahwa: Peran kegiatan pramuka sangat penting sekali tidak hanya sekedar kegiatan saja, melainkan sebagai motivator siswa agar memiliki rasa nasionalisme seperti pahlawan, fasilitator penanaman moral serta nilai-

nilai nasionalisme, pembentukan sikap dan karakter, penegak disiplin, membentuk siswa yang bertanggung jawab, jujur, tolong-menolong, yang mana semua itu terdapat didalam nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan inipun mendukung siswa dalam pembelajaran di kelas MAN 1 Banyuwangi karena kegiatan ini tidak mengganggu, tetapi lebih bermanfaat.

Hasil dokumentasi kegiatan pramuka di MAN 1 Banyuwangi peneliti turun langsung di lapangan agar mendapatkan data seperti foto berikut ini: (1) 4.4 Perkemahan di lapangan MAN 1 Banyuwangi, untuk melatih siswa agar lebih mandiri dan melatih siswa untuk menghadapi keadaan lingkungan sekitar, (2) Gambar 4.5 saat melakukan pelatihan bela negara bersama KODIM Banyuwangi, kegiatan ini dilakukan bertujuan melatih meningkatkan rasa nasionalisme siswa terhadap negara Indonesia. (3) Gambar 4.6 saat melakukan bakti sosial di TMP (Taman Makam Pahlawan) Banyuwangi dalam rangka menghargai jasa pahlawan yang telah gugur.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan kegiatan pramuka di MAN 1 Banyuwangi, madrasah berpedoman pada buku Satuan Kecakapan Umum Pramuka dalam penyusunan rencana program atau kegiatan yang menyangkut dengan kepramukaan. MAN 1 Banyuwangi menjadikan kegiatan tahunan maupun mingguan sebagai agenda rutin. Metode kepramukaan telah digunakan oleh pembina dalam kegiatan mengajar kegiatan pramuka. Dengan adanya kegiatan ini madrasah berharap agar bisa membentuk sikap nasionalisme

pada siswa khususnya siswa MAN 1 Banyuwangi; (2) Hambatan atau Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Pramuka di MAN 1 Banyuwangi yaitu Pelaksanaan kegiatan di MAN 1 Banyuwangi belum optimal karena tidak sesuai rencana kegiatan atau program yang disusun oleh pihak madrasah dengan pelaksanaannya, kegiatan pramuka kurang diminati oleh siswa meskipun itu merupakan kegiatan wajib diikuti serta tidak seimbang antara jumlah pembina dengan peserta kegiatan pramuka; (3) Solusi yang ditawarkan sekolah di dalam mengatasi hambatan yang muncul pelaksanaan kegiatan pramuka yaitu dengan pemberian sanksi yang tegas dari pihak sekolah bagi siswa yang tidak mentaati peraturan selama kegiatan ataupun yang tidak mengikuti kegiatan pramuka secara rutin, mengadakan latihan dengan cara berpindah-pindah tempat agar siswa lebih antusias mengikuti kegiatan pramuka secara rutin, mengevaluasi kegiatan dengan rutin agar mengetahui kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka setiap minggunya, melakukan kegiatan dengan tepat waktu agar digunakan secara maksimal, mengubah tata cara pelaksanaan kegiatan agar peserta didik lebih tertarik dan mengikuti kegiatan dengan rajin serta antusias, serta melakukan pelatihan-pelatihan kepada pihak guru dan BK untuk meningkatkan SDM tentang kepramukaan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, dan mengadakan kegiatan pelatihan bersama dengan pihak-pihak terkait baik dari KODIM, Kepolisian, maupun KWARCAB; (4) Peran kegiatan pramuka terhadap sikap nasionalisme siswa sangat banyak sekali peranannya dan semua itu sudah diterapkan. Tidak hanya sebagai pembentuk moral, penanaman nilai nasionalisme dan juga sebagai motivator yang mana di dalam

kegiatan selalu mengajarkan jiwa patriotisme, membimbing anak untuk disiplin, mendidik menjadi siswa yang jujur, mengarahkan kepada hal-hal yang positif, memberikan materi tentang perjuangan dan sejarah Indonesia agar menjadikan siswa yang selalu menghargai jasa para pahlawan negara Indonesia, serta membangun karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu religius, mandiri, gotong-royong, serta mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dengan memberikan motivasi-motivasi terkait dengan materi, dan pada setiap kegiatan selalu disampaikan untuk mengingatkan peserta kegiatan pramuka agar selalu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai nasionalisme supaya tidak pudar terkikis oleh perkembangan zaman, dan semua merupakan peran kegiatan pramuka untuk melakukan sesuatu perubahan terhadap sikap nasionalisme yang lebih baik lagi. Tidak hanya itu peran kegiatan pramuka terhadap sikap nasionalisme siswa melainkan juga sebagai kegiatan yang dapat menstimulus dan menjaga agar rasa nasionalisme siswa tetap terjaga.

Setelah memperoleh kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang berkaitan dengan kegiatan penelitian guna untuk menghindari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: (1) Bagi pihak lembaga pelaksanaan kegiatan pramuka di MAN 1 Banyuwangi ada beberapa kendala. Kendala yang paling besar yaitu kurangnya minat dari siswa terhadap kegiatan-kegiatan tersebut sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun atau ditentukan. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan baik dalam tata cara maupun metode yang digunakan agar

lebih menarik dan tidak membosankan, evaluasi harus dilaksanakan pada setiap kegiatan agar mengetahui kendala-kendala yang dihadapi untuk dianalisis supaya kegiatan lebih baik lagi kedepannya; (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih banyak mengkaji referensi maupun sumber yang terkait dengan kegiatan pramuka dan nasionalisme agar hasil penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunia perpustakaan. 2016. *Pengertian pramuka dan kepramukaan*. (online) <http://www.daftarpustaka.web.id/2016/02/pengertian-pramuka-pengertian.html> diakses pada 13 Desember 2016 pukul 13.30 WIB
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press.
- Hidayad, Rahmad. 2016. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai Nasionalisme Pancasila*. (online) <http://www.tappdf.com/read/4421-pengaruh-globalisasi-terhadap-nilai-nasionalisme-researchgatediakses> pada tanggal 21 april 2017 pukul 10.48 wib
- Huri, Ainul. 2013. *Pembudayaan Nasionalisme di SMP Islam Al-Karimahtemuroso Guntur Demak* (online) <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/democratia/article/view/214> diakses pada 6 desember 2016 pukul 13.36 WIB
- Ilmu busra. 2011. *Visi Misi dan Strategi Gerakan Pramuka*. (online). <http://www.ilmubusra.wordpress.com/2011/08/22/visi-misi-dan-strategi-gerakan-pramuka.html> . diakses pada 15 Desember 2016 pukul 12.39 WIB
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. *Tentang Kepramukaan* (online) [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id) di akses pada 13 Desember 2016 pukul 13.49 WIB
- Kompas. 2017. *Tentang Boedi Utomo Sang Penanda Kebangkitan Nasionalisme* (online). <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/20/06142521/boedi.oetomo.sang.enanda.kebangkitan.nasionalisme>. diakses pada 22 Mei 2017 pukul 8.05 WIB
- Kurnia, Rohmat. *Sejarah Gerakan Pramuka*. Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
- Kwartir Cabang Blora gerakan Pramuka. 2016. *Tentang Visi dan Misi Gerakan Pramuka* (online). <http://pramuka.blora.com/tentang-pramuka/visi-misi-pramuka/> diakses pada 4 Mei 2017 pukul 09.14 WIB
- Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. 1998. *Pramuka Kader Pembangunan Bangsa*. Bandung: CV. Ganjar Negara.
- Masbuha. 2014. *Tentang Identitas Nasional dan Nasionalismedi Indonesia* (online). <http://masbuha.blogspot.co.id/> diakses pada 22 Mei 2017 pukul 8.38 WIB
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pengertian Para Ahli. 2013. *Tentang Pengertian Data dan Jenis Data* (online). <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html> diakses pada 6 Agustus 2017 pukul 23.24 WIB
- Pengertian para ahli. 2014. *Pengertian Pramuka dan Sejarah Pramuka*.

- (online). <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-pramuka-dan-sejarah-pramuka.html>. di akses pada 15 Desember 2016 pukul 11.54 WIB
- Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 67 tahun 2013 Tentang *Tujuan Kurikulum 2013*. (online). <http://www.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 20 November 2016 pukul 10.25 WIB
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang *Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar*. (online). <http://www.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 20 November 2016 pukul 10.40 WIB
- Prayoga, Nismara. 2014. *Buku Panduan Pramuka* (online). <http://www.scribd.com/mobile/document/291620338/Buku-Panduan-Pramuka-Lengkap> diakses pada 25 Oktober 2017 pukul 16.24 WIB
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-IV*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Putra, Nusa & Hendarman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Sari, Dian Apita. 2016. *Tentang Sejarah Singkat Peringatan Hari Kebangkitan Nasional*(online). <http://malahayati.ac.id/?p=26368> diakses pada 25 Mei 2017 pukul 17.59
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryohadiprojo, Sayidiman. *Mengobarkan Kembali Api Pancasila*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Undang-Undang No 40 tahun 2009 tentang *Kepemudaan*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (online). [www.BPKP.go.id](http://www.BPKP.go.id) . Diakses pada 15 Desember 2016 pukul 10.00 WIB
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang *Gerakan Pramuka*.
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2010. *Tentang Gerakan Pramuka*. Diakses dari <http://pramuka.lk.ipb.ac.id/files/2012/11/UU-12-tahun-2010-GerakanPramuka.pdf>. Pada tanggal 2 Juni 2015 jam, 14.35 WIB.
- Wikipedia Ensiklopedia Indonesia. 2015. *Tentang Ekstrakurikuler* (online). <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekstrakurikuler> diakses pada 13 Desember 2016 pukul 13.15 WIB
- Wikipedia Ensiklopedia Indonesia. 2015. *Tentang Nasionalisme* (online). <https://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme> diakses pada 21 Mei 2017 pukul 16.57 WIB
- Yatim, Badri. (1999). *Soekarno Islam dan Nasionalisme*. Ciputat: PT. Logos wacana Ilmu.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara